



JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING

MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNSRAT

Goodwill

VOLUME 5 – NOMOR 2, DESEMBER 2014

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada GMIM Jemaat Kristus Manado)

Alfian Maase

Analisis Perbandingan Kinerja pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Christiana Graciella Angel

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Denda (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Tidore Kepulauan)

Hasannudin

Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado

Peggy Rumenser

Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Leverage* dan Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Periode 2009-2013

Riana Christel Tumewu

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung dan Komitmen Pimpinan terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Brammy Pandey

Analisis Pengaruh *Current Ratio* (CR), *Collateralizable Assets* (COL), *Return on Equity* (ROE), dan *Growth* Terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2005 - 2011)

Gretty Brigitta Liwe

Efek Waktu Pasar dan Kebijakan Investasi terhadap Struktur Modal

Winston Pontoh

JURNAL RISET AKUNTANSI dan AUDITING Goodwill

- Pelindung : Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons)
- Penanggungjawab : DR. Jullie J. Sondakh, SE.,MSi.,CPA
DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
- PimpinanRedaksi : DR. Herman Karamoy, SE.,MSi.,Ak
- Reviewer : Prof. DR. D. P. E. Saerang, SE.,M.Com (Hons)
DR. Ventje Ilat, SE.,MSi
DR. Jenny Morasa, SE.,MSi.,Ak
DR. Agus T. Poputra, SE.,MM.,MA.,Ak
- Redaksi : Lidia Mawikere, SE.,MSi.,Ak, CA
Novi Budiarmo, SE.,MSA.,Ak, CA
Winston Pontoh, SE.,MM.,Ak, CA
HeinceWokas, SE.,MM.,Ak, CA
Steven Tangkuman, SE.,MAk.,Ak, CA
Meily Kalalo, SE.,MSA.,Ak, CA
Christian Datu, SE.,MSi.,Ak, CA
- Operator Pelaksana : Andreita Agama, SE.,Ak
Claudia W. M. Korompis, SE, MSA, Ak, CA
Princilvanno A. Naukoko, SE, ME, MSA, Ak, CA
- Administrasi & Sirkulasi : Marnix Tuwongkesong, ST
Ayu LestianiMandalling, SE
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado
Jl. Kampus Bahu. Gedung Program Magister Akuntansi
Telepon (0431) 823018

Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing Goodwill Diterbitkan Oleh Program Magister Akuntansi (MAKSI) Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado, dimaksudkan sebagai media pertukaran informasi, penelitian dan karya ilmiah antara pengajar, alumni, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Jurnal ini terbit dua kali setahun yaitu bulan Juni dan Desember.

Redaksi menerima naskah yang belum diterbitkan oleh media dan tinjauan atas buku-buku akuntansi terbitan dalam dan luar negeri yang baru serta catatan/komentar atas artikel yang dimuat dalam jurnal ini. Surat-surat mengenai naskah yang diterbitkan, langganan, keagenan, dan lainnya dapat dialamatkan langsung ke redaksi.

Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing

Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Unsrat



VOLUME 5 – NOMOR 2, DESEMBER 2014

ISSN. 2088-8899

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Pelaksanaan Fungsi Audit Intern di Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada GMIM Jemaat Kristus Manado) | 1 – 15 |
| Analisis Perbandingan Kinerja pada Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | 16 – 29 |
| Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajib Pajak Atas Sanksi Denda (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Tidore Kepulauan) | 30 - 39 |
| Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kota Manado | 40 – 50 |
| Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Leverage</i> dan Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI Periode 2009-2013 | 51 – 59 |
| Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung dan Komitmen Pimpinan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. | 60 – 73 |
| Analisis Pengaruh <i>Current Ratio</i> , <i>Collateralizable Assets</i> , <i>Return on Equity</i> , dan <i>Growth</i> terhadap <i>Dividend Payout Ratio</i> (DPR) (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2005-2011) | 74 – 84 |
| Efek Waktu Pasar dan Kebijakan Investasi terhadap Struktur Modal | 85 - 90 |

**PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN DI ORGANISASI NIRLABA
(Studi Kasus pada GMIM Jemaat Kristus Manado)**

**Alfian Maase
(email: alfianmaase@yahoo.com)**

ABSTRACT

Christ Church GMIM Manado as a non-profit organization has had internal audit called BPPJ appropriate stewardship book GMIM Church of Christ Manado. BPPJ charge of fostering, or give direction (advices), ensure that there are adequate internal controls in the management of the treasury and fixed asset / inventory and inspection and monitoring to assess whether financial reporting and the asset is transparent and accountable in order to prevent fraud (crime) which can break up the unity of the church.

Phenomena occurring in the church today is the emergence of divisions and mistrust due to the financial management of the perceived lack of transparency and accountability, so to sue each other in court and even in the church who have had BPPJ not necessarily be separated from the problem. This is due to the discharge of its functions BPPJ still face many struggles or obstacles that cause the performance of the functions of the internal audit BPPJ not been effective as it should be.

This study aims to analyze how the internal audit function in the Church of Christ GMIM Manado. This study used a qualitative approach with a blend of ethnography and case studies.

The conclusion of this study indicate that the performance of the functions of the Church of Christ GMIM BPPJ in Manado has not run due plagued with struggles that come both from outside and from within his own BPPJ, the integrity of the church and the conversion of those who make mistakes that become important points of the implementation of the functions BPPJ, and the commitment and surrender to the task of calling the main criterion for becoming a member BPPJ.

Keywords: *Internal Audit (BPPJ), Church Organization, Implementation of BPPJ.*

PENDAHULUAN

Begitu banyaknya kejadian-kejadian permasalahan pertanggung jawaban keuangan dalam gereja yang menimbulkan saling curiga, perpecahan bahkan sampai saling menuntut dipengadilan dan bahkan sudah ada pengurus bahkan hamba Tuhan sebagai Pelayan di gereja yang mendekam di dalam penjara. Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa begitu sensitifnya masalah keuangan dan aset didalam gereja, sehingga menunjukkan pada kita bahwa pertanggung jawaban keuangan di dalam gereja sekalipun yang merupakan organisasi yang berlandaskan iman percaya kepada Yesus Kristus mutlak untuk dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berkaca pada kekisruan pengelolaan keuangan gereja ini memunculkan banyak pertanyaan apakah gereja tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara internal sampai harus dibawah ke pihak berwajib bahkan sampai harus kepengadilan dan mengapa kebocoran-kebocoran keuangan dan penyalahgunaan aset sudah sedemikian lama terjadi baru dilaporkan karena sudah pada tahap yang sangat luar biasa serta mengapa harus ada saling curiga atau tuduh menuduh dalam hal pengelolaan keuangan dan aset gereja?.

Hal-hal tersebut di atas terjadi oleh karena adanya ketimpangan informasi antara majelis atau pengelola/pengurus gereja sebagai pihak yang menjalankan operasional gereja dalam hal pelayanan peribadatan, persekutuan, diakonia, pekabaran injil dan kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya yang diberikan kepada jemaat maupun keluar jemaat dimana dalam semua kegiatan-kegiatan ini memiliki konsekuensi pendanaan yang tidak sedikit dalam hal pembiayaan dan pengadaan aset-aset sehubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang tentu saja sumber pendanaan tersebut berasal dari jemaat dalam bentuk persembahan dalam kantung kolekte pada setiap ibadah minggu, rayon/kolom/sel dan ibadah-ibadah lainnya yang diselenggarakan oleh gereja, persepuluhan, sumbangan lainnya dari jemaat untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja dalam berbagai hal yang bentuknya bisa berupa uang dan juga bisa berupa barang dan jasa, dan dari donatur yang bukan merupakan jemaat baik dari dalam negeri maupun luar negeri bisa orang pribadi dan organisasi, dengan jemaat dan donatur sebagai pemilik/pemberi dana terlebih khusus jemaat gereja tersebut

Bahkan dalam gereja yang sudah memiliki pelaporan keuangan dan aset sekalipun, masih saja timbul pertanyaan-pertanyaan uang ini dipakai untuk apa, beli apa, asetnya dimana, masih bagus atau rusak, harganya berapa bahkan ada yang muncul pertanyaan, mengapa dia yang menjadi suppliernya atau kontraktornya bahkan ada pertanyaan apakah ada standard operasional prosedur mengenai pengadaan barang dalam gereja yang sebenarnya menuju pada apakah ada SOP tentang sistem akuntansi dalam gereja yang mengarah kepada pelaporan keuangan gereja harusnya menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan dihasilkan dari kegiatan (transaksi) yang didukung dengan pengendalian intern yang baik, namun masalahnya di dalam gereja tidak semua anggota jemaat ini faham mengenai akuntansi, sehingga terjadi asimetri informasi tentang laporan keuangan yang dibuat oleh pengelola gereja katakana saja oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ).

Untuk bisa menciptakan transparansi dan akuntabilitas keuangan di dalam gereja memang kita sadari menjadi sesuatu pergumulan yang besar hal ini sejalan dengan hasil penelitian Susabda (1997:1) dalam Ian Raynald (2009:5-6) ada pemimpin gereja yang sudah merasa cukup bertanggung jawab dengan hanya melaksanakan dan memimpin tugas rohani di gereja seperti khotbah memimpin pelayanan, persekutuan doa, dsb. Sehingga mayoritas dalam kehidupan iman jemaat semua denominasi gereja pada umumnya terdoktrin secara pribadi bahwa pertanggung jawaban secara lisan atau tulisan untuk kolekte sebagai salah satu sumber diakonia menunjukkan ketidak ikhalasan jemaat memberikan sebagian kecil rezekinya untuk kemuliaan Allah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Booth (1993) yang menyatakan bahwa pemimpin gereja tidak ingin kondisi riil di dalam gereja terungkap, karena gereja didominasi oleh doktrin (konsep) suci dan teologi yang berbeda-beda pada masing-masing aliran gereja protestan, sehingga ada resistensi terhadap penggunaan akuntansi dalam gereja, dalam Fransiskus Randa (2011). Bahkan ketidaktransparan pengelolaan keuangan bisa terjadi diantara pemimpin organisasi keagamaan dengan alasan tertentu seperti yang terungkap dalam penelitian Dahnil Anzar dan Mukhtar (2010:10-11) ketua dan bendahara DKM secara sengaja tidak transparan dalam melaporkan keuangan masjid Baitulsalam karena telah menjadi kebiasaan pengurus bahkan jama'ah sekitar, jika keuangan masjid berjumlah besar maka mereka akan meminjam dari kas masjid dan tidak pernah mengembalikannya dan hal ini menjadi dilema dalam akuntabilitas dan transparansi, dengan *setting* kebudayaan tertentu akuntabilitas dan transparansi berhadapan dengan fakta budaya masyarakat yang memiliki kecenderungan tanggung jawab rendah, sehingga menghalangi eksisnya akuntabilitas dan transparansi, di sisi lain, urgensi akuntabilitas dan transparansi justru didorong oleh masyarakat dan jama'ah agar pengelolaan keuangan masjid menjadi lebih baik. Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa kondisi ini bisa dimanfaatkan atau dijadikan alasan oleh pemimpin, pengurus atau pengelola organisasi keagamaan untuk membuat laporan keuangan yang asal-asalan sehingga informasi keuangan yang disampaikan tidak informatif, tidak transparan dan tidak akuntabel.

Hal ini yang menimbulkan kekisruhan dalam pengelolaan perbendaharaan gereja. Sejarah GPIB, GMIM, gereja Bethany di Surabaya, gereja Yoido Full Gospel di Korea Selatan. Dan tentu saja masih banyak gereja-gereja lainnya yang mengalami pergumulan yang hebat dalam perbendaharaan gereja.

Untuk menjamin pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan oleh gereja dalam hal pengelolaan keuangan dan aset oleh pihak-pihak yang dipercayakan untuk mengelola gereja sudah transparan, informatif dan akuntabel dan telah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus ada suatu sistem atau alat untuk menentukan hal tersebut yang disebut dengan audit intern.

GMIM Jemaat Kristus Manado yang akan menjadi obyek penelitian ini merupakan gereja yang telah berkembang baik dari jumlah jemaat, unit atau komisi dalam gereja serta jumlah dana yang harus dipertanggungjawabkan hal ini menyebabkan permasalahan di dalamnya semakin kompleks. Gereja yang bermula dari kebiasaan ibadah Minggu di rumah Lie Chor Ping yang kemudian dipindahkan ke Toko Aneka Store (Aneka Darma), pada tahun 1962 dengan hanya berjumlah 25 orang Tionghoa yang belum Kristen dan 65 orang kelompok ibu-ibu rukun Rumoong-Lansot, saat ini memasuki awal Tahun 2014 anggota jemaatnya telah berkembang menjadi 2.218 orang dengan 11 rayon, dengan 7 komisi pelayanan non kategorial, 5 komisi pelayanan kategorial, dan 3 BHMG. Hal ini menjadikan sumber pendanaan dan obyek pengeluaran GMIM Jemaat Kristus menjadi lebih kompleks dan tentu saja pihak-pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan dan aset menjadi lebih luas dan harus dipenuhi kebutuhan akan informasi keuangan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang dapat dirumuskan adalah bagaimana pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, dengan tujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* adalah masalah yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam hal pengambilan keputusan antara agen dan principal. Hubungan kontraktual antara *principal* atau pemilik perusahaan dengan *agency* atau manajemen perusahaan sebagai pengelola dimana terjadi pendelegasian wewenang dari pemilik kepada pengelola, inilah yang dibahas dalam teori ini.

Masalah dalam keagenan ini disebabkan oleh adanya *asymmetric information* antara pemilik dan pengelola, yaitu ketika salah satu pihak memiliki informasi yang tidak dimiliki pihak lainnya.

Demikian juga di dalam organisasi keagamaan dalam hal ini di gereja BPMJ dan segenap kelengkapan pelayanannya mulai dari komisi, kompelka, rayon dan BHMG adalah agen-agen yang dipercayakan oleh jemaat untuk mengelola kegiatan pelayanan yang di dalamnya termasuk pengelolaan keuangan dan aset gereja, harus juga membuat laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan pelayanan yang diberikan kepada jemaat maupun pihak luar. Disinilah bisa terjadi gesekan-gesekan atau komplik karena perbedaan informasi yang dimiliki.

Teori Pelayanan (*Stewardship Theory*)

Menurut James H. Davis, F. Favid Schoorman dan Lex Donaldson, (1997) yang dikutip oleh Yeishi Seviyane (2012:12), *stewardship theory* mendefinisikan situasi dimana manajer tidak dimotivasi oleh tujuan individu, melainkan oleh selarasnya tujuan *principal* mereka. Pemahaman mengenai karakteristik manajer dan situasi merupakan hal yang penting untuk memahami kepentingan *manager-principal*

Dalam kehidupan manusia *stewardship* bermakna cara hidup seutuhnya dengan tanggung jawab penuh dalam pengakuan terhadap Allah sebagai Pencipta dan Pemilik atas segala-galanya. *Stewardship* adalah pengelolaan karunia Allah berupa waktu, talenta dan kekayaan, secara bertanggung jawab. Ia menguatkan hubungan dengan Allah dan sesama manusia. *Stewardship* adalah menjalani hidup dengan komitmen di mana Kristus adalah pusat dari segala sesuatu, dan bukan diri kita sebagai pusat dari segala sesuatu. Theodorus M. Tuanakota (2009:10).

Terkait dengan adanya suatu hubungan keagenan dan pelayanan, seperti yang diuraikan sebelumnya, maka dibutuhkan suatu sistem atau badan audit intern sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* serta pengelola sebagai agen dari kemungkinan perpecahan dan sebagai wujud dari saling menegur dan menasehati sebagai satu tubuh Kristus.

Audit Intern di Organisasi Gereja

Selama beberapa dasa warsa istilah Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat digunakan dalam audit intern di gereja. Audit intern dilaksanakan oleh auditor intern dengan berbagai sebutan yang ada dimasing-masing organisasi yang bersangkutan dan di dalam gereja di Indonesia umumnya menggunakan istilah BBPJ/BPPG untuk tingkat jemaat dan BPPS untuk tingkat sinode bagi gereja yang mempunyai Sinode.

Istilah badan pengawas lebih dipilih digunakan dibandingkan dengan badan pemeriksa, dengan pertimbangan karena audit intern di gereja laporannya bukan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dan audit intern dilaksanakan oleh lembaga di dalam gereja itu sendiri, Theodorus M. Tuanakota (2009:3-4).

Menurut Theodorus M. Tuanakota (2009:35-41), ada empat peran BPPG/BPPJ mulai dari yang bersahabat sampai yang berpotensi kompromatif. Ada peran pengawas yang bersifat mencegah terjadinya kecurangan dalam perbendaharaan gereja dan ada peran pengawas yang merupakan tindakan sesudah kecurangan terjadi, yaitu:

| Peran BPPJ- bahasa Inggris | Peran BPPJ-bahasa Indonesia |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <i>Counselor</i> | Penasehat |
| <i>Proctor</i> | Penilik |
| <i>Internal Auditor</i> | Pemeriksa Umum |
| <i>Fraud Examiner</i> | Pemeriksa Khusus |

1. *Counselor* (Penasehat)

Peran pertama seorang pengawas adalah sebagai penasehat bagi para pelaksana. Penasehat memberi nasehat atau *advis* berkenaan dengan penatalayanan perbendaharaan gereja. Untuk melaksanakan fungsi penasehat, pengawas perlu mempunyai pengetahuan, pengalaman dan wawasan yang luas, di samping persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BPPJ. Atau, pengawas mengetahui orang lain di dalam jemaat yang dapat memberikan nasehat yang lebih tepat untuk situasi yang dihadapi.

2. *Proctor* (Penilik)

Seorang *proctor* adalah seorang pengawas di gereja menciptakan suasana yang nyaman untuk melindungi aset jemaat, yakni dengan membuat lingkungan pengendalian intern yang kondusif, dan bukan sekedar sistem pengendalian intern.

3. *Internal Auditor* (Pemeriksa Umum)

Pemeriksa umum adalah fungsi dan peran yang selama ini sudah dipraktikkan oleh BPPJ/BPPG.

Dalam pemeriksaan umum pengawas secara independen mengevaluasi : (1) laporan keuangan jemaat, untuk memastikan kehandalan laporan tersebut; (2) catatan pembukuan dan catatan administrasi lainnya yang tersebar di beberapa tempat seperti di kantor jemaat (dibendahara jemaat dan karyawan gereja), bendahara komisi, kompelka, BHMGM, rayon dan panitia; (3) pengendalian intern, untuk memastikan apakah (a) pelaporan keuangan handal, (b) aset atau harta jemaat aman, dan (c) ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan intern jemaat/gereja ditaati.

Pengawas harus menuangkan temuannya dalam draft laporan dan membicarakannya dengan pelaksana yang menjadi auditan atau yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti temuan tersebut.

4. *Investigative Auditor* (Pemeriksa khusus)

Dalam pembaharuan sistem pengawasan perbendaharaan gereja, tekanan bergeser ke pendekatan yang produktif, bersahabat, dan bersifat mencegah *fraud* (preventif) sehingga pemeriksaan khusus tidak diperlukan.

Pemeriksaan khusus atau audit *investigative* kelihatan “gagah”, *cool*, atau dalam bahasa gaul “kren abis”. Tidak mengherankan pemeriksa dalam perbendaharaan gereja mencari peluang untuk melakukan “investigasi” (istilah yang keliru, hanya dipakai oleh penegak hukum). Jangan lakukan pemeriksaan khusus jika anda tidak tahu caranya, karena ketidaktahuan kita bisa berakibat fatal, seperti: orang yang tidak bersalah, menjadi korban; suasana yang tegang; dan bahkan jemaat yang terpecah-belah.

Sasaran pelayanan pengawasan perbendaharaan jemaat adalah: Pengelola perbendaharaan yaitu Majelis Jemaat serta mereka yang diberi hak dan kewajiban untuk mengurus harta milik gereja yaitu BPMJ, pengurus rayon, kompelka, komisi kerja, biro, seksi, BHMGM, tata usaha, panitia dan oknum yang terkait.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:50-54) menyatakan kualifikasi auditor internal (pengawas) dalam dua kualifikasi yaitu:

1. Kualifikasi alkitabiah; yang berpedoman pada syarat-syarat untuk penatua dan diaken/syamas.
2. Kualifikasi teknis

Secara umum, pengawas perbendaharaan harus menguasai penatalayanan perbendaharaan jemaat dan bersikap independen. ya.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:57-63), mengatakan bahwa BPPJ harus memiliki program kerja yang bervariasi dari satu jemaat dengan jemaat lainnya.

Theodorus M. Tuanakota, (2009:67-70), menyatakan bahwa pengawas (fungsi audit intern) perlu membuat laporan atas hasil pelayanan pengawasan perbendaharaan jemaat. Pengawas perbendaharaan gereja/jemaat bukan auditor independen. Karena itu pengawas atau BPPJ tidak boleh memberikan pendapat auditor independen, apakah itu WTP, WDP, pernyataan tidak memberikan pendapat, atau pendapat tidak wajar. Bentuk dan isi laporan tergantung peran atau fungsi yang dilaksanakan.

Penelitian Sebelumnya

Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai bagaimana akuntabilitas dan transparansi, akuntansi dan audit intern dalam suatu organisasi atau peran apa saja yang dilakukan audit intern dalam suatu organisasi, demikian juga penelitian yang dilakukan di organisasi keagamaan sudah cukup banyak terutama yang berhubungan dengan akuntansi, transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian Paul David Elia Saerang (2003) tentang *Accountability and Accounting In A Religious Organisation: An Interpretive Ethnographic Study Of The Pentacostal Church Of Indonesia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk dana-dana yang berasal dari persepuluhan dan persembahan aturan informasi akuntansi tidak digunakan dan kebutuhan akan praktek akuntansi sangat minim, sedangkan untuk dana-dana pada *central board, regional board* dan dana duka aturan informasi akuntansi digunakan dan kebutuhan akan praktek akuntansi diperlukan.

Penelitian Fransiskus Randa (2011) tentang *Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola (akuntabilitas) keuangan di tingkat Stasi lebih baik, karena pertanggung jawaban keuangan kepada umat diumumkan secara transparan untuk seluruh penerimaan dan pengeluaran setiap hari minggu, sedangkan di tingkat Paroki transparansi dan akuntabilitas masih setengah hati sehingga diperlukan fungsi dewan keuangan yang ada diparoki sebagai pengawas.

Kerangka Konseptual

Saat ini umumnya gereja telah memiliki BPPJ dan telah ditetapkan tugas dan wewenangnya dalam penatalayanan gereja akan tetapi dalam perjalanannya pelaksanaan fungsi BPPJ ini seperti mati suri. BPPJ tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya dengan maksimal bahkan ada BPPJ yang memang tidak bekerja sama sekali. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak hal yang berbeda-beda disetiap jemaat dan di dalam BPPJ sendiri. Faktor penyebab antara lain :

1. Dari luar BPPJ;
 - a. Ada pengurus gereja yang merasa bahwa pelaporan keuangan secara tulisan bahkan lisan atas dana yang diterimanya menunjukkan ketidak ikhlasan jemaat dalam memberi.
 - b. Ada pro dan kontra dikalangan jemaat sendiri tentang bentuk pertanggung jawaban keuangan dan perlu tidaknya BPPJ.
 - c. Ada keengganan dari pengurus untuk bekerja sama dengan BPPJ.
 - d. Pelaporan keuangan yang tidak memadai sehingga tidak auditibel.
 - e. Dll
2. Dari dalam BPPJ :
 - a. Kapasitas dari anggota BPPJ.
 - b. Keterbatasan waktu/pemberian diri dari anggota BPPJ.
 - c. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas
 - d. Tidak adanya program audit
 - e. Dll

Hal tersebut di atas antara lain yang menjadi fenomena tidak bisa berjalan dengan baik fungsi dan wewenang dari BPPJ atau dengan kata lain kendala-kendala tersebut di atas cukup mengganggu pelaksanaan fungsi dari BPPJ, sehingga mengelitik nurani dari peneliti untuk melihat bagaimana pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado ini, dengan demikian bisa disimpulkan mengenai pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode etnografi dan studi kasus. Studi etnografi merupakan salah satu dari lima tradisi kualitatif, yaitu biografi, fenomenologi, *grounded theory*, etnografi, dan studi kasus.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pelaporan keuangan gereja, audit intern di gereja serta manfaat

dan kekurangannya dihubungkan dengan teori yang ada dan akhir bisa diartikan suatu kesimpulan sehingga bisa memberikan saran yang membangun.

Penelitian akan dilakukan pada GMIM Jemaat Kristus Manado, dalam kurun waktu Maret sampai dengan Juli 2014, ditambah pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan pengamatan atau observasi serta berdasarkan pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ dalam pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado.

Berdasarkan sumber, data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian melalui wawancara, dengan berbagai pihak yang terlibat dalam penatalayanan perbendaharaan, pengawasan dan beberapa jemaat GMIM Jemaat Kristus Manado, pengamatan atas pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern dan catatan pengalaman penulis sebagai anggota BPPJ, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai referensi berupa literature dan buku, serta dokumen yang ada tersedia ditempat penelitian.

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

1. Penelitian lapangan

Dilakukan untuk memperoleh data primer tentang audit intern di organisasi nirlaba kebutuhan atau formalitas suatu studi pada gereja. Penelitian dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan pihak yang terlibat langsung dengan obyek yang sedang diteliti. Yaitu; Ketua BPMJ /mantan ketua BPMJ, bendahara, bagian keuangan dan rumah tangga gereja, serta BPPJ/mantan BPPJ.

- b. Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemeriksaan/pengawasan yang dilakukan oleh BPPJ.

2. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder sebagai pendukung dan penguat data primer.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian, yakni BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado, serta membandingkan kondisi yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado dengan teori yang ada, sehingga pada akhir bisa menarik kesimpulan bagaimana pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado dan memberikan saran yang diperlukan sehubungan permasalahan yang ada.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Fungsi BPPJ

Fungsi BPPJ Sebagai Konsultan.

1. Program kerja

Dari awal keberadaan BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado tidak pernah membuat suatu program kerja yang berhubungan dengan fungsinya sebagai penasehat atau pembina dalam hal penatalayan perbendaharaan gereja.

2. Pelaksanaan pengawasan

Dalam pelaksanaannya BPPJ bersikap menunggu permintaan bantuan atau pertanyaan dari pengelola atau pengurus gereja, baik itu BPMJ, pegawai, majelis rayon, komisi, kompelka dan BHMG, kemudian barulah BPPJ bisa melaksanakan fungsinya untuk memberikan masukan atau arahan. Keadaan yang terjadi adalah, ada keengganan dari pengelola/pengurus untuk bertanya atau meminta masukan serta tidak dikutsertakannya BPPJ dalam penyusunan program (anggaran) kegiatan di gereja dan walaupun ingin bertanya mau bertanya kepada siapa dan kalau sudah bertanya jawabannya kurang memuaskan atau alasannya tidak ada waktu untuk mendengarkan

permasalahan yang dihadapi oleh pengurus atau jika diundang ke tempatnya pengurus gereja kata mantan-mantan pengurus gereja.

Hal ini bisa dimengerti karena BPPJ sendiri dalam hal pemilihan dan peneguhan/pelantikan selalu yang paling belakang, senada yang diungkapkan mantan ketua BPMJ periode sebelumnya dalam wawancara dengan beliau bahwa “ anggota BPPJ diambil dari orang-orang yang tersisa yang tidak menjabat sebagai majelis atau pengurus rayon, komisi, dan BHMG”.

BPPJ dua periode terakhir ini sudah mengambil langkah awal dengan memberikan sosialisasi mengenai tugas BPPJ dan bagaimana penatalayanan perbendaharaan yang sederhana, serta menyamakan persepsi dengan BPMJ. Hal lain juga yang merupakan kemajuan adalah sikap dari pegawai gereja yang bertanggung jawab dengan penatalayanan perbendaharaan yang mau bertanya serta anggota BPPJ yang bisa melayani permintaan saran tersebut, sehingga ada kendala-kendala yang dihadapi dalam penatalayanan perbendaharaan yang sudah bisa diatasi dan kemungkinan kesalahan atau kekeliruan sudah bisa dikurangi bahkan dicegah.

3. Laporan pengawas

BPPJ tidak pernah membuat laporan secara tertulis mengenai masukan-masukan atau arahan-arahan yang sudah diberikan atau dianjurkan. Biasanya anggota BPPJ yang dimintakan untuk memberikan masukan atau arahan oleh pengelola/pengurus akan membuat catatan pribadinya.

Fungsi BPPJ Sebagai Penilik

1. Program kerja

BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado sampai saat ini belum memiliki program kerja untuk fungsinya sebagai penilik. Pelaksanaan fungsi ini seringkali bergantung pada pemahaman dan pengalaman masing-masing anggota BPPJ.

2. Pelaksanaan pengawasan

BPPJ tidak melakukan evaluasi efektivitas pengendalian intern sebelum melakukan fungsi ini. Memang sampai saat ini belum ada kejadian-kejadian yang muncul ke permukaan bahwa aset/inventaris gereja disalahgunakan atau diselewengkan. Namun berdasarkan wawancara dan pengamatan serta percakapan informal dengan beberapa pengurus gereja dan jemaat serta BPPJ sendiri dapatlah dikatakan bahwa hal tersebut bisa saja terjadi dan mungkin sudah terjadi hanya saja tidak bisa diungkapkan, karena menurut mereka ada sebenarnya aset gereja yang harusnya keberadaannya di gereja akan tetapi saat ini tidak berada digereja, bahkan ada pula aset-aset gereja yang bukti kepemilikannya atas nama orang pribadi tertentu. Lebih lanjut lagi dengan kondisi yang tidak ada SOP tentang aset/inventaris gereja hal ini membuka peluang untuk hilangnya atau disalahgunakannya aset/inventaris milik gereja.

3. Laporan hasil pengawasan

BPPJ selama ini tidak pernah memberikan laporan pelaksanaan fungsinya sebagai penilik mengenai kondisi dan apa yang terjadi di dalam pengelolaan aset tetap atau inventaris milik gereja secara tertulis kepada BPMJ maupun ke sidang majelis jemaat, laporannya bisanya secara lisan dan selalu bersamaan dengan hasil pemeriksaan umum.

Fungsi BPPJ Sebagai Pemeriksa Umum

1. Program kerja

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPPJ selama ini tidak memiliki program kerja yang disusun berdasarkan obyek pemeriksaan maupun program kerja secara umum. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan pemahaman dan pengalaman anggota BPPJ. Kondisi ini sering membuat anggota BPPJ yang latar belakang pendidikannya bukan akuntansi dan tidak memiliki pengalaman sebagai auditor bingung harus mulai dari mana dan melakukan apa pada saat turun lapangan pemeriksaan.

2. Pelaksanaan pengawasan

Fungsi BPPJ sebagai pemeriksa umum ini adalah fungsi yang sudah dilaksanakan dan dipraktekkan selama ini. Walaupun fungsi ini adalah fungsi yang paling dikenal oleh BPPJ, namun di BPPJ GMIM Jemaat Kristus sendiri fungsi ini barulah benar-benar dilakukan secara reguler untuk dua periode pelayanan terakhir ini, itupun belum maksimal. Dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan BPPJ dalam melaksanakan tugas dan tanggung

jawabnya tidak memiliki jadwal yang teratur dan berkesinambungan, tidak ada perencanaan, tidak ada program audit, kertas kerja tidak dipelihara dengan baik, tidak ada pembagian tugas yang jelas, keterbatasan waktu dari anggota BPPJ, tidak adanya pelaporan hasil pemeriksaan yang tertulis dan baku, sehingga pemantauan terhadap tindak lanjut temuan tidak bisa dilakukan, bahkan ada pengurus/pengelola yang sudah diperiksa bertanya mana hasil pemeriksaan karena untuk merubah apa yang sudah mereka lakukan selama ini dibutuhkan laporan hasil pemeriksaan yang resmi, bahkan ada yang berkata kalian (BPPJ) hanya periksa-periksa dan tidak ada laporannya, ada juga yang menginginkan sebelum dibuat laporan final sebaiknya dibahas dulu dengan mereka (obyek yang diperiksa), belum lagi keterbatasan sumber daya manusia (kualitas) yang memadai untuk tugas sebagai BPPJ.

Tahapan pemeriksaan yang selama ini dilakukan di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan pemeriksaan untuk periode waktu tertentu sekaligus nama-nama anggota BPPJ yang akan memeriksa dan lama waktu pekerjaan lapangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan lapangan tanpa program pemeriksaan, jadi pemeriksa akan berkreatifitas berdasarkan pemahaman dan mungkin pengalaman yang dimilikinya, dan hasilnya kemudian dilaporkan secara lisan dan dalam pelaksanaan ini kertas kerja tidak memadai dan tidak didokumentasikan dengan baik.

Selain hal-hal di atas terdapat juga keengganan dari pengurus terutama pengurus rayon untuk dilakukan pemeriksaan sehingga khususnya untuk periode yang lalu BPPJ tidak bisa melakukan pemeriksaan atas semua rayon. Bentuk pelaporan keuangan dan aset yang tidak seragam, belum mengikuti praktek yang lazim, serta keterbukaan atau dukungan penuh yang masih kurang dari obyek yang diperiksa (sikap membatasi/membuat pagar/kurang bersahabat) sangat mengganggu pelaksanaan tugas pelayanan dari BPPJ. Ditambah juga dengan sikap anggota BPPJ yang kurang bersahabat (kurang sopan) saat memeriksa atau memberikan arahan terlihat berpengaruh terhadap sikap membatasi diri dari obyek yang diperiksa. Kadang-kadang ada anggota BPPJ yang bersikap agak kasar (kurang santun), menggurui, membuat beberapa pengelola merespon juga dengan cara yang kurang bersahabat dan membatasi diri bahkan kadang-kadang tercipta opini dari pengelola dan bahkan jemaat bahwa anggota BPPJ seperti polisi bahkan saat ini sering disebut KPK.

BPPJ saat ini sementara menyusun laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan dari April 2014 s/d Juli 2014. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan hasil pemeriksaan adalah:

1. Belum ada format laporan yang baku (masih mencari-cari bentuk)
2. Belum ada kertas kerja yang memadai, terutama sebagai referensi temuan
3. Dokumentasi temuan yang kurang memadai (ada dimasing-masing anggota BPPJ)
4. Tidak semua anggota BPPJ memberikan waktunya dengan maksimal, bahkan ada anggota BPPJ yang tidak melaksanakan tugas pelayanannya sama sekali.
5. Keterbatasan waktu dari anggota BPPJ untuk bertemu dan membahas temuan hasil pemeriksaan untuk dituangkan dalam laporan, hal ini disebabkan oleh karena belum ada jadwal dan rencana kerja yang jelas melalui hasil pembicaraan resmi di BPPJ sendiri.

Terlepas dari kendala-kendala dan kekurangan tersebut, BPPJ periode saat ini sudah berusaha melaksanakan fungsinya dengan baik, paling tidak ada saran-saran perbaikan yang langsung bisa diberikan pada saat melakukan pemeriksaan. Hal ini bisa terlihat pada saat BPPJ melaksanakan tugas pelayanannya yang diamati penulis serta hasil wawancara dengan pelaksana yang menyatakan bahwa keberadaan BPPJ sangat dibutuhkan sebagai lembaga yang mengontrol penggunaan dana dalam kegiatan pelayanan di gereja dan paling tidak bisa memberikan saran atau masukan-masukan atas kekurangan yang ditemui dalam penatalayanan perbendaharaan gereja serta sebagai efek kejut bagi pengurus/pengelola gereja bahwa mereka diawasi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya temuan-temuan administratif baik yang menyangkut ketidak taatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, praktek akuntansi yang tidak lazim, serta ketiadaan dukungan dokumen legal yang diwajibkan undang-undang, dan temuan-temuan lain yang tidak bisa dibeberkan di dalam laporan penelitian ini.

Selama ini tujuan dari pemeriksaan umum terbatas pada pengecekan ada tidaknya buku-buku kas/bank serta kecocokkan dengan fisik uangnya, dan laporan penerimaan serta pengeluaran dan keberadaan bukti-bukti transaksi saja (secara normatif) itupun kadang dilakukan kadang tidak. Dua

periode pelayanan BPPJ terakhir mencoba lebih masuk pada substansi dari pemeriksaan umum yang sebenarnya sesuai penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado mengenai fungsi BPPJ dalam hal pemeriksaan yaitu meneliti keabsahan pengelolaan perbendaharaan, yang bermakna luas dan tidak terbatas hanya kegiatan mencocokkan yang selama ini dilakukan. Apalagi di GMIM Jemaat Kristus Manado terdapat beberapa komisi yang transaksi keuangan dan jenis aset inventaris yang dibeli memerlukan prosedur pemeriksaan yang lebih dari sekedar pencocokan dan vouching saja. Seperti komisi musik, seni dan paduan suara, komisi audio visual, komisi arimatea. Disamping itu BPPJ juga diperhadapkan dengan pemeriksaan di tiga BHMG yang berbentuk yayasan dan perseroan terbatas dimana diketahui bersama untuk pemeriksaan terhadap yayasan dan perseroan terbatas ruang lingkup pemeriksaan menjadi luas karena transaksi keuangan yang ada di BHMG lebih banyak dan lebih kompleks termasuk di dalamnya ada konsekuensi pajaknya.

Namun sekali lagi upaya ini belum juga berjalan semestinya setidaknya sampai hari ini karena beberapa kendala teknis dan non teknis di atas.

3. Laporan hasil pengawasan

Selama ini BPPJ hanya sekali memberikan laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan secara tertulis yaitu pada tahun 2011 untuk pemeriksaan periode 31 Desember 2010. Untuk hasil pelaksanaan pemeriksaan umum sebelum dan sesudah periode tersebut sampai sekarang belum pernah BPPJ menyampaikan laporan secara tertulis. Untuk hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2014 sementara dalam tahap penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Fungsi BPPJ Sebagai Pemeriksa Khusus

Fungsi BPPJ yang ini tidak diatur secara tersendiri dalam penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, fungsi ini pernah sekali coba dilakukan oleh BPPJ pada awal terbentuknya BPPJ tetapi bukan sebagai pemeriksaan khusus tetapi tugas sebagai pengawas, namun karena kekurangan personil, keterbatasan pemahaman anggota BPPJ mengenai penatalayanan perbendaharaan gereja dan aset, keterbatasan pengetahuan akan auditing terlebih lagi pemeriksaan khusus (audit investigasi) maka tidak jelas hasilnya seperti apa. Akhirnya masalah ini diselesaikan oleh gembala sidang waktu itu dengan pengembalaan dan sanksi disiplin gereja. Setelah periode tersebut BPPJ belum pernah melaksanakan pemeriksaan khusus dan mudah-mudahan tidak akan pernah dilakukan.

Jenis pemeriksaan seperti ini (audit investigasi) adalah fungsi BPPJ, jika ada permintaan atau penugasan dari sidang majelis karena ada indikasi terjadi kecurangan yang secara material merugikan perbendaharaan gereja. Informasi adanya indikasi tersebut bisa datang dari hasil pemeriksaan umum BPPJ sendiri, laporan dari BPMJ ke sidang majelis sebelum BPPJ melakukan pemeriksaan umum, atau adanya laporan dari anggota jemaat.

Fungsi BPPJ yang satu ini adalah fungsi yang sarat benturan dan berpotensi menimbulkan perpecahan di dalam gereja, sehingga BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado berusaha menghindari pelaksanaan pemeriksaan khusus ini. Sejalan dengan hal tersebut pemeriksaan khusus mungkin tidak dilakukan karena selama ini belum ada isu-isu yang serius mengenai adanya indikasi hal tersebut walaupun ada isu-isu tersebut langsung diredam oleh BPMJ dengan jalan pengembalaan dan pembinaan oleh gembala sidang.

Di GMIM Jemaat Kristus Manado tujuan pemeriksaan khusus bukanlah untuk pemulihan kerugian perbendaharaan gereja (ini yang terlihat dan tersirat) dari pengamatan dan wawancara serta hasil pembicaraan non formal dengan beberapa mantan anggota BPMJ, anggota BPMJ, mantan dan anggota BPPJ serta beberapa jemaat. Tujuan utamanya adalah terjadi pemulihan cara hidup yang salah dibawah kembali ke cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan melalui proses pengembalaan atau yang paling parah adalah sanksi disiplin gereja.

Hasil Pembahasan

Pelaksanaan Fungsi BPPJ

Hubungan antara pengelola/pengurus gereja dengan jemaat sebagai donatur (sumber) pendanaan gereja tidak bisa disebutkan sebagai hubungan principal dan agen seperti pada sektor swasta atau pemerintahan disebabkan jemaat tidak senantiasa menuntut pertanggung jawaban dana yang diberikan kepada pengelola gereja dalam bentuk yang formal seperti pada organisasi yang lain dan jemaat percaya

bahwa pengelola adalah orang-orang yang telah dipilih yang tentu saja bisa dipercaya untuk mengelola perbendaharaan gereja secara benar, apalagi jika dihubungkan dengan *stewardship theory* sehingga mereka percaya bahwa perbendaharaan gereja telah diurus oleh orang dalam hal ini pelayan-pelayan khusus yang dibantu oleh pegawai-pegawai gereja yang bisa dipercaya.

Namun demikian sesuai dengan buku penatalayanan dan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam gereja maka, dibentuk Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ), yang tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris gereja sehingga BPPJ dituntut untuk menjadi lembaga yang efektif memerankan perannya dalam memberikan jaminan bahwa pengendalian intern gereja sudah berjalan dengan efektif, tata kelola gereja sudah dilaksanakan secara efektif dan efisien menjamin keamanan harta milik gereja dan ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan sebagaimana mestinya sebagai suatu lembaga BPPJ yang efektif dikarenakan banyak pengumpulan dalam pelaksanaannya. Dalam melaksanakan fungsinya terkadang anggota BPPJ bersikap seolah-olah seperti polisi dan kurang santun dalam berkomunikasi. Theodorus M. Tuanakota (2009:2) menyatakan bahwa pengawasan yang efektif justru sangat bersahabat (*user friendly*). Dalam pengawasan, pengawas dan pelaksana adalah rekan pelayanan di ladang Tuhan. Mereka setara, dan berjalan seiring dalam pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu seharusnya anggota BPPJ harus bersikap santun dan harus menegur dalam kasih sebagai sesama saudara seiman.

Perbendaharaan gereja tidak aman dari kemungkinan berbagai penyelewengan, pemborosan, penjarahan, dan korupsi. Yosua dalam zaman Perjanjian Lama mengalaminya. Rasul-Rasul dalam Perjanjian Baru menghadapi pasangan Ananias dan Safira. Theodorus M. Tuanakota (2009:13). Banyak sejarah gereja yang mencatat pengumpulan hebat dalam perbendaharaan gereja seperti BPIB, GMIM, gereja Pdt. Paul Yongghi Chou, Gereja Bethany Surabaya dan masih banyak gereja yang lain termasuk GMIM Jemaat Kristus Manado walaupun hal tersebut tidak terekspose.

Disinilah peran BPPJ dibutuhkan untuk menjamin penatalayanan perbendaharaan gereja terlindungi dari kecurangan dan kejahatan lainnya sehingga bisa tercipta akuntabilitas dan transparansi di dalam penatalayanan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja, namun cara penyelesaian kecurangan yang bukan pada pemulihan kerugian ini berdampak pada kurang seriusnya elemen-elemen di gereja untuk membenahi tata kelola yang kurang efektif dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Walaupun demikian saat ini atau nanti, suka atau tidak suka BPPJ akan berhadapan dengan kejahatan dalam perbendaharaan gereja, sehingga fungsi dari BPPJ sebagai lembaga pengawas lebih dibutuhkan lewat peran atau pelaksanaan fungsinya, paling tidak jika BPPJ sebagai audit intern melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya audit intern yang efektif maka jika ditemukan ada kecurangan maka BPPJ telah menyelamatkan jiwa yang berdosa atau membuat orang menghindari berbuat dosa. Hal ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang menyatakan bahwa audit internal berperan dalam mendeteksi kecurangan dan menjamin terciptanya akuntabilitas dan transparansi melalui *good corporate governance*.

Seperti yang telah diuraikan dalam landasan teori di atas, terdapat empat fungsi/peran pengawas di dalam gereja yang dilakukan oleh BPPJ dan akan dibandingkan dengan apa yang dilaksanakan oleh BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado, yaitu:

1. Penasehat (*counselor*) atau kalau dalam Penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado disebut Pembinaan; dalam pelaksanaan fungsi ini penasehat tidak perlu memiliki program kerja. Penaseha bekerja secara informal, dan dalam pelaksanaannya penasehat harus berpengetahuan dan berwawasan luas, berpengalaman, bersahabat, dan persyaratan kejujuran yang senantiasa melekat pada BPPJ, serta harus bisa melihat bahwa ada kendala yang sedang dihadapi pengelola hanya saja mereka malu atau segan untuk menceritakan, dan ringan kaki untuk mendatangi pengelola yang meminta bantuan atau mereferensikan seseorang di jemaat yang ahli untuk masalah tersebut dan tidak perlu membuat laporan formal. Pelaksanaan fungsi ini di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado masih belum berjalan sebagaimana mestinya karena BPPJ bersikap pasif dalam artian kalau pengelola tidak bertanya maka BPPJ acuh tak acuh, tidak mengusai atau memahami pengelolaan perbendaharaan serta kekurangan waktu (pemberian diri yang kurang), namun tahun-tahun terakhir ini pelaksanaan fungsi ini sudah mulai berjalan terlihat pada masukan-masukan dan

arahan-arahan yang diberikan kepada pengelola yang bisa menyelesaikan masalah mereka, walaupun masih tetap pasif.

2. Penilik (*proctor*); dalam pelaksanaan fungsi ini penilik menyusun *checklist* mengenai fitur-fitur dalam elemen pengendalian intern sebagai program kerjanya dan membandingkan dengan kondisi ril digereja sehingga bisa dipastikan bahwa pengendalian intern gereja berjalan dengan efektif untuk melindungi aset gereja dan memastikan sistem pelaporan berjalan dengan baik dan laporan yang dihasilkan menjadi handal dan hasil penilikan disampaikan secara tertulis kepada BPMJ dan SMJ. Hal ini tidak dilaksanakan di BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado akibat kualifikasi sumber daya yang tidak semua kompeten dan alasan kurangnya waktu anggota BPPJ, dan belum adanya SOP untuk operasional dan akuntansi.
3. Pemeriksa Umum (*internal auditor*); program kerja pemeriksaan disesuaikan dengan keadaan obyektif di jemaat, artinya program pemeriksaan tergantung kondisi dan akun-akun yang dalam laporan keuangan gereja, dalam pelaksanaannya pemeriksa mengacu pada program kerja yang sudah disusun sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan bukti pemeriksaan, laporan hasil pemeriksaan harus dibuat secara tertulis dan didiskusikan terlebih dahulu konsepnya dengan obyek pemeriksaan sebelum diserahkan ke BPMJ DAN SMJ. BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado dalam pelaksanaan fungsi ini belum menyusun program kerja, sehingga pemeriksaan berjalan berdasarkan kemauan dan pemahaman pemeriksa dan bukti yang dikumpulkan kurang memadai hal ini terlihat pada kurangnya kertas kerja yang dipelihara serta laporan hasil pemeriksaan yang berbentuk lisan dan saat ini keterlambatan penyusunan laporan hasil pemeriksaan selain kendala keterbatasan waktu dari anggota BPPJ, dan inilah kondisi pelaksanaan fungsi BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado.
4. Pemeriksa Khusus (*fraud examiner*) dalam penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado tidak diatur secara tersendiri, namun fungsi tersebut melekat pada tugas pemeriksaan dan pengawasan dan fungsi ini sangat dihindari untuk dilakukan.

Sebagai lembaga pengawas BPPJ tidak mengeluarkan opini atau pendapat auditor independen. Karena BPPJ ini adalah fungsi audit intern, yang dilaksanakan oleh orang/lembaga yang berada di dalam gereja itu sendiri. Bentuk dan isi laporan pengawas perbendaharaan gereja (BPPJ) bergantung dari peran yang dilaksanakannya. BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado sendiri dalam hasil pemeriksaan dan pengawasannya tidak mengeluarkan opini, namun belum bisa memberikan laporan secara berkala akan hasil pelaksanaan fungsinya.

BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado ditengah pergumulan yang datang dari dalam BPPJ sendiri maupun dari luar selama ini sudah berusaha bisa menjalankan tugas pelayanannya yang bisa terlihat dari adanya upaya-upaya yang lebih intens melakukan fungsinya dalam dua periode terakhir ini, walaupun memang dari sisi kualitas masih rendah karena adanya kendala-kendala tersebut di atas atau penulis menyebutnya pergumulan meminjam istilah dari bapak Theodore M. Tuanakota.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai apa dan bagaimana BPPJ itu dan hasil pelaksanaan tugas pelayanan dari BPPJ dan dihubungkan dengan landasan teori yang terkait, terlihat bahwa keberadaan BPPJ di GMIM Jemaat Kristus Manado sebenarnya adalah kebutuhan, karena terlepas dari hambatan/pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh BPPJ baik yang datang dari dalam BPPJ maupun dari luar, GMIM Jemaat Kristus Manado membutuhkan BPPJ sebagai lembaga yang bisa memberikan masukan/saran-saran yang dibutuhkan oleh pengelola/pengurus gereja dalam penatalayanan perbendaharaan gereja yang transparan dan bertanggung jawab, sebagai rekan sepelayanan di ladang Tuhan yang mengawasi dan mengingatkan pengelola/pengurus gereja kalau mereka menyimpang dari jalan Tuhan dalam penatalayanan perbendaharaan gereja (seperti yang dikatakan oleh mantan Ketua BPMJ dua periode lalu dalam sidang majelis jemaat, bahwa kita harus bersyukur dengan keberadaan BPPJ yang menegur kita dan atas temuan-temuannya saat pemeriksaan karena dengan demikian kita diingatkan bahwa kita sudah menyimpang dari jalan Tuhan dan kita diajak untuk kembali ke jalanNya, harusnya kita tidak perlu marah atau tersinggung), pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa BPPJ ini diperlukan dan baiklah semua pengurus/pengelola gereja mendukung pelayanan dari BPPJ dan jangan menolak untuk diperiksa karena BPPJ ini adalah rekan sekerja dalam pelayanan kepada Tuhan, yang saling mengingatkan dan menegur sesama anggota jemaat. Pernyaan tersebut juga didukung

dengan ayat firman Tuhan yang menyatakan lebih baik teguran yang nyata dari pada kasih yang tersembunyi. Keberadaan BPPJ juga untuk jaminan bahwa pengelolaan perbendaharaan gereja baik uang maupun inventaris, berjalan sesuai dengan penatalayanan perbendaharaan gereja dalam tugas panggilan dan pengutusannya sebagai gereja Tuhan di dunia ini, dan untuk menghindari fitnah dan isu-isu yang bisa memecah belah keutuhan anggota jemaat sebagai gereja Tuhan.

Tuntutan akan tata kelola gereja yang baik semakin dirasakan oleh GMIM Jemaat Kristus Manado dan hal ini sangat diseriisi oleh BPMJ dua periode sebelumnya dan periode saat ini, sehingga ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami mengenai penatalayanan perbendaharaan gereja yang sesuai dengan praktik yang lazim BPMJ sebagai pengelola/pengurus gereja beserta pengurus rayon, kompelka, komisi kerja dan BHMG mencoba melakukan tata kelola perbendaharaan gereja (keuangan dan aset tetap/inventaris) yang transparan dan akuntabel.

Namun demikian keberadaan BPPJ sebagai lembaga pengawas intern sangat diperlukan untuk menjamin terciptanya suatu tata kelola (penatalayanan) perbendaharaan gereja yang transparan dan akuntabel yang hal tersebut sejalan dengan iman Kristiani. BPPJ ini diperlukan karena tidak mungkin pengelola/pengurus menilai dirinya sendiri atau memberikan evaluasi atas apa yang dilakukannya atau apakah pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja sudah transparan dan akuntabel, sehingga perlu ada lembaga atau badan di dalam gereja sendiri yang independen untuk melaksanakan fungsi tersebut secara obyektif dan di GMIM Jemaat Kristus Manado disebut BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Ardeno Kurniawan (2012:7) bahwa audit internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan obyektif dikelola secara independen di dalam organisasi dan Hiro Tugiman (2006:11) bahwa fungsi audit intern adalah melakukan penilaian dalam suatu organisasi, guna menelaah atau mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan untuk memberikan saran-saran kepada manajemen melalui proses evaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah membantu semua tingkatan manajemen, agar tanggungjawabnya dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam hal ini audit intern harus memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya kecurangan, kesalahan, manipulasi, inefisiensi, pemborosan, ketidak-efektifan dan benturan kepentingan. Audit intern juga harus hati-hati terhadap kondisi dan kegiatan yang memungkinkan terjadinya ketidaktaatan. Sedangkan menurut menurut Theodorus M. Tuanakota (2009:35-36) BPPJ berperan dalam penatalayanan perbendaharaan gereja melalui empat peran pengawas mulai dari yang bersahabat sampai yang berpotensi koprontatif. Ada peran pengawas yang bersifat mencegah terjadinya kecurangan dalam perbendaharaan gereja dan ada peran pengawas yang merupakan tindakan sesudah kecurangan terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan nara sumber, pembicaraan informal dan rapat-rapat yang diikuti oleh BPPJ serta pengamatan atas pelaksanaan fungsi BPPJ, dapat dikatakan bahwa BPPJ GMIM Jemaat Kristus Manado belum bisa berperan banyak dalam menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris gereja.

Hal tersebut terjadi karena banyak hal yang menghambat pelaksanaan fungsi dari BPPJ, yang penulis simpulkan menjadi dua hal pokok yaitu:

1. Hambatan dari luar BPPJ :
 - a. Adanya keenganan dari pengelola/pengurus untuk bertanya/menyampaikan informasi yang perlu dicarikan jalan keluar dan diperiksa.
 - b. Model pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris banyak yang belum sesuai dengan praktek yang lazim.
 - c. Belum adanya standard operasional prosedur untuk penatalayanan perbendaharaan gereja (keuangan dan inventaris gereja).
 - d. Keterbatasan pemahaman dari pengelola/pengurus mengenai penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris milik gereja.
2. Hambatan dari dalam BPPJ :
 - a. Keterbatasan pemahaman dan pengalaman anggota BPPJ mengenai penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris milik gereja serta auditing/pengawasan, untuk periode-periode sebelumnya.
 - b. Keterbatasan waktu atau pemberian diri dari anggota BPPJ, walaupun sudah diteguhkan.

- c. Tidak adanya jadwal dan program (termasuk) prosedur pemeriksaan yang baik.
- d. Tidak adanya perencanaan pelaksanaan fungsi BPPJ.
- e. Kurangnya komunikasi antara sesama anggota BPPJ.
- f. Sikap arogan dari anggota BPPJ yang kurang santun saat berkomunikasi dengan obyek pemeriksaan.

Akibat hambatan-hambatan (pergumulan-pergumulan) tersebut di atas, menyebabkan pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado belum berjalan sebagaimana mestinya audit intern yang efektif walaupun sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan dan aset tetap/inventaris milik gereja yang masih belum tercipta dengan baik jika dikaitkan dengan praktek penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang lazim.

Kendala/hambatan-hambatan tersebut sangat jelas berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi dari audit intern yang efektif. Hal ini bisa terlihat dari apa yang digambarkan oleh Sukrisno Agoes (2008:226) bahwa untuk memiliki departemen audit internal yang efektif haruslah seperti dibawah ini:

1. *Internal audit department* harus independen.
2. *Internal audit department* harus mempunyai *Job Description*.
3. *Internal audit department* harus mempunyai *internal audit manual*.
4. Harus ada dukungan yang kuat dari *top management* kepada *internal audit department*.
5. *Internal audit department* harus memiliki orang-orang yang profesional, capable, bisa bersikap objective dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. *Internal auditor* harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik.

Hal ini sejalan dengan apa yang diuraikan oleh Theodorus M. Tuanakota (2009:5-54) yang membagi kualifikasi auditor internal dalam gereja menjadi dua yaitu kualifikasi alkitabiah dan kualifikasi teknis.

Theodorus M. Tuanakota (2009:57-70) menyatakan bahwa BPPJ harus memiliki program kerja, laporan pelaksanaan fungsi atau pelayanannya dan BPPJ harus kompak, dan santun. Dalam pelaksanaan fungsinya BPPJ tidak memiliki program kerja yang jelas dan terencana, saat melakukan fungsinya tidak direncanakan dengan baik sehingga saat pekerjaan lapangan anggota BPPJ bingung harus mulai dari mana dan sering tumpang tindih saat melakukan pengawasan, setelah fungsinya selesai dijalankan tidak ada laporan tertulis sebagai dokumen hasil pelaksanaannya. Hal yang menarik adalah pelaporan hasil pelaksanaan fungsi BPPJ secara lisan disampaikan kepada obyek pengawasan pada saat pelaksanaan fungsi berlangsung dan setelah itu jika ada temuan-temuan yang membutuhkan pembinaan dan pengembalaan akan disampaikan kepada BPMJ dan selanjutnya ke gembala sidang untuk diselesaikan, dengan alasan bahwa permasalahan di gereja harus diselesaikan oleh gereja sendiri dan tidak perlu terdengar dan didengar sampai keluar gereja, sehingga laporan hasil pengawasan yang tertulis bisa menjadi hal yang berpotensi mengancam keutuhan jemaat sebagai suatu gereja Tuhan dan menjadikan orang yang melakukan kesalahan tidak bisa diterima seperti biasa lagi dalam lingkungan jemaatnya, karena orang akan cenderung mengigit-ingat kejadian tersebut kalau ada laporan tertulis.

Dari penelitian ini penulis dapat mengatakan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan fungsi audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, bukanlah semata-mata terciptanya penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang sesuai dengan penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, praktek yang lazim, dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan pada pemulihan kerugian perbendaharaan gereja, akan tetapi pada keutuhan jemaat dan pertobatan orang yang melakukan kejahatan yang prosesnya melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia yang empunya perbendaharaan. Jadi disini peran gembala sidang sangat penting berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dari BPPJ. Sehingga menurut penulis kecakapan profesional dan latar belakang pendidikan yang dimiliki bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi anggota BPPJ akan tetapi komitmen dan penyerahan diri pada tugas panggilan pelayanan, serta sudah lahir baru adalah kriteria utama untuk menjadi anggota BPPJ, dan setelah menjadi anggota BPPJ mau untuk belajar atau mengembangkan diri, bersikap santun dan penuh kasih sebagai saudara dan rekan sekerja yang saling menegur dan mengingatkan.

Hal lain yang mengemuka ketika penelitian ini dilakukan adalah pernyataan dari sebagian besar majelis bahwa kami bukanlah manajer, pegawai atau pengelola yang digaji jadi kami jangan dikejar-kejar,

kami tetap bertanggung jawab pada jemaat untuk urusan uang terlebih lagi kepada Tuhan, karena yang punya uang adalah Tuhan hanya saja melalui jemaat, dan kami murni melayani jemaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena ini adalah ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kasihnya yang besar bagi kami dan dengan demikian kami selalu akan menjaga integritas kristiani kami. Hal ini sejalan dengan *grand theory* yang ada yaitu *stewardship theory*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya audit intern yang efektif, akibat adanya pergumulan/hambatan dari luar dan dari dalam BPPJ. Hambatan pemberian diri dalam hal ini penyediaan waktulah yang sebenarnya paling menghambat dan menjadi pergumulan dari anggota BPPJ selama ini, mengakibatkan belum maksimalnya pelaksanaan fungsi BPPJ.
2. Tujuan utama dari pelaksanaan fungsi BPPJ sebagai audit intern di GMIM Jemaat Kristus Manado, bukanlah semata-mata terciptanya penatalayanan perbendaharaan dan aset tetap/inventaris yang sesuai dengan penatalayanan GMIM Jemaat Kristus Manado, praktek yang lazim, dan ketentuan perundangan yang berlaku, dan pada pemulihan kerugian perbendaharaan gereja, akan tetapi pada keutuhan jemaat dan pertobatan orang yang melakukan kejahatan yang prosesnya melalui penyerahan diri sepenuhnya kepada Dia yang empunya perbendaharaan. Sehingga peran gembala sidang sangat penting. Kecakapan profesional dan latar belakang pendidikan yang dimiliki bukanlah sesuatu yang sangat penting untuk menjadi anggota BPPJ akan tetapi komitmen dan penyerahan diri pada tugas panggilan pelayanan, serta sudah lahir baru adalah kriteria utama untuk menjadi anggota BPPJ, dan setelah menjadi anggota BPPJ mau untuk belajar atau mengembangkan diri, bersikap santun dan penuh kasih sebagai saudara dan rekan sekerja yang saling menegur dan mengigitkan.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian adalah:

1. Pemberian diri (waktu) sebagai jawaban atas panggilan pelayanan ke pada Tuhan dari anggota BPPJ perlu dibangkitkan lagi, lewat pengembalaan anggota BPPJ. Pengembangan kemahiran profesional perlu dilakukan oleh anggota BPPJ lewat pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi yang ada, sehingga pelaksanaan fungsi dari BPPJ mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut temuan dapat berjalan baik tanpa melupakan akan prinsip kasih dan keutuhan jemaat.
2. Dukungan dari semua pihak yang terkait dengan pelayanan di gereja sangat diperlukan demi lancarnya pelaksanaan fungsi dari BPPJ sebagai audit intern GMIM Jemaat Kristus Manado.
3. Perlu dibuatkan SOP tentang akuntansi dan penatalayanan perbendaharaan (termasuk aset tetap/inventaris milik gereja) yang lebih spesifik dan teknis, untuk membantu pengelola dalam menjalankan kegiatannya terutama bagi pegawai yang berhubungan dengan perbendaharaan. Perlu juga diadakan pelatihan-pelatihan sehubungan dengan akuntansi dan pengelolaan perbendaharaan bagi gereja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardeno Kurniawan, Audit Internal Nilai Tambah Bagi Organisasi. Yogyakarta, Penerbit: BPFE-UGM, 2012.
- Arens, Alvin A, dan James K. Loebbecke, Auditing Pendekatan Terpadu. Terjemahan Amir Abadi Yusuf. Buku dua, Jakarta. Salemba Empat. 2008.
- BPPS GMIM, (2005), Pedoman Pemeriksaan dan Norma Pemeriksaan BPPS SINODE GMIM.
- Chenly Ribka S. Pontoh, (2013), Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 pada Gereja BZL. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3. (129-139). ISSN 2302-1174.

- Dahnil Anzar dan Muhtar, (2010), Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (sebuah studi kasus). Jurnal Publikasi. FE Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, [email:dahnilanzar@yahoo.com](mailto:dahnilanzar@yahoo.com).
- Fransiskus Randa, (2011), Akuntabilitas Keuangan Dalam Organisasi Keagamaan (Studi Etnografi pada Sebuah Gereja Katolik di Tanah Toraja). Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi. Vol.9, No. 2, Oktober 2011, (59-83).
- GMIM Jemaat Kristus Manado, (2013), Buku Penatalayanan, Perubahan Keempat.
- Hery, Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini!. Jakarta, Penerbit: PT. Gramedia, 2013.
- Hiro Tugiman. Standar Profesional Audit Internal, Yogyakarta. Kanisius.2006.
- Ian Raynald Perkasa, (2009), Implementasi Akuntansi Pada Organisasi Keagamaan (Studi Kasus Pada Gereja Kristen Indonesia Pondok Tjandra Indah Sidoarjo). Skripsi, FE Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK 45 Revisi 2010 Jakarta;Penerbit DSAK IAI, 2010.
- Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar Profesional Akuntan Publik Jakarta;Penerbit Salemba Empat, 2009.
- Jensen, M, and W. Meckling, (1976), “*Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Struktire.*” *Journal Of Financial Economics*, (3): 305-360.
- Merystika Kabuhang, (2013) , Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Nirlaba Keagamaan. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3, Juni 2013. (339-348). ISSN 2302-1174.
- Paul David Elia Saerang, (2003), *Accountability and Accounting In A Religious Organisation: An Intepretive Ethnographic Study Of The Pentacostal Church Of Indonesia*. University of Wollongong, *Research on Line*.
- Sukrisno Agoes, Auditing, buku I dan II, Pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik, edisi ketiga (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2008).
- Sujoko Efferin, Stevanus Hadi Darmadji, Yuliawati Tan, Metode Penelitian Akuntansi. Mengungkapkan fenomena dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Yogyakarta. Graha Ilmu. (2008).
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D, Bandung. Alfabeta. (2008).
- Syahrul, Muhamad Afdi Nizar, (2000), Kamus Istilah Akuntansi, Edisi ke satu, Jakarta. Citra Harta Prima.
- Theodorus M. Tuanakota, (2009), Wacana Pengawasan Perbendahaharaan Gereja. GPIB Jakarta.
- Theodorus M. Tuanakota, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Jakarta, Penerbit: Lembaga Penerbit FE UI, 2007.

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PADA BANK NASIONAL, BANK CAMPURAN, DAN BANK ASING YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Christania Graciella Angel
(e-mail : gangel_140890@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Bank performance appraisal is based on bank financial report itself. The financial report can be form balance report which give information about the financial position to the outside of bank that can be used of eksternal to assess the level of risk exist in a bank. Based on ownership consist of national bank, mixture bank and foreign bank. These banks has tight compete to show a good performance to the public. This research aimed to analyze the financial performance difference of national bank and foreign bank at the period of 2004 to 2013 with the proxy finance ratio (CAMEL ratio) consist of: Capital, Asset Quality, Management, Earnings, and Liquidity. The population in this research consist of national bank, mixture bank, and foreign bank listed on the Indonesia Stock Exchange at the period of 2004 to 2013 which amount 42 banks. Based on purposive sampling techniques, the number of samples that meet the criteria are as many as 15 banks (5 national banks, 5 mixture banks, and 5 foreign banks). Analysis technique that use in this research is t-test. As the result the usage of proxy CAMEL ratio to analyze comparison bank performance give evidence that mixture bank performance is better than foreign bank and national bank performance.

Keywords : *financial performance, national bank, foreign bank, CAMEL ratio.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk dewasa ini, seperti yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, telah mengakibatkan persaingan antar perusahaan semakin ketat, khususnya bagi perusahaan yang memproduksi barang sejenis. Akibat positif dari persaingan ini adalah munculnya dorongan agar perusahaan meningkatkan daya saingnya, seperti dalam hal kualitas produk, kualitas pelayanan, efisiensi dan sebagainya. Salah satu bidang usaha yang menunjukkan persaingan yang ketat adalah bisnis perbankan.

Dampak krisis moneter yang terjadi mulai tahun 1997 terhadap industri perbankan di Indonesia adalah terjadinya *negative-spread* yaitu semakin besar perbedaan negatif antara *sources* dan *uses of fund* dan banyaknya debitur yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya karena tingginya *loan interest rate*, mengakibatkan menurunnya kinerja perbankan di Indonesia. Sehingga banyak Bank Umum Swasta Nasional yang terkena penalti dari yang berbentuk *take over* sampai likuidasi (beku operasi) (Soendoro,2001). Penurunan kinerja bank-bank tersebut harus segera diperbaiki karena jika penurunan kinerja tersebut terus berlanjut tentunya akan membuat kredibilitas perbankan di mata masyarakat akan semakin menurun dan bagi bank-bank yang mengalami penurunan kinerja secara tajam tentu tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Penilaian terhadap kinerja bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis laporan keuangannya.

Ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank perlu diatur, sehubungan dengan hal tersebut penilaian mencakup faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari: Permodalan (*Capital*), Kualitas Aset (*Asset Quality*), Manajemen (*Management*), Rentabilitas (*Earnings*), Likuiditas (*Liquidity*). Masalah yang timbul dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank nasional dan bank asing yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank nasional dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank asing dan campuran yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara bank nasional dan bank asing yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013.
2. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara bank nasional dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013.
3. Untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan antara bank campuran dan bank asing yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Good corporate governance (GCG) merupakan praktik terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme, dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Praktik terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses, dan prinsip yang dimiliki. Perusahaan dengan praktik *Corporate Governance* yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham karena visi, misi dan strategi perusahaan dinyatakan dengan jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (Solomon, 2003).

Terdapat lima prinsip *corporate governance* yang melandasi beberapa riset tentang pengukuran tingkat penerapan *corporate governance* pada perusahaan. Kelima prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

1. Menjamin kerangka dasar *Corporate Governance* yang efektif.
2. Hak-hak Pemegang Saham dan Fungsi-fungsi Penting Kepemilikan Saham.
3. Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham.
4. Peranan *Stakeholders* dalam *Corporate Governanace*.
5. Keterbukaan dan Transparansi.

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Oleh karena itu bank mempunyai ruang lingkup usaha yang luas. Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan : (1) Pasal 1, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.; (2) Pasal 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak; (3) Pasal 3, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; (4) Pasal 4, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank asing adalah bank umum yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha asing. Bank asing hanya dapat didirikan dan menjalankan usahanya sebagai bank setelah mendapat ijin usaha dari menteri keuangan. Bank ini didirikan dalam bentuk cabang dari bank yang sudah ada di luar negeri atau suatu bank asing dan bank nasional di Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan berbentuk Perseroan Terbatas.

Bank nasional terdiri dari bank-bank milik negara yang terdiri dari bank sentral dan bank umum milik negara, bank-bank milik pemerintah daerah yaitu bank-bank pembangunan daerah yang terdapat pada setiap Daerah Tingkat I, dan bank-bank milik swasta nasional yaitu bank-bank seluruh sahamnya dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan-badan hukum yang peserta dan pemimpinnya terdiri atas warga negara Indonesia Suyatno (2007).

Analisis Rasio Finansial (*Financial Statements Analysis*) adalah alat-alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Analisa rasio memperhatikan kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial pada masa yang lalu, sekarang dan memproyeksikan hasil yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan *financial statement* yang telah

tersedia yang terdiri dari : a) *Balance sheet* atau neraca, yang menunjukkan posisi perusahaan pada suatu saat. b) *Income statement* atau rugi laba yang merupakan laporan operasi perusahaan selama periode tertentu. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi finansial perusahaan saat ini, diperlukan suatu cara evaluasi diantaranya; analisis historis (*historical analysis*) yang merupakan perkembangan antara suatu rasio saat sekarang dengan rasio yang sama pada waktu yang lampau, dan rasio industri yang merupakan rata-rata rasio yang dihasilkan dari beberapa perusahaan yang sejenis yang dapat dijadikan pembandingan bagi perusahaan yang bersangkutan.

Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup faktor-faktor CAMEL yang terdiri dari:

1. Permodalan (*Capital Adequacy Ratio / CAR*)

CAR merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kemungkinan resiko kerugian yang diakibatkan kegiatan operasional bank. Penilaian aspek ini lebih dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana atau berapa modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhannya. Apabila CAR perusahaan perbankan cukup tinggi, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tersebut memiliki kecukupan modal, sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Apabila perusahaan perbankan telah *go public*, peningkatan kepercayaan itu tercermin melalui kenaikan harga sahamnya. Peningkatan harga saham akan meningkatkan nilai perusahaan dan *return* saham. Berdasarkan hal ini tampak hubungan yang signifikan antara CAR dengan resiko investasi pada saham perbankan. Perhitungan penyediaan modal minimum (CAR) didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman dana bank yang mengandung resiko harus disediakan jumlah modal sebesar presentase tertentu dari jumlah penanamannya.

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Aktiva produktif merupakan sumber pendapatan utama dari kegiatan perusahaan perbankan. Yang termasuk komponen aktiva produktif di sini adalah kredit yang diberikan, penanaman modal dalam surat berharga, penanaman modal ke bank lain dan penyertaan. Pendapatan bank diharapkan semakin besar dari penanaman dalam aktiva produktif, sehingga kesempatan untuk memperoleh laba semakin meningkat. Perolehan laba akan memberikan penilaian positif bagi investor yang menanamkan modalnya pada saham perbankan. Dana yang berhasil dihimpun oleh bank akan menjadi beban bila dibiarkan saja. Oleh sebab itu bank harus mengalokasikan dananya dalam bentuk aktiva produktif. Penanaman dana bank pada aktiva produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pengurus bank harus menjaga kualitas aktiva produktifnya agar selalu dalam keadaan baik. Penilaian kualitas aktiva produktif diukur dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan (NPL)*, dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap aktiva produktif yang dimiliki bank.

Aspek ini diukur dengan menggunakan *Non Performing Loan (NPL)*. Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Bank dalam memberikan kredit harus melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajibannya. Setelah kredit diberikan, bank wajib melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban. Bank melakukan peninjauan, penilaian, dan peningkatan terhadap agunan untuk memperkecil resiko kredit. NPL mencerminkan resiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Dengan demikian, apabila kondisi NPL suatu bank tinggi maka akan memperbesar biaya baik biaya pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

3. Manajemen (*Management*)

Penilaian kualitas manajemen suatu bank dapat dilakukan dengan menghitung rasio-rasio efisiensi usaha. Melalui rasio-rasio efisiensi usaha, tingkat efisiensi yang telah dicapai oleh manajemen bank yang bersangkutan dapat diukur secara kuantitatif. Manajemen yang dimaksud disini menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk mencapai target. Manajemen suatu bank diwajibkan mengelola banknya dengan baik sesuai dengan peraturan di bidang perbankan yang berlaku agar bank tersebut sehat.

Aspek ini diukur dengan menggunakan *Net Interst Margin* (NIM). Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. Semakin besar rasio ini maka meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

4. Rentabilitas (*Earnings*)

Earning merupakan kemampuan perusahaan perbankan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila rasio rentabilitas ini tinggi, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perbankan tersebut mampu meningkatkan usahanya melalui pencapaian laba operasi dalam periode tersebut. Perhitungan rentabilitas penting mengingat hanya bank yang memperoleh laba yang cukup yang dapat mengembangkan dirinya. Rentabilitas digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen menghasilkan laba melalui penanaman pada seluruh aktiva yang ada serta mengukur kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasionalnya.

Aspek ini diukur dengan menggunakan *Return On Assets* (ROA). Analisis ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Total aset yang lazim digunakan untuk mengukur ROA sebuah bank adalah jumlah dari aset-aset produktif yang terdiri dari penempatan surat-surat berharga, penempatan dalam bentuk kredit. Semakin tinggi ROA akan semakin baik, karena untuk memperoleh ROA yang besar diperlukan adanya aktiva produktif yang berkualitas dan manajemen yang solid. Selain itu, semakin tinggi ROA, semakin besar pula kemampuan tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

5. Likuiditas (*Liquidity*)

Likuiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa *call money* yang harus dipenuhi pada saat adanya kliring, di mana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Semakin besar aktiva lancar perusahaan perbankan maka semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya.

Aspek ini diukur dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini digunakan untuk menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik tingkat kesehatan bank. Ketentuan Bank Indonesia, bahwa kategori sehat dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Tingkat Kesehatan Bank Menurut CAMEL

| Nilai Kredit CAMEL | Peringkat |
|--------------------|--------------|
| 81-100% | Sehat |
| 66-81% | Cukup Sehat |
| 51-66% | Kurang Sehat |
| 0-51% | Tidak Sehat |

Sumber: Kasmir, 2012

Faktor-faktor proksi rasio keuangan sesuai dengan bobotnya masing-masing dan dikuantitatifkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Berbagai ketentuan tersebut meliputi pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK), pelaksanaan pemberian kredit ekspor, pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan pelanggaran terhadap Posisi Devisa Netto (PDN). Berdasarkan penilaian-penilaian tersebut akhirnya ditetapkan apakah bank tersebut termasuk dalam kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat ataupun tidak

sehat. Predikat tingkat kesehatan bank yang sehat atau cukup sehat atau kurang sehat akan diturunkan menjadi tidak sehat apabila terdapat :

1. Perselisihan intern yang diperkirakan akan menimbulkan kesulitan dalam bank yang bersangkutan.
2. Campur tangan pihak-pihak di luar bank dalam kepengurusan (manajemen) bank, termasuk di dalamnya kerjasama yang tidak wajar yang mengakibatkan salah satu atau beberapa kantornya berdiri sendiri.
3. *Window dressing* dalam pembukuan dan atau laporan bank secara materiil dapat berpengaruh terhadap keuangan bank sehingga mengakibatkan penilaian yang keliru terhadap bank, praktek bank dalam bank atau melakukan usaha bank di luar pembukuan bank.
4. Kesulitan keuangan yang mengakibatkan penghentian sementara atau pengunduran diri dari keikutsertaan dalam kliring.

Penelitian Terdahulu

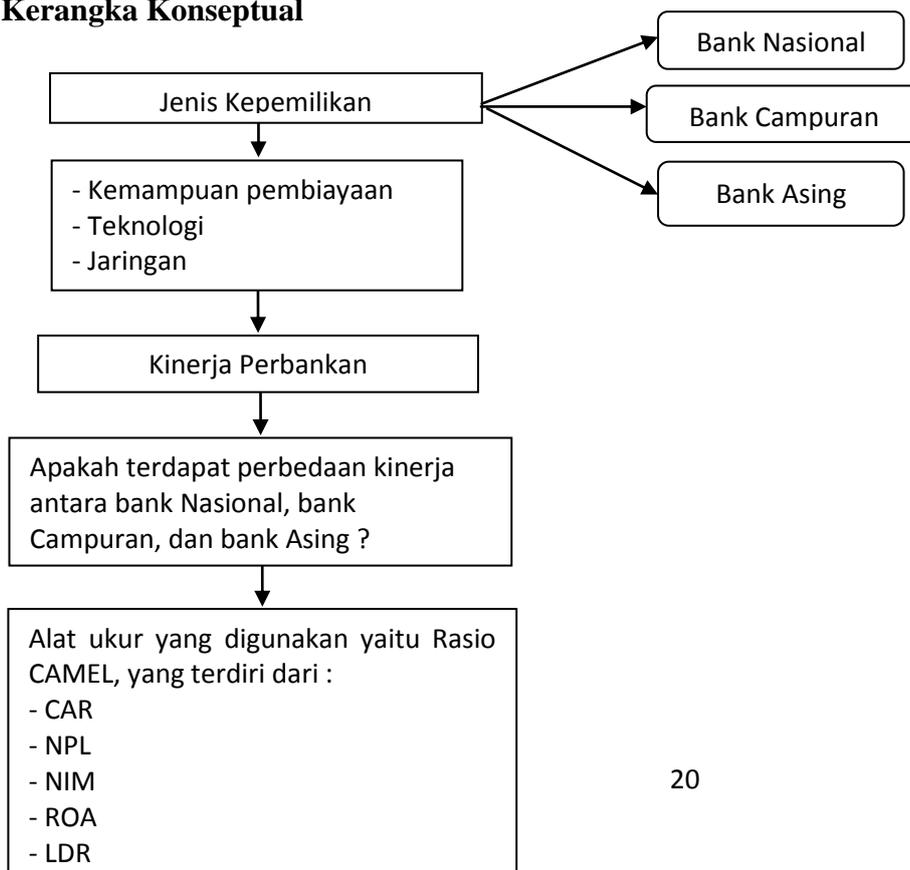
Penelitian Clorinda (2013), yang berjudul Analisis Pengaruh *Capital Ratio, Asset Quality*, dan *Liquidity Ratio* terhadap kinerja keuangan pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2007-2011, dengan menggunakan metode *least square* terlihat bahwa DPK berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. CAR dan PPAP terbukti berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian Rumondor (2013), yang berjudul Perbandingan kinerja keuangan bank Mandiri, BRI, dan BNI yang terdaftar di BEI, dengan menggunakan uji t dan uji F diperoleh ketiga bank tersebut berada pada prseidkat cukup sehat dengan peringkat komposit berada pada PK-3.

Penelitian Hutagalung,Djumahir,Ratnawati (2011) yang berjudul Analisis rasio keuangan terhadap kinerja bank umum di Indonesia, dengan metode analisis regresi berganda diperoleh hasil NPL,NIM,BOPO berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang diproksikan dengan ROA sedangkan CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja yang diproksikan ROA.

Penelitian Utomo (2008) yang berjudul Pengaruh NPL terhadap kinerja keuangan berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada Bank Mandiri dengan menggunakan analisis korelasi dan regresi berganda diperoleh hasil: ada 5 variabel yang dipengaruhi NPL: *Primary ratio, Capital ratio, CAR, NPM*, dan *Return on equity capital*, sedangkan ada 7 variabel yang tidak dipengaruhi NPL: *Quick ratio, Asset to loan ratio, Cash ratio, LDR, Rate return on loan, Interest margin on earning assets*, dan *Interest margin on loans*.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menyajikan tentang analisis perbandingan kinerja pada bank nasional, bank campuran, dan bank asing yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2004-2013. Untuk menguji apakah masing-masing proksi rasio keuangan berbeda signifikan untuk periode tahun 2004–2013, maka dirumuskan beberapa hipotesis berikut ini.

H₁ : Terdapat perbedaan kinerja antara bank nasional dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode 2004-2013.

H₂ : Terdapat perbedaan kinerja antara bank nasional dan bank asing yang terdaftar di BEI periode 2004-2013.

H₂ : Terdapat perbedaan kinerja antara bank asing dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode 2004-2013.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory* (penelitian penjelasan) yakni penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang dirumuskan sebelumnya.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bank (bank nasional dan bank asing) yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) tahun 2004-2013, yang berjumlah 42 bank. Sampel bank dipilih secara *purposive sampling* dengan pemilihan kriteria : merupakan perusahaan perbankan yang menerbitkan laporan keuangan sepuluh tahun berturut-turut dari tahun 2004-2013, dan laporan keuangan yang diterbitkan mempunyai tahun buku yang berakhir 31 Desember agar menghindari adanya pengaruh waktu parsial dalam perhitungan rasio keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut maka jumlah sampel yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 15 bank, dengan perincian : 5 bank nasional, 5 bank campuran, dan 5 bank asing.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode uji beda rata-rata (*t-test*). Uji t merupakan jenis pengujian statistik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistik. Syarat untuk melakukan uji-t antara lain : (1) Nilai parameter diketahui/ditentukan; (2) Distribusi normal. Uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah *independent-sample t test*. *Independent-sample t test* digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Tes ini digunakan untuk menguji pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan alat analisis metode CAMEL, yang terdiri atas:

1) *Capital Adequacy Ratio* / Permodalan

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengantisipasi kebutuhan akan tersedianya dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul resiko kerugian yang timbul dalam menjalankan usahanya yang diproksikan oleh CAR dan diperoleh dengan rumus :

$$CAR = \frac{\text{Modal bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

2) *Asset Quality* / Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas Aktiva Produktif diproksikan dengan NPL. Rasio NPL menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. NPL mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPL, maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. NPL diperoleh dengan rumus :

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

3) *Management / Manajemen*

Aspek manajemen diproksikan dengan *Net Interest Margin* (NIM). Rasio NIM digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Pendapatan bunga bersih diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi beban bunga. *Net Interest Margin* (NIM) dihitung dengan rumus:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

4) *Earning / Rentabilitas*

Aspek *Earning* diproksikan dengan ROA (*Retun On Assets*). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Semakin tinggi ROA, semakin besar pula kemampuan tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

$$\text{ROA} = \frac{\text{earning before taxes}}{\text{Total assets}} \times 100\%$$

5) *Liquidity / Likuiditas*

Likuiditas diproksikan dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembayaran kembali deposito yang telah jatuh tempo kepada deposannya serta dapat memenuhi permohonan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan.

$$\text{LDR} = \frac{\text{kredit yang diberikan}}{\text{dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Uji Beda antara Bank Nasional dan Bank Asing

Group Statistics

| | DUMMY | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|-----|-------|----|---------|----------------|-----------------|
| CAR | Umum | 55 | 16.2909 | 3.14273 | .42377 |
| | Asing | 50 | 29.2400 | 34.74664 | 4.91392 |
| NPL | Umum | 55 | 2.1636 | 2.37864 | .32074 |
| | Asing | 50 | 1.5600 | 1.12776 | .15949 |
| NIM | Umum | 55 | 6.2727 | 2.15557 | .29066 |
| | Asing | 50 | 4.7400 | 2.03851 | .28829 |
| ROA | Umum | 55 | 2.6727 | 1.29178 | .17418 |
| | Asing | 50 | 2.9000 | 1.31320 | .18571 |
| LDR | Umum | 55 | 70.7636 | 17.70119 | 2.38683 |
| | Asing | 50 | 75.6600 | 28.09504 | 3.97324 |

Uraian setiap variabel adalah sebagai berikut.

1. Nilai rata-rata CAR untuk Bank Umum (Nasional) adalah 16.29 sedangkan Bank Asing memiliki nilai rata-rata sebesar 29.24. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank asing menanggung resiko kerugian yang timbul lebih baik dari bank umum (nasional).
2. Nilai rata-rata NPL untuk Bank Umum (Nasional) adalah 2.16 sedangkan Bank Asing memiliki nilai rata-rata sebesar 1.56. Nilai NPL bank asing yang lebih rendah dari bank umum (nasional) menunjukkan semakin baiknya kemampuan bank asing dalam meminimalkan jumlah kredit bermasalah.
3. Nilai rata-rata NIM untuk Bank Umum (Nasional) adalah 6.27 sedangkan Bank Asing memiliki nilai rata-rata sebesar 4.74. Nilai NIM bank umum (nasional) yang lebih tinggi dari bank asing mencerminkan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif.
4. Nilai rata-rata ROA untuk Bank Umum (Nasional) adalah 2.67 sedangkan Bank Asing memiliki nilai rata-rata sebesar 2.90. Nilai rata-rata ROA bank asing yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan keuntungan yang dicapai, dan posisi bank yang semakin baik dari segi penggunaan aset.

5. Nilai rata-rata LDR untuk Bank Umum (Nasional) adalah 70.76 sedangkan Bank Asing memiliki nilai rata-rata sebesar 75.66. Nilai rata-rata LDR bank asing yang lebih tinggi menunjukkan rendahnya kemampuan likuiditas bank asing sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah yang semakin besar.

Uji Beda antara Bank Nasional dan Bank Campuran

Group Statistics

| | DUMMY | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|-----|----------|----|---------|----------------|-----------------|
| CAR | Umum | 55 | 16.2909 | 3.14273 | .42377 |
| | Campuran | 50 | 22.6400 | 16.75972 | 2.37018 |
| NPL | Umum | 55 | 2.1636 | 2.37864 | .32074 |
| | Campuran | 50 | 1.4400 | .73290 | .10365 |
| NIM | Umum | 55 | 6.2727 | 2.15557 | .29066 |
| | Campuran | 50 | 5.5000 | 3.05894 | .43260 |
| ROA | Umum | 55 | 2.6727 | 1.29178 | .17418 |
| | Campuran | 50 | 1.9800 | 2.50298 | .35397 |
| LDR | Umum | 55 | 70.7636 | 17.70119 | 2.38683 |
| | Campuran | 50 | 74.6600 | 28.29842 | 4.00200 |

Uraian setiap variabel adalah sebagai berikut.

1. Nilai rata-rata CAR untuk Bank Umum (Nasional) adalah 16.29 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 22.64. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank campuran menanggung resiko kerugian yang timbul lebih baik dari bank umum (nasional).
2. Nilai rata-rata NPL untuk Bank Umum (Nasional) adalah 2.16 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 1.44. Nilai NPL bank campuran yang lebih rendah dari bank umum (nasional) menunjukkan semakin baiknya kemampuan bank campuran dalam meminimalkan jumlah kredit bermasalah.
3. Nilai rata-rata NIM untuk Bank Umum (Nasional) adalah 6.27 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 5.50. Nilai NIM bank umum (nasional) yang lebih tinggi dari bank campuran mencerminkan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif.
4. Nilai rata-rata ROA untuk Bank Umum (Nasional) adalah 2.67 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 1.98. Nilai rata-rata ROA bank campuran yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan keuntungan yang dicapai, dan posisi bank yang semakin baik dari segi penggunaan aset.
5. Nilai rata-rata LDR untuk Bank Umum (Nasional) adalah 70.76 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 74.66. Nilai rata-rata LDR bank campuran yang lebih tinggi menunjukkan rendahnya kemampuan likuiditas bank campuran sehingga kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah yang semakin besar.

Uji Beda antara Bank Asing dan Bank Campuran

Group Statistics

| | DUMMY | N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean |
|-----|----------|----|---------|----------------|-----------------|
| CAR | Asing | 50 | 29.2400 | 34.74664 | 4.91392 |
| | Campuran | 50 | 22.6400 | 16.75972 | 2.37018 |
| NPL | Asing | 50 | 1.5600 | 1.12776 | .15949 |
| | Campuran | 50 | 1.4400 | .73290 | .10365 |
| NIM | Asing | 50 | 4.7400 | 2.03851 | .28829 |
| | Campuran | 50 | 5.5000 | 3.05894 | .43260 |
| ROA | Asing | 50 | 2.9000 | 1.31320 | .18571 |
| | Campuran | 50 | 1.9800 | 2.50298 | .35397 |
| LDR | Asing | 50 | 75.6600 | 28.09504 | 3.97324 |
| | Campuran | 50 | 74.6600 | 28.29842 | 4.00200 |

Uraian setiap variabel adalah sebagai berikut.

1. Nilai rata-rata CAR untuk Bank Asing adalah 29.24 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 22.64. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bank asing menanggung resiko kerugian yang timbul lebih baik dari bank campuran.
2. Nilai rata-rata NPL untuk Bank Asing adalah 1.56 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 1.44. Nilai NPL bank campuran yang lebih rendah dari bank asing menunjukkan semakin baiknya kemampuan bank campuran dalam meminimalkan jumlah kredit bermasalah.
3. Nilai rata-rata NIM untuk Bank Asing adalah 4.74 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 5.50. Nilai NIM bank campuran yang lebih tinggi dari bank campuran mencerminkan meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif.
4. Nilai rata-rata ROA untuk Bank Asing adalah 2.90 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 1.98. Nilai rata-rata ROA bank asing yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan keuntungan yang dicapai, dan posisi bank yang semakin baik dari segi penggunaan aset.
5. Nilai rata-rata LDR untuk Bank Asing adalah 75.66 sedangkan Bank Campuran memiliki nilai rata-rata sebesar 74.66. Nilai rata-rata LDR bank asing yang lebih tinggi dari bank campuran menunjukkan kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah yang semakin besar.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis 1.

Hipotesis 1 (H_1) menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank umum (nasional) dan bank asing yang terdaftar di BEI periode 2004-2013. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji beda rata-rata, maka hasil pengujian untuk perbandingan kinerja pada bank asing dengan bank umum (nasional) dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Uji Beda Rata-rata Bank Umum (Nasional) dan Bank Asing

Independent Samples Test

| | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | | | | | |
|-----|-----------------------------------------|------|------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | | | | | Lower | Upper |
| CAR | 13.860 | .000 | -2.753 | 103 | .007 | -12.94909 | 4.70402 | -22.27841 | -3.61977 |
| | | | -2.625 | 49.729 | .011 | -12.94909 | 4.93216 | -22.85695 | -3.04123 |
| NPL | 2.992 | .087 | 1.635 | 103 | .105 | .60364 | .36927 | -.12872 | 1.33600 |
| | | | 1.685 | 78.704 | .096 | .60364 | .35820 | -.10939 | 1.31666 |
| NIM | .292 | .590 | 3.734 | 103 | .000 | 1.53273 | .41048 | .71864 | 2.34681 |
| | | | 3.744 | 102.832 | .000 | 1.53273 | .40938 | .72080 | 2.34465 |
| ROA | .001 | .976 | -.893 | 103 | .374 | -.22727 | .25442 | -.73185 | .27730 |
| | | | -.893 | 101.708 | .374 | -.22727 | .25462 | -.73232 | .27778 |
| LDR | 2.884 | .092 | -1.079 | 103 | .283 | -4.89636 | 4.53979 | -13.89997 | 4.10724 |
| | | | -1.056 | 81.156 | .294 | -4.89636 | 4.63504 | -14.11836 | 4.32564 |

Sumber : Data olahan (2014)

Nilai CAR bank umum (nasional) adalah 16.29 sedangkan nilai CAR bank asing adalah 29.24, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CAR bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 13.860 dengan signifikansi 0.000 yang menunjukkan bahwa variansi data tidak sama (*equal variances not assumed*), sehingga hasil perbedaan antara CAR bank umum (nasional) dan bank asing

adalah signifikan berbeda karena terdapat perbedaan yang cukup mencolok sebesar 12.95, namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 8\%$). Dengan demikian rasio CAR bank asing yang lebih tinggi dari bank nasional menunjukkan semakin baiknya kinerja dan kemampuan bank asing dalam menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Disamping itu, bank asing juga memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank tersebut.

Nilai NPL bank umum (nasional) adalah 2.16 sedangkan nilai NPL bank asing adalah 1.56, yang menunjukkan bahwa NPL bank asing masih lebih rendah. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 2.992 dengan signifikansi 0.087 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*). Hasil perbedaan antara NPL bank umum (nasional) dan bank asing adalah tidak signifikan berbeda, karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 . Dengan demikian rasio NPL bank asing yang lebih rendah dari bank nasional menunjukkan tingkat kemampuan bank asing yang semakin baik dalam mengelola jumlah kredit bermasalah, semakin tingginya standarisasi analisis dalam pemilihan calon debitur, dan pengawasan yang semakin baik dibandingkan dengan bank nasional, namun keduanya termasuk dalam kriteria yang tidak sehat (hasil rasio $\leq 6\%$).

Nilai NIM bank umum (nasional) adalah 6.27 sedangkan nilai NIM bank asing adalah 4.74, hal ini menunjukkan bahwa NIM bank asing masih lebih rendah. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0.292 dengan signifikansi 0.590 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga hasil perbedaan antara NIM bank umum (nasional) dan bank asing adalah signifikan berbeda, karena terdapat perbedaan sebesar 1.53 (tingkat signifikansi > 1), namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 1.5\%$). Rasio NIM bank nasional yang lebih tinggi dari bank asing menunjukkan semakin baiknya tingkat kemampuan bank nasional dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit yang disalurkan.

Nilai ROA bank umum (nasional) adalah 2.67 sedangkan nilai ROA bank asing adalah 2.90, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ROA bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0.001 dengan signifikansi 0.976 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara ROA bank umum (nasional) dan bank asing adalah tidak signifikan berbeda, karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 0.5\%$). Nilai ROA bank asing yang lebih tinggi menunjukkan kinerja bank yang semakin baik pula, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, disamping itu, menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.

Nilai LDR bank umum (nasional) adalah 70.76 sedangkan nilai LDR bank asing adalah 75.66, sehingga hal ini menunjukkan bahwa LDR bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 2.884 dengan signifikansi 0.092 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara LDR bank umum (nasional) dan bank asing adalah tidak signifikan berbeda karena masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio 50% - $\leq 100\%$). Rasio LDR bank asing yang lebih tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas yang berdampak pada kinerja bank asing. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar.

Pengujian Hipotesis 2.

Hipotesis 2 (H_2) menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank umum (nasional) dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji beda rata-rata, diketahui nilai perbandingan kinerja pada bank umum (nasional) dengan bank campuran. Nilai CAR bank umum (nasional) adalah 16.29 sedangkan nilai CAR bank campuran adalah 22.64, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CAR bank campuran masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 27.288 dengan signifikansi 0.000 yang memiliki bahwa variansi data tidak sama (*equal variances not assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara CAR bank umum (nasional) dan bank campuran adalah signifikan berbeda karena terdapat perbedaan yang cukup mencolok sebesar 6.35, namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 8\%$). Rasio CAR bank campuran yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya kemampuan bank campuran dalam menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Disamping itu, bank campuran juga

memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank tersebut.

Uji Beda Rata-rata Bank Umum (Nasional) dan Bank Campuran

| | | Independent Samples Test | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | | | | | |
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | | | | | Lower | Upper | |
| CAR | Equal variances assumed | 27.288 | .000 | -2.758 | 103 | .007 | -6.34909 | 2.30213 | -10.91483 | -1.78336 |
| | Equal variances not assumed | | | -2.637 | 52.134 | .011 | -6.34909 | 2.40777 | -11.18033 | -1.51785 |
| NPL | Equal variances assumed | 5.719 | .019 | 2.063 | 103 | .042 | .72364 | .35073 | .02804 | 1.41924 |
| | Equal variances not assumed | | | 2.147 | 65.085 | .036 | .72364 | .33707 | .05048 | 1.39679 |
| NIM | Equal variances assumed | 2.144 | .146 | 1.507 | 103 | .135 | .77273 | .51281 | -.24431 | 1.78977 |
| | Equal variances not assumed | | | 1.483 | 87.116 | .142 | .77273 | .52118 | -.26315 | 1.80860 |
| ROA | Equal variances assumed | .750 | .388 | 1.806 | 103 | .074 | .69273 | .38367 | -.06818 | 1.45364 |
| | Equal variances not assumed | | | 1.756 | 71.784 | .083 | .69273 | .39451 | -.09375 | 1.47921 |
| LDR | Equal variances assumed | 4.208 | .043 | -.854 | 103 | .395 | -3.89636 | 4.56268 | -12.94536 | 5.15263 |
| | Equal variances not assumed | | | -.836 | 80.784 | .406 | -3.89636 | 4.65972 | -13.16811 | 5.37539 |

Sumber : Data olahan (2014)

Nilai NPL bank umum (nasional) adalah 2.16 sedangkan nilai NPL bank campuran adalah 1.44, sehingga hal ini menunjukkan bahwa NPL bank campuran masih lebih rendah. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 5.719 dengan signifikansi 0.019 yang memiliki bahwa variansi data adalah tidak sama (*equal variances not assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara NPL bank umum (nasional) dan bank campuran adalah signifikan berbeda. Rasio NPL bank campuran yang lebih rendah menunjukkan tingkat kemampuan bank campuran yang semakin baik dalam mengelola jumlah kredit bermasalah, semakin tingginya standarisasi analisis dalam pemilihan calon debitur, dan pengawasan yang semakin baik dibandingkan dengan bank nasional namun keduanya termasuk dalam kriteria yang tidak sehat (hasil rasio $\leq 6\%$).

Nilai NIM bank umum (nasional) adalah 6.27 sedangkan nilai NIM bank campuran adalah 5.50, sehingga hal ini menunjukkan bahwa NIM bank campuran masih lebih rendah. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 2.144 dengan signifikansi 0.146 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara NIM bank umum (nasional) dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda, karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 1.5\%$). Rasio NIM bank nasional yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya tingkat kemampuan bank nasional dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit yang disalurkan.

Nilai ROA bank umum (nasional) adalah 2.67 sedangkan nilai ROA bank campuran adalah 1.98, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ROA bank campuran masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0.750 dengan signifikansi 0.388 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara ROA bank umum (nasional) dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda, karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 0.5\%$). Nilai ROA bank nasional yang lebih tinggi menunjukkan kinerja bank yang semakin baik pula, dibanding dengan bank campuran karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, disamping itu, menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.

Nilai LDR bank umum (nasional) adalah 70.76 sedangkan nilai LDR bank campuran adalah 74.66, sehingga hal ini menunjukkan bahwa LDR bank campuran masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 4.208 dengan signifikansi 0.043 yang memiliki bahwa variansi data adalah tidak sama (*equal variances not assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara LDR bank umum (nasional) dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda karena masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $50\% - \leq 100\%$). Rasio LDR bank campuran yang lebih tinggi memberikan indikasi

semakin rendahnya kemampuan likuiditasnya. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, karena *Loan To Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber.

Pengujian Hipotesis 3.

Hipotesis 3 (H_3) menyatakan terdapat perbedaan kinerja keuangan antara bank asing dan bank campuran yang terdaftar di BEI periode tahun 2004-2013. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji beda rata-rata, hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Uji Beda Rata-rata Bank Asing dan Bank Campuran

| | | Levene's Test for Equality of Variances | | t-test for Equality of Means | | | | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------|------|------------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------|
| | | F | Sig. | t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | Std. Error Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | |
| | | | | | | | | | Lower | Upper |
| CAR | Equal variances assumed | 1.845 | .178 | 1.210 | 98 | .229 | 6.60000 | 5.45567 | -4.22660 | 17.42660 |
| | Equal variances not assumed | | | 1.210 | 70.629 | .230 | 6.60000 | 5.45567 | -4.27929 | 17.47929 |
| NPL | Equal variances assumed | 1.564 | .214 | .631 | 98 | .530 | .12000 | .19021 | -.25746 | .49746 |
| | Equal variances not assumed | | | .631 | 84.124 | .530 | .12000 | .19021 | -.25824 | .49824 |
| NIM | Equal variances assumed | 3.279 | .073 | -1.462 | 98 | .147 | -.76000 | .51986 | -1.79164 | .27164 |
| | Equal variances not assumed | | | -1.462 | 85.352 | .147 | -.76000 | .51986 | -1.79356 | .27356 |
| ROA | Equal variances assumed | .660 | .419 | 2.302 | 98 | .023 | .92000 | .39973 | .12674 | 1.71326 |
| | Equal variances not assumed | | | 2.302 | 74.076 | .024 | .92000 | .39973 | .12352 | 1.71648 |
| LDR | Equal variances assumed | .055 | .814 | .177 | 98 | .860 | 1.00000 | 5.63938 | -10.19117 | 12.19117 |
| | Equal variances not assumed | | | .177 | 97.995 | .860 | 1.00000 | 5.63938 | -10.19118 | 12.19118 |

Sumber : Data olahan (2014)

Nilai CAR bank asing adalah 29.24 sedangkan nilai CAR bank campuran adalah 22.64, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CAR bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 1.845 dengan signifikansi 0.178 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara CAR bank asing dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda karena masih tergolong dalam range kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 8\%$) Rasio CAR bank asing yang lebih tinggi dari bank campuran menunjukkan semakin baiknya kemampuan bank asing dalam menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Disamping itu juga memiliki kemampuan lebih baik dalam membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas bank tersebut.

Nilai NPL bank asing adalah 1.56 sedangkan nilai NPL bank campuran adalah 1.44, sehingga hal ini menunjukkan bahwa NPL bank campuran masih lebih rendah. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 1.564 dengan signifikansi 0.214 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara NPL bank asing dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 . Rasio NPL bank campuran yang lebih rendah dari bank asing menunjukkan tingkat kemampuan bank campuran yang semakin baik dalam mengelola jumlah kredit bermasalah, semakin tingginya standarisasi analisis dalam pemilihan calon debitur, dan pengawasan yang semakin baik dibandingkan dengan bank asing, namun keduanya termasuk dalam kriteria yang tidak sehat (hasil rasio $\leq 6\%$).

Nilai NIM bank asing adalah 4.74 sedangkan nilai NIM bank campuran adalah 5.50, sehingga hal ini menunjukkan bahwa NIM bank campuran masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 3.279 dengan signifikansi 0.073 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara NIM bank asing dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda, karena perbedaan yang tidak signifikan ≤ 1 namun masih tergolong dalam kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 1.5\%$). Rasio NIM bank campuran yang lebih tinggi dari bank asing

menunjukkan semakin baiknya tingkat kemampuan bank campuran dalam menghasilkan pendapatan dari bunga dengan melihat kinerja bank dalam menyalurkan kredit. Mengingat pendapatan operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit yang disalurkan.

Nilai ROA bank asing adalah 2.90 sedangkan nilai ROA bank campuran adalah 1.98, sehingga hal ini menunjukkan bahwa ROA bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0.660 dengan signifikansi 0.419 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara ROA bank asing dan bank campuran adalah signifikan berbeda. karena masih tergolong dalam range kriteria yang sehat (hasil rasio $\geq 0.5\%$). Nilai ROA bank asing yang lebih tinggi menunjukkan kinerja bank yang semakin baik pula, dibanding dengan bank campuran karena tingkat pengembalian investasi semakin besar, disamping itu, menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi.

Nilai LDR bank asing adalah 75.66 sedangkan nilai LDR bank campuran adalah 74.66, sehingga hal ini menunjukkan bahwa LDR bank asing masih lebih tinggi. Uji Levene menunjukkan nilai F sebesar 0.055 dengan signifikansi 0.814 yang memiliki bahwa variansi data adalah sama (*equal variances assumed*), sehingga memiliki hasil perbedaan antara LDR bank asing dan bank campuran adalah tidak signifikan berbeda karena masih tergolong dalam rentang kriteria yang sehat (hasil rasio $50\% \leq 100\%$). Rasio LDR bank asing yang lebih tinggi memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditasnya. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, karena *Loan To Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Hasil rasio-rasio keuangan dari bank asing yang lebih baik dari bank nasional disebabkan oleh karena adanya hasil pengelolaan manajerial yang lebih baik dari segi permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas yang diprosikan dengan CAMEL.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Rumondor (2013) yang menyimpulkan bahwa rasio CAMEL mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Perbandingan rasio CAMEL antara bank nasional dan bank asing yang menunjukkan; dilihat rasio CAR, NPL, dan ROA bank asing lebih unggul dibandingkan bank nasional. Namun dilihat dari rasio NIM dan LDR bank nasional lebih unggul dari bank asing. Secara keseluruhan kinerja bank asing lebih unggul dibandingkan dengan kinerja bank nasional.
2. Perbandingan rasio CAMEL antara bank nasional dan bank campuran yang menunjukkan; dilihat rasio NIM, ROA, dan LDR bank nasional lebih unggul dibandingkan bank campuran. Namun dilihat dari rasio CAR dan NPL bank campuran lebih unggul dari bank nasional. Secara keseluruhan kinerja bank nasional lebih unggul dibandingkan dengan kinerja bank campuran.
3. Perbandingan rasio CAMEL antara bank asing dan bank campuran yang menunjukkan; dilihat rasio NPL, NIM, dan LDR bank campuran lebih unggul dibandingkan bank asing. Namun dilihat dari rasio CAR dan ROA bank asing lebih unggul dari bank campuran. Secara keseluruhan kinerja bank campuran lebih unggul dibandingkan dengan kinerja bank asing.

Berdasarkan penentuan tingkat kesehatan bank menurut CAMEL dan hasil pengujian perbandingan nilai rata-rata kinerja, bank campuran lebih unggul dibandingkan dengan kinerja bank asing, dan bank asing lebih unggul dibandingkan dengan kinerja bank nasional. Sehingga bank nasional memiliki kinerja yang terendah dibandingkan dengan kinerja bank campuran dan bank asing. Perbedaan signifikan antara kinerja bank nasional dan bank asing terletak pada rasio CAR dan NIM, bank nasional dan bank campuran terletak pada rasio NPL, bank asing dan bank campuran terletak pada rasio ROA.

Saran

Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa rasio-rasio CAMEL pada bank nasional masih belum terlalu baik dibandingkan dengan rasio-rasio yang dimiliki oleh bank asing dan bank campuran. Sehingga

disarankan kepada pihak manajemen bank nasional untuk lebih memperhatikan pengelolaan yang ada pada organisasinya dari segi permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas untuk memaksimalkan kinerjanya sehingga rasio ROA bisa lebih meningkat, karena ROA merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan yang dicapai, dan digunakan investor dalam pengambilan keputusan berinvestasi.

Lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berada di bidang yang sama, serta dapat dikembangkan lebih lanjut model penelitiannya agar dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam atas peningkatan kinerja manajerial khususnya yang berada di pihak Bank Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Alia. 2010. *Pengaruh CAR, NPL, NIM, BOPO, LDR, dan PPAP Terhadap Kinerja Rentabilitas Bank (Studi Kasus Pada Bank Devisa dan Bank Non Devisa Tahun 2004-2008)*. Skripsi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Bank Indonesia. *Laporan Keuangan Publikasi Bank*. www.bi.go.id diakses Mei 08 2014. Manado.
- Clorinda, Karunia. 2013. *Analisis Pengaruh Rasio Capital, Asset Quality, dan Liquidity Terhadap Kinerja Keuangan Pada Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2011*. Jurnal Ilmiah. Universitas Surabaya. Surabaya.
- Djiwandono, J, Soedrajad. 2002. *Masalah Burden Sharing Pembiayaan BLBI antara pemerintah dan BI*. File : //A:\Pacific Link-Kolom Pakar.
- Hutagalung., Djumahir., Ratnawati. 2011. *Analisa Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 11, No.1. Unviersitas Brawijaya. Malang.
- Handayani, Puspita. 2005. *Analisa Perbandingan Kinerja Bank dengan Rasio Keuangan*. Tesis Magister Manajemen. Universitas Diponegoro. Semarang.
- IDX. *Laporan Keuangan Publikasi*. www.idx.co.id diakses Mei 08 2014. Manado.
- Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Machfoedz.,Mas'ud.,Payamta. 1999. *Pengaruh Krisis Moneter pada Efisiensi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Volume 14, No.1. Hal 37-49.
- Machfoedz, Ircham. 2006. *Metodologi Penelitian*. Fitrimaya. Yogyakarta.
- Nasser.,Etty dan Aryati.,Titik. 2005. *Model Analisis CAMEL untuk Memprediksi Financial Distress pada Sektor Perbankan yang Go Public*. JAAI. Volume 4, No.2. Hal 111-127.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004. Perihal Peringkat Komposit Setiap Faktor. Bank Indonesia. Jakarta.
- Prasnanugraha, Ponttie. 2007. *Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia*. Tesis Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Jakarta.
- Rumondor, Risca. 2013. *Perbandingan Kinerja Keuangan Bank MANDIRI, BNI, dan BRI Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal EMBA. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Soendoro.,Hayati. 2001. *Kinerja Keuangan Bank-Bank Beku Operasi , Take Over, Rekapitulasi dan Sehat tahun 1992-1998*. Ventura. Volume 4, No.2, Hal 97-101.
- Sunggono, Bambang. 2005. *Pengantar Hukum Perbankan*. CV Mandar Maju. Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/Intern DPNP tgl 31 Mei 2004. Perihal Pedoman Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank (CAMELS Rating). Bank Indonesia. Jakarta.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001. Lampiran Pedoman Perhitungan Rasio Keuangan. Bank Indonesia. Jakarta.
- Suyatno, Thomas. 2007. *Kelembagaan Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Edisi Ketiga. Jakarta.
- Utomo, Priyo. 2008. *Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Kinerja Keuangan Bank Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Pada PT Bank Mandiri (PERSERO), Tbk*. Tesis Magister Manajemen. Universitas Gunadarma. Jakarta.

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PBB DENGAN VARIABEL MODERATING SIKAP WAJIB PAJAK ATAS SANKSI DENDA.
(Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Dikota Tidore Kepulauan)**

HASANNUDIN

(email: hasannudin2h@gmail.com)

ABSTRACT

Taxation is a source of enormous revenue contribution in the financing needs of government spending and national development. UN entry of urban and rural areas in 2010 as a local tax, assessed will contribute significantly to the increase in revenue (PAD). Tidore Tidore island is one of the autonomous regions that have natural resources and a limited area, so that the UN considered to be very potent in increasing revenue Tidore islands, because it has an advantage in this regard, is the object of the UN, the land and buildings that are clear designation compared with other tax potential. Data obtained from DISPENDA Tidore islands associated with the acceptance of the United Nations rural and urban, showed that there is still a sizeable UN arrears of revenue realization of the United Nations, especially in 2012 that showed a significant difference between actual revenue in the amount of 77,878,186 principal. and arrears amounting to 568 826 671. it indicates that there are a number of factors that influence taxpayer compliance in paying UN Tidore islands in the city. The purpose of this study was to determine the factors that influence taxpayer compliance in paying UN moderated attitude taxpayer on the implementation of financial penalties. The method used in this study was a multiple linear regression. Research results showed that awareness of the taxpayer, the taxpayer's motivation, and economic level of each taxpayer partially no effect on taxpayer compliance in paying the UN, and each of which is moderated by the attitude of the taxpayer on the implementation of financial penalties. Where the taxpayer stance on the implementation of financial penalties is not a moderating variable, melainkan independent variables. While the partial attitude of the taxpayer on the implementation of fines effect on taxpayer compliance in paying the UN. it shows that the revenue department Tidore islands has a poor performance and not optimal in managing urban and rural United Nations.

Keywords: *land and building tax, taxpayer Awareness, Motivation taxpayer, Level Economic Taxpayer, Taxpayer Compliance Taxpayer Attitude On the performance of Sanctions Fines.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Untuk mengefektifkan penerimaan pajak maka Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Pajak selalu berupaya memberikan sosialisasi kepada wajib pajak melalui iklan di media cetak maupun elektronik akan pentingnya penerimaan pajak bagi keberlangsungan pembangunan bangsa. Selain sosialisasi, undang-undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) mengatur mengenai sanksi berupa denda, penyitaan, penyeselaman maupun penahanan bagi wajib pajak yang dengan sengaja mengabaikan atau melanggar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian maka hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi adanya ketidakpatuhan pajak.

Otonomi Daerah yang terjadi pada tahun 1999 membawa dampak terhadap pembagian wewenang pengumuman pajak, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau yang disebut dengan pajak pusat dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atau yang disebut dengan pajak daerah, yang semula hanya dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat terdiri dari, Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan Barang mewah (PPnBm), Pajak Penghasilan (PPh) Pajak Migas, PBB atas Perkebunan, Kehutanan, dan lain sebagainya. Sementara Pajak Daerah terbagi atas Pajak Provinsi yang terdiri atas : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama atas kendaraan bermotor, pajak bahan bakar atas kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Dan Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri atas : pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan lainnya, dan yang terakhir dengan masuknya pajak bumi dan bangunan (PBB) pedesaan dan perkotaan pada tahun 2010.

Dalam praktek pengumuman pajak sering dijumpai adanya tindakan perlawanan/penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dengan kata lain kedua tindakan tersebut dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak maupun secara tidak sengaja karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi wajib pajak, perkembangan moral dan intelektual penduduk, dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Contoh kasus perlawanan pajak secara aktif adalah kasus pajak yang menimpa gayus tambunan, sementara kasus perlawanan

pajak secara pasif, salah satunya adalah kasus penghindaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) yang umumnya dilakukan karena ketidakseimbangan antara kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki wajib pajak, yang merupakan hasil dari warisan dan kemampuan ekonomi wajib untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut.

kasus penghindaran pajak secara aktif dan pasif yang telah dijelaskan sebelumnya mengindikasikan adanya faktor-faktor perilaku wajib pajak yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak maupun sejumlah faktor-faktor lainnya. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini karakter, sikap dan lainnya dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu (dikutip dari Jatmiko, 2006).

Berdasarkan pada sejumlah kasus pajak dan teori atribusi yang telah dijelaskan sebelumnya maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB di Kota Tidore Kepulauan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh dua alasan. Pertama, berdasarkan data penerimaan pajak yang peneliti peroleh Dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan menunjukkan bahwa selama kurun waktu dari tahun 2010-2013 tercatat terjadi penurunan yang signifikan terhadap penerimaan pokok PBB P2, salah satunya yang terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu dengan selisih penerimaan pokok sebesar 77.280.864 dan tunggakan sebesar 568.826.671 dari total pajak terhutang sebesar 646.704.857.

Kedua, PBB P2 merupakan pajak yang potensial di Kota Tidore Kepulauan dibandingkan potensi pajak lainnya, mengingat Kota Tidore adalah daerah berkembang yang masih minim infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alamnya belum dikelola secara maksimal, selain itu PBB P2 yang sudah jelas dari segi tarif, objek maupun subjeknya, sehingga tergantung dari sejauh mana pemerintah daerah melalui dinas pendapatan daerah mengoptimalkan potensi tersebut guna untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dari beberapa argumentasi diatas maka penelitian ini berjudul : faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pembayaran PBB yang dimoderasi oleh sikap wajib pajak atas sanksi denda (studi kasus di kota tidore kepulauan).

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
2. Untuk menganalisis peran sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda dalam memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
4. Untuk menganalisis peran sikap wajib pajak atas sanksi denda dalam memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
5. Untuk menganalisis pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
6. Untuk menganalisis peran sikap wajib pajak atas sanksi denda dalam memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).
7. Untuk menganalisis pengaruh sikap wajib pajak atas sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) tentang pengaruh sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan atas kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing secara parsial sikap wajib pajak atas sanksi denda, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Teori Atribusi

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku seseorang dalam hal ini karakter, sikap dan lainnya dipengaruhi oleh keadaan eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Menurut Santrock (2003), yang dikutip dari Yanah (2013), teori atribusi adalah pandangan orang seperti termotivasi untuk menemukan penyebab perilaku sebagai bagian dari upaya mereka untuk memahami perilaku.

Teori Of Planned behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang dikutip dari Putri (2013) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB ditambahkan satu variabel yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan yang belum dijelaskan dalam TRA. Adanya variabel kontrol berperilaku yang dipersepsikan berarti bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak berupa konstalasi komponen kognitif, afektif, dan konatif, yang berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Utomo, 2011).

Motivasi Wajib Pajak

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara. (winardi, 2002:29).

Tingkat Ekonomi

Kartono (2006) yang dikutip dari Putri (2013), menyatakan bahwa status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda

Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut Devano dan Rahayu (2006:198) “Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan. Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut Soemarso (2007:147) Sanksi Denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak. Sanksi Denda pada umumnya, disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo, 2008:57).

WP akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar WP, maka akan semakin berat bagi WP untuk melunasinya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Simon James *et al* (2008) yang di kutip dari Yanah (2013), kepatuhan pajak (tax compliance) adalah seorang wajib pajak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, penyelidikan menyeluruh, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum atau administratif. Dan menurut Santoso (2008) yang dikutip dari Yanah (2013), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak perpajakan.

Pajak

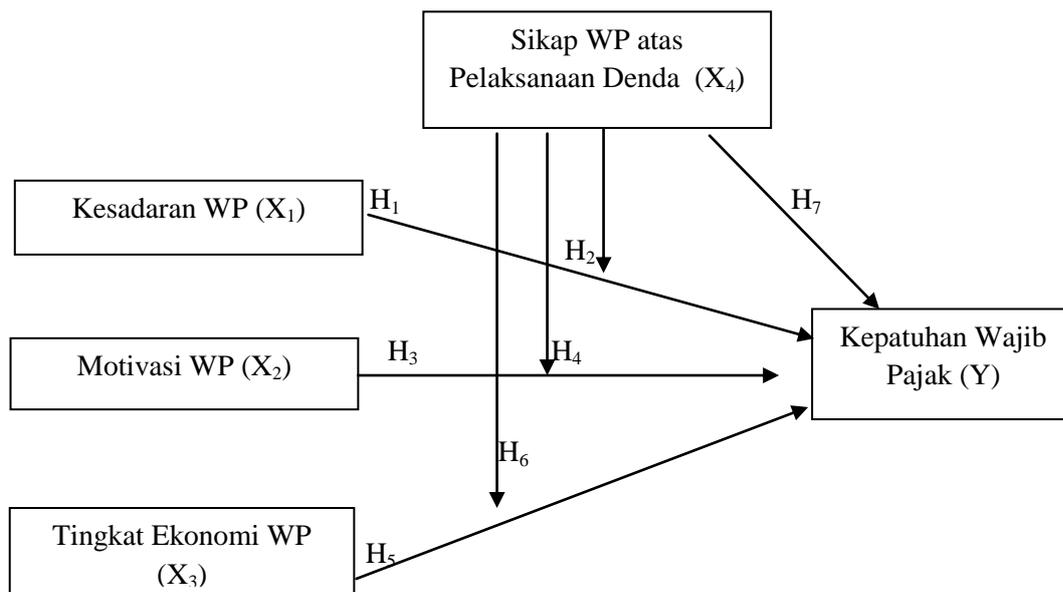
Pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2008:1), adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Umum.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Suryadi (2006) yang dikutip dari Ibtida (2010), menyatakan kesadaran Wajib Pajak dengan empat dimensi, yaitu: persepsi Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan, karakteristik Wajib Pajak dan penyuluhan perpajakan. Wajib Pajak dikatakan sadar untuk membayar pajak ketika ia memiliki persepsi yang positif terhadap pajak, memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, memiliki karakteristik yang patuh dan telah mendapatkan penyuluhan yang memadai. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis pertama penelitian sebagai berikut :

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

2. Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Adanya faktor dari luar wajib pajak seperti Sanksi denda atas pembayaran PBB juga dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh yang diberikan tersebut terjadi apabila terdapat sanksi denda yang merugikan. Dimana Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis kedua penelitian sebagai berikut :

H₂ : sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara. Penelitian yang dilakukan oleh Dianawati (2008) tentang analisis pengaruh motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis ketiga penelitian sebagai berikut :

H₃ : Motivasi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa bukti empiris seperti penelitian Bambang Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Sulud Kahono (2003) yang dikutip dari Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Semakin tinggi sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat. Hal tersebut terjadi karena adanya pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*Behavior*) patuh terhadap pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis keempat penelitian sebagai berikut :

H₄ : Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Putri & Isgiyarta (2013), kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut pastinya dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila wajib pajak mempunyai pendapatan yang cukup, maka individu tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Berdasarkan pada argumentasi ditersebut maka peneliti menetapkan hipotesis kelima penelitian sebagai berikut :

H₅ : Tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh

Beberapa bukti empiris seperti penelitian Suhardito (1996), Fratnesi (2001) dan Kahono (2003) yang dikutip dari Jatmiko (2006), telah menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pelaksanaan sanksi denda yang diberikan akan menambah pengeluaran wajib pajak, maka pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB yang telah dibentuk semakin memperlihatkan kecenderungan niat (*attention*) yang semakin kuat. Hal tersebut dikarenakan ada pengaruh dari dalam diri wajib pajak yang diperkuat dengan pengaruh dari luar wajib pajak. Niat tersebut kemudian memunculkan perilaku (*Behavior*) patuh terhadap pajak. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis keenam penelitian sebagai berikut :

H₆ : Sikap wajib pajak atas sanksi denda memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

7. Pengaruh sikap wajib pajak atas sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008:57). Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatimiko (2006) tentang pengaruh sikap wajib Pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda maka makin tinggi pula kepatuhan WP. Berdasarkan pada beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis ketujuh penelitian sebagai berikut :

H₇ : Sikap wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan korelasional dengan menggunakan variabel moderating. yaitu penelitian atau penelaahan hubungan antara variabel bebas dengan

variabel tergantung tetapi juga muncul adanya variabel yang ikut mempengaruhi hubungan antara variabel tersebut yaitu variabel moderasi (Jatmiko, 2006). Dimana dalam penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan/pengaruh antara kesadaran wajib pajak, Motivasi wajib pajak, dan tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pelaksanaan sanksi denda.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan individu yang memiliki kualitas-kualitas dan ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik. (Jatmiko, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Bumi dan bangunan di Kota Tidore Kepulauan.

Pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Propotional Sampling*. Hair *et al.* (1998) dikutip dari Jatmiko (2006) menyatakan bahwa jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 15 hingga 20 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $4 \times 20 = 80$.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Rao, 1996) yang dikutip dari Jatmiko (2006) :

n = jumlah sampel

N = populasi

Moe = *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%).

Dimana :

$n = 99,99$

$n = 100$

Klasifikasi Variabel dan Defenisi Variabel Operasional

1. Kesadaran Wajib Pajak (X_1)

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Agustina, 2006) (dikutip dari Putri, 2013).

2. Motivasi Wajib Pajak (X_2)

Masalah inti motivasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah bagaimana merangsang sekelompok orang yang masing-masing memiliki kebutuhan mereka yang khas untuk bekerja sama menuju pencapaian sasaran pembangunan ekonomi disuatu negara.

3. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak (X_3)

Menurut Kartono (2006) dikutip dari Putri (2013), status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi seseorang dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok. Apabila seseorang atau keluarga dapat memenuhi semua kebutuhan pokok, sekunder, maupun tersiernya secara mandiri, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai kondisi ekonomi yang sangat baik.

4. Sikap Wajib atas Pelaksanaan Sanksi Denda (X_4) Sebagai Variabel Moderator.

Sikap WP terhadap pelaksanaan sanksi denda yaitu sikap responden tentang pelaksanaan sanksi denda terhadap responden dan orang lain di sekitar responden (Suyatmin, 2004).

5. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Eliyani (1989) yang di kutip dari Jatmiko (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2006:45). Menurut Nunnally dalam Ghozali (2006:46) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach's Alpha* > 60.

Hasil uji reliabilitas terhadap pertanyaan kuesioner variabel-variabel penelitian antara lain, variabel kesadaran wajib pajak (X_1) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,73 lebih besar dari 0,60, variabel motivasi wajib pajak (X_2) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,63 lebih besar dari 0,60, variabel tingkat ekonomi wajib pajak (X_3) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,62 yang lebih besar dari 0,60, variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,88 lebih besar dari 0,60, dan variabel kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,68 lebih besar dari 0,60. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner dari semua variabel penelitian adalah reliabel atau handal.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2006:50). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas dengan cara melakukan korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk atau variabel.

Hasil uji validitas dalam penelitian ini antara lain, untuk pertanyaan kuesioner variabel kesadaran wajib pajak ($X_{1.1}$ - $X_{1.4}$) memiliki nilai masing-masing sebesar 0,223, 0,910, 0,930, dan 0,687 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, pertanyaan kuesioner variabel motivasi wajib pajak ($X_{2.1}$ - $X_{2.4}$) memiliki nilai masing-masing sebesar 0,545, 0,683, 0,791, dan 0,729 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, pertanyaan kuesioner variabel tingkat ekonomi wajib pajak ($X_{3.1}$ - $X_{3.4}$) memiliki nilai masing-masing sebesar 0,659, 0,747, 0,666, dan 0,658 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, pertanyaan kuesioner variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda ($X_{4.1}$ - $X_{4.4}$) memiliki nilai masing-masing sebesar 0,924, 0,763, 0,896, dan 0,849 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, dan pertanyaan kuesioner variabel kepatuhan wajib pajak ($Y_{1.1}$ - $Y_{1.4}$) memiliki nilai masing-masing sebesar 0,717, 0,785, 0,887, dan 0,390 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanyaan kuesioner dari variabel-variabel dalam penelitian ini adalah valid.

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov yang memiliki nilai sebesar 0,10, lebih dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal, Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik yakni uji normalitas.

Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat angka durbin watson. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa angka durbin watson adalah sebesar 1,751 yang berada diantara -2 sampai 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa antar data penelitian tidak terjadi autokorelasi. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik yakni uji autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas dalam penelitian ini di uji dengan menggunakan uji park. Hasil uji park terhadap variabel-variabel independen penelitian memiliki nilai masing-masing sebesar 0,582, 0,583, 0,627, dan 0,212, yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa varians penelitian tidak mengalami efek heterokedastisitas atau varians data adalah homokedastisitas. Hal tersebut dapat simpulkan bahwa data dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik, yakni uji heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai VIF setiap variabel independen yakni X_1 - X_3 - X_4 masing-masing antara lain 1,027, 1,193, 1,263, 2,802, 1,403, 2,791 adalah berada dibawah 10, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel independen tidak terjadi efek multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini lolos uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas.

Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R square (R^2) variabel kesadaran wajib pajak (X_1), motivasi wajib pajak (X_2), tingkat ekonomi wajib pajak (X_3), sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) adalah sebesar 0,564 atau 56,4%. Hal ini menunjukkan bahwa 56,8% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi keempat variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, motivasi wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, dan sikap wajib pajak atas sanksi denda. Sementara sisanya ($100\% - 56,4\% = 43,6\%$) 43,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Uji statistik t (Uji t)

1. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji statistik t dengan menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis pertama penelitian, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) adalah sebesar 0,906 lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib

pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya persepsi masyarakat yang kurang positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan yang dianggapkan kurang baik dalam mengelola PBB.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut maka hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) dan Utomo (2011) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dimana semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan maka makin tinggi pula kepatuhan.

2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sikap wajib pajak atas sanksi denda.

Hasil uji statistik dengan metode uji nilai selisih mutlak menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis penelitian kedua, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel X_1X_4 yang dipersepsikan sebagai variabel moderating adalah sebesar 0,249 yang lebih dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang berarti bahwa variabel X_1X_4 bukan merupakan variabel moderating. Sementara variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0,906 dan variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) sebesar 0,000, hal ini berarti bahwa variabel X_1 lebih besar dan variabel X_2 lebih kecil dari tingkat signifikansi statistik yakni sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi denda tidak dapat memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena variabel tersebut bukan merupakan variabel moderating melainkan variabel independen.

3. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil uji statistik t dengan menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis ketiga, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel motivasi wajib pajak (X_2) adalah sebesar 0,229 lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang berarti bahwa motivasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota tidore kepulauan melalui dinas pendapatan daerah kota tidore kepulauan kurang serius dan transparan dalam mengelola PBB sehingga memberikan hasil yang kurang terhadap pembangunan di kota tidore kepulauan, akibatnya mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar PBB.

Dengan demikian maka hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dianawati (2008) yang menunjukkan bahwa motivasi wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana motivasi wajib pajak yang positif dapat ditunjukkan dengan adanya faktor kebutuhan yang cukup berarti, dan adanya kesadaran akan perlunya membayar pajak.

4. Pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sikap wajib pajak atas sanksi denda.

Hasil uji statistik dengan metode uji nilai selisih mutlak menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis penelitian keempat, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel X_2X_4 yang dipersepsikan sebagai variabel moderating adalah sebesar 0,596 yang lebih dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang berarti bahwa variabel X_2X_4 bukan merupakan variabel moderating. Sementara variabel motivasi wajib pajak (X_2) sebesar 0,229 dan variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) sebesar 0,000, hal ini berarti bahwa variabel X_1 lebih besar dan variabel X_2 lebih kecil dari tingkat signifikansi statistik yakni sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi denda tidak dapat memperkuat pengaruh motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena variabel tersebut bukan merupakan variabel moderating melainkan variabel independen.

5. Pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji statistik t dengan menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis kelima, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel tingkat ekonomi wajib pajak (X_3) adalah sebesar 0,296 lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. hal tersebut menunjukkan bahwa besaran tarif PBB yang dibayar oleh wajib pajak tidak mempengaruhi tingkat ekonomi wajib pajak dalam hal ini yaitu berupa pendapatan dan pengeluaran wajib pajak perbulan.

Dengan demikian maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2013), yang menunjukkan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dimana keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban PBB yang dimiliki.

6. Pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh sikap wajib pajak atas sanksi denda.

Hasil uji statistik dengan metode uji nilai selisih mutlak menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis penelitian keenam, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel X_3X_4 yang

dipersepsikan sebagai variabel moderating adalah sebesar 0,533 yang lebih dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang berarti bahwa variabel X_2X_4 bukan merupakan variabel moderating. Sementara variabel tingkat ekonomi wajib pajak (X_3) sebesar 0,296 dan variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) sebesar 0,000, hal ini berarti bahwa variabel X_1 lebih besar dan variabel X_2 lebih kecil dari tingkat signifikansi statistik yakni sebesar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi denda tidak dapat memperkuat pengaruh tingkat ekonomi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, karena variabel tersebut bukan merupakan variabel moderating melainkan variabel independen.

7. Pengaruh sikap wajib pajak atas sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil uji statistik t dengan menggunakan regresi berganda dalam menjawab hipotesis ketujuh, memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi variabel sikap wajib pajak atas sanksi denda (X_4) adalah sebesar 0,000 lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05, yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memadamkan sanksi denda akan lebih merugikannya, dimana semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB.

Dengan demikian maka hal penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yang menunjukkan bahwa sikap wajib pajak atas sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kesadaran Wajib Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat kurang positif terhadap kinerja pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendapatan dan aset daerah kota tidore kepulauan yang kurang baik dalam mengelola Pajak bumi dan bangunan (PBB), sehingga mengurangi minat masyarakat dalam membayar PBB.
2. Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib dalam membayar PBB yang dimoderasi oleh Sikap Wajib Pajak atas sanksi denda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak atas sanksi denda bukan merupakan variabel moderating melainkan merupakan variabel independen.
3. Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan kurang serius dan transparan dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga memberikan yang hasil kurang maksimal terhadap pembangunan di Kota Tidore Kepulauan, akibatnya mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar PBB.
4. Motivasi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB yang dimoderasi oleh Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda bukan merupakan variabel moderating melainkan merupakan variabel independen.
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran tarif PBB yang dibayar oleh Wajib Pajak tidak mempengaruhi tingkat ekonomi wajib pajak, yaitu berupa besaran pendapatan dan pengeluaran Wajib Pajak perbulan.
6. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB yang dimoderasi oleh Sikap Wajib Pajak atas Pelaksanaan Sanksi Denda. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda bukan merupakan variabel moderating melainkan merupakan variabel independen.
7. Sikap Wajib Pajak atas Sanksi Denda berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak memadamkan sanksi berupa denda akan lebih merugikannya, karena semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya sehingga mempengaruhi kepatuhan mereka dalam membayar PBB.

Saran

1. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan agar lebih transparan dan serius dalam mengelola Pajak bumi dan bangunan (PBB) yakni dengan cara mengalokasikan anggaran yang bersumber dari penerimaan PBB untuk pembangunan infrastruktur yang lebih produktif dan dibutuhkan oleh masyarakat.
2. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah kota tidore kepulauan untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap penagihan PBB, dengan cara memberikan insentif dan penghargaan kepada para petugas penagihan yang berhasil mencapai target dalam melakukan penagihan PBB sehingga

kinerja para petugas penagihan tersebut diharapkan dapat meningkat, serta memberikan penghargaan kepada wajib pajak perkelurahan yang taat dalam membayar PBB. dengan demikian maka diharapkan minat masyarakat dapat meningkat dan masyarakat dengan sendirinya sadar, termotivasi dan akan memberikan sifat patuh dalam membayar PBB.

3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk lebih giat melakukan sosialisasi akan pentingnya PBB bagi keberlangsungan Pembangunan dikota tidore kepulauan serta menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa hasil pembayaran PBB telah diwujudkan dalam bentuk pembangunan sejumlah Fasilitas publik yang telah dinikmati oleh Masyarakat.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan agar dalam menerbitkan surat ketetapan PBB P2, perlu untuk menganalisa dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pajak, khususnya ketidakpatuhan pajak yang disebabkan oleh adanya penghindaran pajak secara pasif, yaitu tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan bukan karena kesengajaan untuk menghindari pajak melainkan karena ketidakseimbangan antara objek pajak dan kemampuan ekonomi wajib pajak. Guna untuk mendukung hal tersebut maka perlu untuk ditetapkan dalam PERDA Kota Tidore Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, Sony dan Rahayu, S Kurnia. 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Dianawati, Susi. 2008. *Analisis Pengaruh Motivasi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Studi pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu*. Skripsi.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Cetakan Ke IV. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ibtida, Reisyah. 2010. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kinerja penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening, studi pada wajib pajak di Jakarta Selatan*. Skripsi.
- Jatmiko, A Nugroho. 2006. *Pengaruh sikap wajib pajak pada Pelaksanaan sanksi denda, pelayanan Fiskus dan kesadaran perpajakan Terhadap kepatuhan wajib pajak, studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang*, Tesis.
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan edisi Revisi 2008*, Yogyakarta : Andi.
- Putri, Surya. 2013, *Analisis pengaruh pengetahuan Umum, tingkat ekonomi, dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan PBB masyarakat desa dan Kota dengan variabel moderating Kontrol petugas desa/kelurahan, studi kasus pada kabupaten demak*. Skripsi.
- Putri, Surya. & Isgiyarta, Jaka. 2013. *Analisis pengaruh pengetahuan Umum, tingkat ekonomi, dan Pengetahuan pajak terhadap Kepatuhan PBB masyarakat desa dan Kota dengan variabel moderating Kontrol petugas desa/kelurahan, studi kasus pada kabupaten demak, Diponegoro Journal of Accounting Volume 2 nomor 3, ISSN (online) 2337-3806*.
- Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta : Salemba Empat
- Utomo, Wahyu. 2011. *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Dikecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*. Skripsi.
- Winardi. 2002. *Motivasi dan Pemotivasian dalam Manajemen*. Jakarta : Rajawali Press
- Yanah. 2013. *The Impact of Administratif sanction and understanding of Income Tax Law On Corporate Taxpayer's Compliance, The International Journal of Social Sciences, 30 June 2013, Vol 12 No. 1*.
- _____. *Undang-undang Republik Indonesia No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2008 tentang Otonomi Daerah*
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Republik Indonesia No, 28 tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

PENGARUH KOMITMEN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEMAMPUAN PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA MANADO

Peggy Rumenser
(email: peggyrumenser@yahoo.com)

ABSTRACT

The implementation of the local government can not be separated from the budget. In Regulation No. 13 of 2006, the draft budget work units contained in a document called the Draft Budget Unit (Rask). Rask standard includes expenditure analysis, a benchmark of the performance of standard costs as the principal instrument in the budget performance. The budget is important because it is used in the allocation of funds for the implementation of local government activities. In budgeting involvement of various work units (SKPD) in Manado City Government is indispensable. This is to improve the effectiveness and efficiency of governance and public service. This study aims to analyze Effect of Commitment, Quality of Human Resources, Leadership Style, to the ability of Local Government Budgeting in Manado.

Sources of data in this study are primary data and secondary data in the form of a questionnaire. The population in this study is the employee on education (Department and Agency) Manado, and in this study the sampling method used was judgment sampling, the sample in this study is the Secretary, Head of Division (third tier). Data used in this study is mainly qualitative data were quantified by using multiple regression analysis. To test the quality of the data with validity and reliability. Besides testing the classical assumption of normality, multicollinearity and heteroscedasticity.

The research proves that in partial Commitment, Quality of Human Resources does not affect the ability of Budgeting in Local Government Leadership Style Manado while variable positive effect on the ability of Local Government Budgeting in Manado.

Keywords : *Effect of Commitment, Quality of Human Resources, Leadership Style, to the ability of Local Government Budgeting In the city of Manado*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah daerah tak terlepas dari anggaran. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK memuat standar analisis belanja, tolak ukur kinerja standar biaya sebagai intrumen pokok dalam anggaran kinerja. Untuk peningkatan kompetensi aparat pengelola APBD, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014.

Di dalam penyusunan anggaran keterlibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Daerah Kota Manado sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kota Manado menetapkan dalam salah satu sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih,

Berdasarkan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado. Tabel 1.1 memperlihatkan opini yang diberikan BPK RI atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Manado. Dari Tahun 2008 hingga 2011 masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga perlu peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya untuk 2012 hingga 2013 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diberikan kepada Pemerintah Kota Manado sudah lebih baik dengan Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP).

Masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah Apakah ada pengaruh dari ketiga variabel, Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado?

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk menganalisis pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Kota Manado.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal Robbins dikutip oleh Jatmiko (2006;35). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikutip oleh Putri (2013 ; 24) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang bertujuan untuk memperlihatkan hubungan dari perilaku-perilaku yang dimunculkan oleh individu untuk menanggapi sesuatu. Dalam TPB ditambahkan satu variabel yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang belum dijelaskan dalam TRA. Adanya variabel kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berarti bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut.

Teori Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia diidentifikasi dalam Pasal 3 dan Penjelasannya yang dirumuskan sebagai *asas umum penyelenggaraan negara. Asas ini terdiri dari berikut ini*

1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep Anggaran Sektor Publik

Menurut Bastian (2006:164), jenis anggaran sektor publik terbagi dua, yaitu Anggaran Negara dan Daerah (APBN/APBD), serta Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta. Selanjutnya anggaran berfungsi sebagai berikut.

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja,
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa mendatang,
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan,
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja,

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi,
6. Anggaran merupakan instrument politik,
7. Anggaran merupakan instrument kebijakan fiskal.

Secara tradisional, prinsip penganggarannya yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan 3E, yaitu Ekonomis, Efektif dan Efisien (Jones dan Pendlebury, 1988). Mereka menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input, efektifitas hanya berkaitan dengan output, sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output dan input.

Konsep Penganggaran Daerah

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. RKA SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Pedoman penyusunan RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, maka kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Penganggaran daerah dengan pendekatan penganggaran merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Hubungan Komitmen terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Mathis dan Jackson dikutip oleh Sopiah (2008 : 155) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya.

Menurut Simanjutak dikutip oleh Azhar (2007), komitmen adalah kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal – hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan daya fisik, mental dan spiritual tambahan yang bisa diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan – pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan dan identifikasi terhadap nilai – nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab.

Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Azhar (2007), sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar pejumlahan karyawan- karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan anggaran, maka efektif dalam

penyusunan anggaran adalah sumber manusia yakni pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, Keuangan dan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dengan waktu yang relatif lama di bidang penganggaran.

Hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Menurut Yulk dikutip oleh Elisabeth (2005), kepemimpinan menyangkut proses sosial, pengaruh yang sengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktivitas – aktivitasnya serta hubungan – hubungan di dalam sebuah kelompok atau organisasi. Kepemimpinan, menurut Yulk (2005), menunjukkan dua dimensi gaya kepemimpinan, yaitu : 1) gaya kepemimpinan konsederasi, pemimpin bertindak dalam cara yang bersahabat dan mendukung, memperlihatkan perhatian terhadap bawahan dan memperhatikan kesejahteraan mereka, dan 2) gaya kepemimpinan Insiasi, pemimpin menentukan dan membuat struktur perannya sendiri dan peran bawahann ke pencapaian tujuan formal, contohnya meminta bawahan memenuhi prosedur standar perusahaan.

Gaya kepemimpinan yang positif dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja SKPD dalam penanganan anggaran dan keuangan secara efektif. Ini sangat penting sebab kinerja bawahan banyak dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan.

Hubungan Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah

Dalam penyusunan anggaran Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan anggaran, maka efektif dalam penyusunan anggaran adalah sumber manusia yakni pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi, Keuangan dan pegawai yang sudah memiliki pengalaman dengan waktu yang relatif lama di bidang penganggaran. Kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian : Mendorong para pegawai untuk berprestasi pada tingkat tertinggi mereka dengan menetapkan tujuan yang matang, menekankan pada kesempurnaan dan memperlihatkan kepercayaan diri atas kemampuan pegawai. Gaya kepemimpinan yang positif dapat digunakan untuk meningkatkan komitmen, sumber daya manusia, dengan gaya kepemimpinan yang positif meningkatkan kinerja SKPD dalam penanganan anggaran dan keuangan secara efektif.

Penelitian Terdahulu

Ali dan Hamid (2012), melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah berbasis Kinerja. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa secara bersama-sama faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan administrasi, sumberdaya yang cukup, penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja. Secara parsial faktor komitmen dari seluruh komponen organisasi, penyempurnaan administrasi dan sanksi (*punishment*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyusunan APBD berbasis kinerja.

Himawan (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya kepemimpinan dan Job Relevant Information terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Manajerial, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang berorientasi pada konsiderasi akan mampu meningkatkan pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial. Komitmen Organisasi dapat memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

KERANGKA KONSEPTUAL

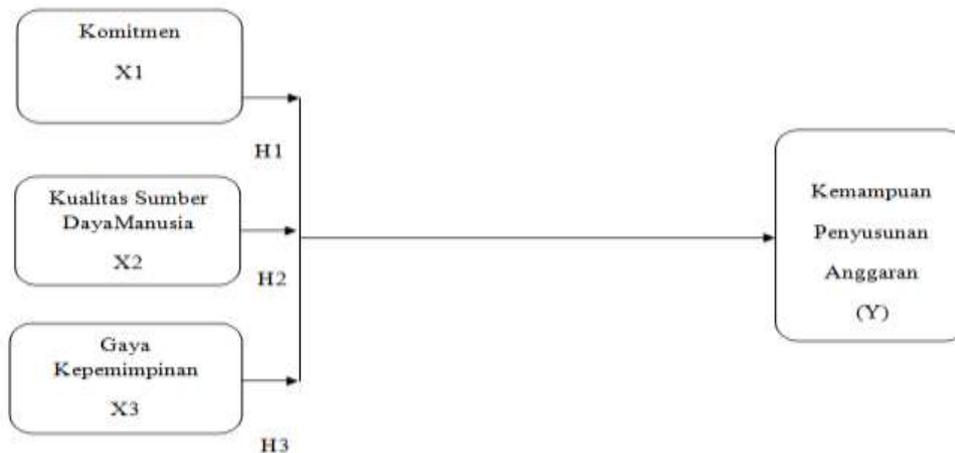
Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini menggambarkan bahwa komitmen pegawai pada organisasi dalam penyusunan anggaran tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses panjang dan bertahap. Steers dikutip oleh sopiah (2008;20) faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen seorang pegawai yaitu keyakinan, variasi

kebutuhan, keinginan yang berbeda dari setiap pegawai, kesempatan berinteraksi dengan rekan sekerja, kewajiban.

Pada Gambar 3.1 terlihat adanya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyusunan anggaran, dengan adanya faktor manajemen sumber daya manusia yang dianggap memperjelas pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kemampuan penyusunan anggaran.

Penelitian ini mengusulkan bahwa pemimpin yang berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan komitmen pegawai dalam penyusunan anggaran, sehingga akan memperbaiki penilaian kinerja terhadap masing-masing SKPD lebih baik. Adapun kerangka konseptual penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.1 berikut ini.



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

Hipotesa

Berdasarkan Pada Beberapa argumentasi diatas maka peneliti menetapkan hipotesis Kedua penelitian sebagai berikut :

- H1 : *Komitmen berpengaruh positif terhadap kemampuan penyusunan anggaran pemerintah daerah*
- H2 : *Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kemampuan penyusunan anggaran pemerintah daerah di Kota Manado*
- H3 : *Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kemampuan penyusunan anggaran pemerintah daerah di Kota Manado.*

METODE PENELITIAN

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terutama data kualitatif yang dikuantitatifkan. Menurut Sugiyono (2011) metode kuantitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian berupa angka-angka menggunakan statistik.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer yaitu berupa kuesioner yang diberikan kepada responden pada SKPD di Kota Manado.
2. Data Sekunder yaitu berupa literatur-literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai SKPD (Dinas dan Badan) Kota Manado

Pada penelitian ini Metode pengambilan sampel (*sampling*) yang digunakan adalah *judgment sampling*. *Judgment sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan “penilaian” (*judgment*) peneliti mengenai siapa-siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.

Sampel dari penelitian ini adalah Sekretaris, Kepala Bidang di masing-masing SKPD (Eselon III), kurang lebih 5 sampai 6 orang. Jadi jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. **Komitmen**, adalah sikap kesediaan diri untuk memegang teguh visi, misi serta kemauan untuk mengerahkan seluruh usaha dalam melaksanakan tugas.
2. **Kualitas Sumber Daya Manusia**, adalah kesatuan tenaga manusia sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai.
3. **Gaya Kepemimpinan**, adalah Suatu perwujudan perilaku atau tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin suatu dinas atau badan khususnya dalam dunia pemerintahan.
4. **Kemampuan Penyusunan Anggaran**, adalah Suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau SKPD, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

METODE ANALISIS

Model analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan program SPSS (Statistical product dan service solution) Version 20.00. Interpretasi model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Dimana :

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------|
| Y | = | Kemampuan Penyusunan Anggaran |
| α | = | Konstanta |
| $\beta, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = | Koefisien Regresi |
| X1 | = | Komitmen |
| X2 | = | Sumber daya manusia |
| X3 | = | Gaya Kepemimpinan |
| ϵ | = | Error |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Dari 71 responden tentang masa kerja responden, sebanyak 2 responden (2,82 %) masa kerja antara 0 tahun – 5 tahun, sebanyak 4 responden (5,63%) masa kerja antara 6 tahun – 10 tahun, sebanyak 16 responden (22,54%) masa kerja 11 tahun – 15 tahun, sebanyak 17 responden (23,94%) masa kerja 16 tahun – 20 tahun, dan sebanyak 32 responden (45,07%) masa kerja lebih dari 21 tahun. Komposisi responden berdasarkan golongan pada pemerintah Kota Manado dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 1 Komposisi Responden Berdasarkan Golongan

| NO | Golongan | Jumlah | Persentase |
|--------|----------|--------|------------|
| 1 | III C | 8 | 11.27% |
| 2 | III D | 27 | 38.03% |
| 3 | IV A | 23 | 32.39% |
| 4 | IV B | 13 | 18.31% |
| Jumlah | | 71 | 100% |

Sumber : Data Penelitian Telah Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas dapat diketahui dari 71 responden tentang komposisi golongan, yakni sebanyak 8 responden (11,27%) dengan golongan III C, sebanyak 27 responden (38,03%) dengan golongan III D, sebanyak 23 responden (32,39%) dengan golongan IV A dan sebanyak 13 responden (18,31%) dengan golongan IV B. Komposisi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada pemerintah kota manado dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|--------|--------------------|--------|------------|
| 1 | D3 Akuntansi | - | 0% |
| 2 | D3 Non Akuntansi | - | 0% |
| 3 | S1 Akuntansi | 4 | 5.63% |
| 4 | S1 Non Akuntansi | 58 | 81.69% |
| 5 | S2 Akuntansi | 2 | 2.82% |
| 6 | S2 Non Akuntansi | 7 | 9.86% |
| Jumlah | | 71 | 100% |

Sumber : Data Penelitian Telah Diolah, 2014

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui dari 71 responden tentang komposisi tingkat pendidikan, yakni sebanyak 4 responden (5,63%) dengan tingkat pendidikan S1 Akuntansi, sebanyak 58 responden (81,69%) dengan tingkat pendidikan S1 Non Akuntansi, sebanyak 2 responden (2,82%) dengan tingkat pendidikan S2 Akuntansi, dan sebanyak 7 responden (9,86%) dengan tingkat pendidikan S2 Non Akuntansi.

Hasil jawaban responden dalam menjawab setiap pertanyaan yang sudah dimodifikasi tentang Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan Terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran pada SKPD di Pemerintah Kota Manado telah dirangkum dalam tabulasi data dengan menggunakan program Microsoft Excel.

Untuk variabel X_1 (Komitmen) terdapat 6 pertanyaan, untuk variabel X_2 (Kualitas Sumber Daya Manusia) terdapat 5 pertanyaan, untuk variabel X_3 (Gaya Kepemimpinan) terdapat 6 pertanyaan dan variabel Y (Kemampuan Penyusunan Anggaran) terdapat 4 pertanyaan sehingga total keseluruhan berjumlah 21 pernyataan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dengan menggunakan program SPSS Version 20.0, maka hasil perhitungan analisis regresi berganda dapat dilihat dalam Tabel 3

Tabel 3
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13.387 | 2.363 | | 5.666 | .000 |
| | x1 | -.015 | .078 | -.023 | -.198 | .844 |
| | x2 | -.162 | .112 | -.202 | -1.451 | .151 |
| | x3 | .329 | .097 | .467 | 3.378 | .001 |

a. Dependent Variabel: Y

Dari Tabel 3 Model Regresi Linier Berganda dalam penelitian ini adalah $Y = 13.387 - 0.015 X_1 - 0.162 X_2 + 0.329 X_3$. Nilai β_1 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_1 (Komitmen) tanda negatif (-) mempunyai arti bahwa kurangnya komitmen dalam penyusunan anggaran dalam setiap SKPD, maka kinerja aparat Pemerintah Kota Manado akan mengalami penurunan.

Selanjutnya, Nilai β_2 merupakan koefisien regresi dari variabel X_2 (Kualitas sumber daya manusia) tanda negatif (-) mempunyai arti bahwa semakin rendah kualitas sumber daya manusia yang ada di masing-masing SKPD Kota Manado dalam penyusunan anggaran, maka akan berkurangnya kualitas anggaran dalam setiap SKPD dan penurunan dalam pemberian penilaian terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah Kota Manado.

Sedangkan nilai β_3 yang merupakan koefisien regresi dari variabel X_3 (Gaya kepemimpinan) tanda positif (+) berarti bahwa dengan Gaya kepemimpinan yang positif dapat memotivasi pejabat penyusun anggaran di SKPD sehingga dapat menghasilkan anggaran yang berkualitas dan sesuai dengan pedoman penyusunan anggaran daerah, dengan demikian hal ini akan meningkatkan kinerja dari SKPD kota Manado dan peningkatan pemberian hasil penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Manado lebih baik lagi.

Berdasarkan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa ternyata faktor gaya kepemimpinan lebih dominan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah Kota Manado dalam penyusunan anggaran apabila dibandingkan dengan faktor komitmen dan sumber daya manusia.

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Regresi secara bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen Komitmen (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), dan Gaya Kepemimpinan (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Variabel dependen yaitu : Kemampuan Penyusunan Anggaran (Y). Dari hasil output uji koefisien regresi secara bersama-sama (Uji F) dapat diketahui nilai F seperti pada Tabel 4.

Tabel 4 Hasil Uji F ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| Regression | 42.757 | 3 | 14.252 | 3.906 | .012 ^b |
| Residual | 244.482 | 67 | 3.649 | | |
| Total | 287.239 | 70 | | | |

a. Dependent Variabel : Kemampuan Penyusunan Anggaran

b. Predictors (Constant): Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan

Berdasarkan tabel 4, hasil uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 3,906 dengan menggunakan tingkat signifikan $P = 0,012 < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Komitmen (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), dan Gaya Kepemimpinan (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Variabel dependen yaitu : Kemampuan Penyusunan Anggaran pada SKPD di Kota Manado.

Uji t

Uji Parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tabel 5 adalah tabel analisis regresi linier sederhana.

Tabel 5 Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13.387 | 2.363 | | 5.666 | .000 |
| | x1 | -.015 | .078 | -.023 | -.198 | .844 |
| | x2 | -.162 | .112 | -.202 | -1.451 | .151 |
| | x3 | .329 | .097 | .467 | 3.378 | .001 |

a. Dependent Variabel: Y

Pengujian hipotesis pada uji t untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (parsial) dengan menggunakan kriteria yaitu apabila signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak, H_a diterima dan apabila signifikan > 0.05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Koefisien Determinasi (R^2) & Koefisien Korelasi (R)

Hasil analisa koefisien determinasi dan koefisien korelasi dapat dilihat dalam Tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 6
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .386 ^a | .149 | .111 | 1.91023 |

a. Predictors: (Constant), X_1 , X_2 , X_3

b. Dependent Variabel: anggaran (y)

Dari Tabel 6 Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.149 yang memiliki arti bahwa pengaruh variabel bebas X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap perubahan variabel terikat Y adalah sebesar 14.9 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

Koefisien korelasi (R) pada Tabel 5.14 sebesar 0.386 menunjukkan bahwa hubungan variabel X_1 , X_2 , dan X_3 terhadap variabel terikat Y adalah kuat. Nilai koefisien R yang positif menunjukkan pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai variabel terikat juga naik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Komitmen terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran

Variabel Komitmen (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan aparatur terkait dalam menyusun anggaran masing-masing SKPD. Hal ini disebabkan karena pejabat pengelola keuangan daerah di Kota Manado tidak mengetahui secara utuh apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab sehingga setiap ada perubahan dalam peraturan tidak siap untuk melaksanakan penyusunan anggaran yang semestinya harus sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sudah ditetapkan, sehingga dapat disesuaikan dengan waktu pelaporan anggaran tersebut. Tanpa komitmen maka harapan-harapan, prestasi akan sulit dicapai, penyusunan anggaran adalah hal yang penting dalam SKPD, karena salah satu penilaian kinerja pemerintah adalah tepat tidaknya penyusunan anggaran dan sesuai dengan pedoman, apabila pelaporan anggaran tepat waktu dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, maka penilaian yang akan diberikan ke masing-masing SKPD adalah baik dengan demikian tercapai sebuah prestasi yang membanggakan dan dapat dijadikan teladan.

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran

Pada penelitian ini bahwa secara parsial Variabel Kualitas sumber Daya Manusia (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran masing-masing SKPD. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan anggaran tidak hanya bergantung sepenuhnya pada kualitas sumber daya manusia, ada sumber-sumber daya lain seperti sumber daya anggaran, informasi berupa data dan fasilitas pendukung lainnya. dalam pelaporan anggaran, masih ditemukan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (X_3) berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan anggaran. Dengan adanya kepedulian dari atasan untuk memberikan petunjuk yang baik dan benar mengenai penyusunan anggaran, memberikan perhatian dari setiap masalah yang ada pada SKPD, adanya hubungan yang baik dalam hal dimintai saran oleh atasan, sehubungan dengan penyusunan anggaran, maka akan dihasilkan anggaran yang berkualitas sesuai dengan pedoman yang

sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini sependapat dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumarno (2005).

Pengaruh Komitmen, Kualitas Sumber Daya Manusia, Gaya Kepemimpinan terhadap Kemampuan Penyusunan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian dengan Uji F, yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari 3 variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dan ternyata variabel Komitmen (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), dan Gaya Kepemimpinan (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Variabel dependen yaitu : Kemampuan Penyusunan Anggaran pada SKPD di Kota Manado. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen, kualitas sumber daya manusia, dan gaya kepemimpinan mempengaruhi kemampuan penyusunan anggaran pemerintah daerah Kota Manado lebih berkualitas, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik dari sebelumnya, hal ini ditunjang dengan gaya kepemimpinan yang selalu mendukung untuk hal-hal positif yang dikerjakan dan memotivasi timbulnya komitmen untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian akan kinerja yang baik dapat diterima oleh masing-masing SKPD yang menunjukkan kinerja yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil dan analisis statistik dalam penelitian ini, maka diambil kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Hasil studi menunjukkan Komitmen secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran SKPD pemerintah Kota Manado, Dalam hal ini persepsi responden menunjukkan dalam penyusunan anggaran dan keberhasilannya kepada atasan dan kepuasan diri sendiri. pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk variabel Sumber Daya Manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel kemampuan penyusunan anggaran, artinya penyusunan anggaran tidak hanya bergantung sepenuhnya pada kualitas sumber daya manusia, ada sumber-sumber daya lain berupa barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
3. Hasil pengujian uji parsial atau uji t Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, artinya seorang pemimpin yang memberikan arahan yang baik, peduli dengan permasalahan yang ada, menegur dengan santun bawahan yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan prosedur, maka akan menghasilkan anggaran yang berkualitas. melalui penelitian ini banyak responden yang menyatakan tidak menyetujui hasil pekerjaan tidak diperiksa dan langsung ditandatangani, artinya pemeriksaan atasan terhadap hasil kerja bawahan sangat penting dan berpengaruh untuk memotivasi menyusun anggaran dengan baik dan benar.
4. Dengan Hasil uji F disimpulkan bahwa variabel Komitmen (X_1), Kualitas Sumber Daya Manusia (X_2), dan Gaya Kepemimpinan (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Variabel dependen, dan positif. Hal ini menunjukkan pengaruh hubungan yang searah atau jika nilai variabel bebas naik maka nilai variabel terikat juga naik. Dengan adanya kualitas sumber daya manusia yang baik maka akan meningkatkan pengetahuan, sehingga dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya lebih baik dari sebelumnya, hal ini ditunjang dengan gaya kepemimpinan yang selalu mendukung untuk hal-hal positif yang dikerjakan dan memotivasi timbulnya komitmen untuk mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan, sehingga penilaian akan kinerja yang baik dapat diterima oleh masing-masing SKPD yang menunjukkan kinerja yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Saran

Dari Hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Penelitian berikutnya harus mempertimbangkan karakteristik atau variabel lain yang mempengaruhi penyusunan anggaran, misalkan harga pasar, pendapat masyarakat, alam.
2. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada SKPD se-provinsi Sulut sehingga hasilnya dapat digeneralisasi. Dan untuk sampel penelitian dari eselon II
3. Memberikan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat membantu pengembangan Ilmu Akuntansi khususnya Akuntansi sektor publik
4. Bagi Pemerintah Daerah Kota Manado, dalam penyusunan anggaran diperlukan partisipasi semua pimpinan SKPD bukan partisipasi yang semu, agar menghasilkan anggaran yang berkualitas, artinya merencanakan program kegiatan di Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai kemampuan anggaran bukan kebutuhan, tapi memprioritaskan kegiatan untuk masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, *Yogyakarta*.
- Albertus Kukuh Himawan, 2010, *Pengaruh Komitmen Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Manajerial*.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, *Salemba Empat Jakarta*
- Darise, Nurlan, 2009, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi 2, Indeks, Jakarta
- Data Jumlah Pegawai SKPD Kota Manado, tahun 2014 (Bkd.manadokota.go.id)
- Darlisman Dalmy, 2013, *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen, Motivasi terhadap Kinerja Auditor dan Reward sebagai Variabel Moderating pada Inspektorat Provinsi Jambi*.
- Hetifah Sj. Sumarto, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Halim, Abdul, 2010, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi pertama, UPP STIM YKPN.
- Haryadi Sarjono, Winda Julianita, 2013, *SPSS vs Lisrel, Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*, Salemba Empat.
- Irianto H. Agus, 2004. *Statistik : Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Cetakan Kedua, Penerbit PT.Prenada Media, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, *Yogyakarta*
- Mochammad, Solichin, 2009. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Anggaran Pemerintah Daerah Yogyakarta. (tesis)*
- _____, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta
- _____, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *LEVERAGE* DAN PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2013

Riana Christel Tumewu
(email: n4n427itel_pooh@yahoo.co.id)

ABSTRACT

Since the economic crisis of 1997, the implementation of good corporate governance, or better known as the Good Corporate Governance (GCG) to issue raised in Indonesia. Due to poor corporate governance in Indonesia at that time, causing the economy to fall. So that everyone agrees to cover the difficulties Indonesia began with corporate governance. GCG or good corporate governance is a control mechanism to measure and manage the company, with the intention to improve corporate accountability. A good corporate governance (GCG) can be defined as a process and structure used by the organs of the company to enhance shareholder value.

The purpose of this study was to (1) Testing and proving the influence of good corporate governance to leverage, (2) To test and prove the effect of the application of good corporate governance on profitability, (3) To test and prove the effect of leverage on profitability. The object of this research is the banking companies listed on the Stock Exchange. The data used in this study is data banking companies listed on the Stock Exchange as many as 16 samples according to criteria of the study, with the vulnerable period of the data used is year 2009-2013.

The analytical method used is the analysis of the path. Results of data analysis using path analysis showed that the implementation of GCG Effect (X) to leverage (Y1) for the ratio of DER (Y1-DER) and DAR (Y1-DAR) is not significant. Different results are obtained when the GCG (X) showed a significant effect on profitability (Y2) for ROE (Y2-ROE) and NPM (NPM-Y2). As for the effect of leverage (Y1) to profitability (Y2) of the banking companies listed on the Stock Exchange tend to be varied. This means that the better the GCG implementation does not affect the banking company debt, but if the better implementation of GCG to profitability, it can enhance the company's ability to generate profits. Suggestions should the company become more motivated to implement GCG consistently in order to help improve the productivity and efficiency of a company that obviously affected the company's earnings that have an impact on investor confidence.

Keywords : GCG, Profitability, and Leverage

PENDAHULUAN

Sejak tahun 1997 terdapat salah satu faktor penyebab kritis yang melanda Asia termasuk Indonesia yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan-perusahaan adalah lemahnya Tata Kelola Perusahaan (TKP). Lemahnya penerapan TKP antara lain adalah semakin terpisahnya antara hubungan para pemegang saham dengan manajemen, kurang transparan perusahaan mengenai kinerja keuangan, semakin tidak terkendalinya pengelolaan dan pengembalian keputusan perusahaan yang terkait dengan kelangsungan hidup perusahaan, dan tidak efektifnya komite audit.

Krisis perbankan di Indonesia yang dimulai pada akhir tahun 1997 bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga di akibatkan oleh belum di implementasikannya *good corporate governance* dan etika yang melandasinya. Banyak penyebab utama kegagalan bank yaitu salah satunya dengan adanya manajemen bank yang buruk, karena berani mengambil risiko, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan terhadap tindak penipuan dan penggelapan dana. Oleh karena itu, usaha mengembalikan kepercayaan kepada dunia perbankan Indonesia melalui restrukturisasi dan rekapitalisasi, hanya dapat mempunyai dampak jangka panjang apabila disertai tiga tindakan penting, yakni: (1) Ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian ; (2) Pelaksanaan *Good Corporate Governance*; (3) Pengawasan yang efektif dari otorisasi pengawasan bank.

Seiring dengan perkembangan pengelolaan perbankan yang ada, fungsi bank menjadi lebih luas, dan memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi dan bisnis, kepercayaan menjadi faktor

utama seseorang dalam mengalokasikan dana yang dimiliki ke dalam bank. Sementara itu masih terdapat bank yang menyalahgunakan kepercayaan tersebut sehingga merugikan pihak nasabah yang menyebabkan kepercayaan nasabah menurun. Salah satu penyebab penyalahgunaan kepercayaan itu terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik dalam suatu perusahaan perbankan atau yang biasa kita kenal dengan *Good Corporate Governance*. Untuk itu *Good Corporate Governance (GCG)* sangat dibutuhkan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Menurut Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) menyebutkan bahwa Corporate Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kerangka peraturan. Adanya penerapan prinsip *GCG* diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan memenuhi laba yang ditargetkan. Adapun manfaat dari penerapan *GCG* salah satunya yaitu meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan yang tentu saja berimbas besar terhadap laba perusahaan yang berdampak pada kepercayaan investor.

Secara teoritis perusahaan yang memiliki laba yang semakin besar akan lebih diminati oleh investor karena diharapkan dapat memberikan *return* yang lebih besar bagi investor apabila mereka melihat dan menganalisa laporan keuangan perusahaan terlebih dahulu. Sehingga sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi, mereka menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian dari investasi. Dengan adanya laba bersih yang baik maka akan berpengaruh pada kinerja perusahaan dilihat dari rasio *leverage* dan profitabilitas yang diukur dengan DER, DAR, ROE, NPM. Peneliti merasa tertarik dengan latar belakang yang telah diuraikan sehingga melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap *leverage* dan profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 2009-2013”**. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan *good corporate governance (GCG)* berpengaruh terhadap *leverage*?
2. Apakah penerapan *good corporate governance (GCG)* berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas?

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

Teori *Good Corporate Governance*

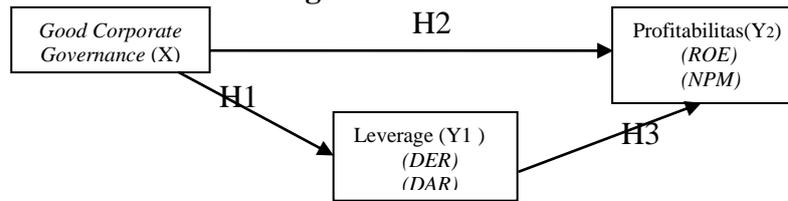
Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder*.

Sementara itu, dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan pustaka, dapat diketahui bahwa *GCG* merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana organisasi dioperasikan dan dijalankan dengan baik karena *GCG* sebagai sarana interaksi yang mengatur antar struktur dan mekanisme yang menjamin adanya kontrol, namun tetap mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan akan mengalami peningkatan kinerja jika menerapkan *GCG*. Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk mengukur pengaruh *GCG* terhadap *leverage* dan profitabilitas perusahaan dengan menggunakan rasio DER, DAR, ROE, NPM sehingga dirumuskan kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Data Olahan (2014)

Penelitian ini menggunakan penerapan GCG sebagai variabel independen (variabel X) dan *leverage* sebagai variabel dependen (variabel Y1), profitabilitas sebagai variabel dependen (variabel Y2). Variabel X diukur dengan nilai komposit, untuk variabel Y1 yang diukur dengan menggunakan rasio *debt to total assets ratio* (DAR), *debt to equity ratio* (DER), dan untuk variabel Y2 diukur dengan menggunakan rasio *return on equity* (ROE), *Net profit Margin* (NPM).

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penerapan GCG terhadap Leverage

Leverage menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang. Untuk *leverage* dapat dihitung dengan *debt to total assets ratio* (DAR) dan *debt to equity ratio* (DER). Syamsuddin (Dalam Purhadi, 2006:30) Rasio DAR ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

DER merupakan perbandingan antara total utang yang dimiliki perusahaan terhadap total ekuitas. Analisis rasio ini dapat digunakan untuk menilai pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan. Rasio utang terhadap ekuitas mengukur risiko struktur modal dalam hal hubungan antara dana yang dipasok oleh kreditor (utang) dan investor (ekuitas). Makin tinggi proporsi utang, maka makin besar tingkat risiko ekuitas karena kreditor harus dipenuhi sebelum pemilik dalam hal kebangkrutan. (Fraser dan Ormiston, 2008).

H_{1a} : GCG berpengaruh signifikan terhadap *leverage*

Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan Rasio Profitabilitas menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim (2005: 85) adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, *asset* dan modal saham tertentu. Pada umumnya rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio antara lain *Return on Asset*, *Return on Equity*, dan *Net profit margin*.

Menurut Premuroso dan Bhattacharaya (2007) menunjukkan bahwa rasio-rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti *ROE* dan *NPM* memiliki hubungan positif signifikan dengan *GCG*. Sehingga makin baik pengelolaan perusahaan, maka perusahaan akan makin mampu menghasilkan tingkat imbal hasil yang lebih baik. Berdasarkan pada argumentasi di atas maka peneliti menetapkan hipotesis penelitian yaitu

H_{2a} : GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

Pengaruh Leverage Terhadap Profitabilitas

Hutang dikatakan 'wajar' jika jumlahnya lebih kecil dari modal. Rasio hutang dapat berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi, perusahaan yang memiliki *debt ratio* yang tinggi dapat mengalami masalah keuangan. Akan tetapi, selama kondisi ekonomi baik dan suku bunga rendah maka mereka dapat meningkatkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dihitung atau diketahui melalui profitabilitas.

Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham (Sartono, 2010: 263).

H_{3a} : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI dari tahun 2009 – 2013. Dari populasi yang ada sebanyak 39 perusahaan perbankan akan diambil sejumlah 16 perusahaan perbankan sebagai sampel.

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah:

1. Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 – 2013.
2. Merupakan perusahaan yang telah *go public* dari tahun 2009–2013.
3. Menerbitkan laporan keuangan lengkap dari tahun 2009 – 2013.
4. Laporan keuangan perusahaan disajikan dalam satuan Rupiah (Rp).
5. Penerapan GCG yang diukur dengan menggunakan nilai komposit.

Klasifikasi Variabel dan Defenisi Operasional Variabel

Variabel bebas (Independen Variabel) yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerapan GCG (X), Sementara variabel terikatnya (Dependen Variabel) adalah *leverage* (Y₁), profitabilitas(Y₂). Berikut ini akan dijelaskan operasionalisasi variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini.

Tabel 1
Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Variabel bebas: GCG | Pengukuran penerapan good corporate governance dilakukan dengan menggunakan nilai komposit yang dipublikasikan oleh BI. | Nilai komposit dari perusahaan yang diukur dan dikelompokkan dalam lima tingkat, yaitu: a. Nilai komposit < 1,5 menunjukkan kondisi sangat baik. b. Nilai komposit 1,5-2,5 menunjukkan kondisi baik. c. Nilai komposit 2,3-3,5 menunjukkan kondisi cukup baik. d. Nilai komposit 3,5-4,5 menunjukkan kondisi kurang baik. e. Nilai komposit 4,5-5 menunjukkan kondisi tidak baik. | NOMINAL |
| Variabel terikat: DAR | <i>Debt to asset ratio (DAR)</i> Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dibiayai dengan hutang. | $DAR = \text{Total Kewajiban} / \text{Total Aset}$ | RASIO |
| Variabel terikat: DER | <i>Debt to Equity Ratio(DER)</i> merupakan rasio yang dapat menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan oleh kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. | $DER = \text{Hutang Jangka Panjang} / \text{Modal Sendiri}$ | RASIO |

| Variabel | Indikator | Ukuran | Skala |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|
| Variabel terikat: <i>ROE</i> | <i>Return on Equity (ROE)</i> digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan pembayaran dividen | $ROE = \text{Laba Bersih} / \text{Modal Sendiri}$ | RASIO |
| Variabel terikat: <i>NPM</i> | <i>Net Profit Margin (NPM)</i> adalah rasio yang menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya. | $NPM = \text{Laba Bersih} / \text{Pendapatan Operasional}$ | RASIO |

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari hasil pengumpulan data sebanyak 39 perusahaan perbankan, diperoleh hasil bahwa hanya terdapat sebanyak 16 perusahaan perbankan sesuai kriteria penelitian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa *Leverage* yang diukur dengan menggunakan rasio DER, DAR dan Profitabilitas yang diukur dengan menggunakan rasio *ROE dan NPM*, dilihat dari laporan keuangan dan laporan tahunan yang melaporkan pelaksanaan *GCG* di bank yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis jalur (*path analysis*). Sebelum melakukan analisis jalur, peneliti juga melakukan uji asumsi klasik yang memenuhiterdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

Pembahasan

Berdasarkan pada hasil penelitian atas besarnya koefisien jalur dari pengaruh *GCG* terhadap rasio-rasio *leverage* (DER dan DAR) serta rasio-rasio profitabilitas (*ROE dan NPM*) di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, dapat diketahui pula besarnya pengaruh langsung dari *GCG dan Leverage* terhadap Profitabilitas. Besarnya koefisien jalur yang menjelaskan pengaruh langsung dari *GCG dan Leverage* terhadap Profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Koefisien Jalur Pengaruh Langsung *GCG*(X) terhadap *LEVERAGE*(Y1) dan Profitabilitas (Y2)

| Variabel | Koefisien Jalur | Pengaruh Langsung |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>GCG</i> terhadap DER | -0.133 | -0.133 |
| <i>GCG</i> terhadap DAR | -0.039 | -0.039 |
| <i>GCG</i> terhadap <i>ROE</i> | 0.369 | 0.369 |
| <i>GCG</i> terhadap <i>NPM</i> | 0.385 | 0.385 |
| DER terhadap <i>ROE</i> | 0.150 | 0.150 |
| DER terhadap <i>NPM</i> | -0.228 | -0.228 |
| DAR terhadap <i>ROE</i> | 0.216 | 0.216 |
| DAR terhadap <i>NPM</i> | -0.082 | -0.082 |

Sumber : Hasil Olahan Data 2014

Hasil analisis data dengan menggunakan analisa jalur menunjukkan bahwa Pengaruh dari *GCG* (X) terhadap *leverage* (Y_1) baik untuk rasio DER (Y_{1-DER}) maupun DAR (Y_{1-DAR}) adalah tidak signifikan. Hal ini berarti *GCG* memiliki pengaruh terhadap DER dan DAR perbankan yang terdaftar di BEI hanya saja pengaruh dari *GCG* tidaklah signifikan.

Besarnya kontribusi pengaruh dari GCG terhadap Y_{1-DER} adalah sebesar $(-0,133^2)$ atau berkontribusi negatif sebesar 1,77%. Sisanya sebesar 98,23% nilai DER perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*. Besarnya kontribusi pengaruh dari GCG terhadap Y_{1-DAR} adalah sebesar $(-0,039^2)$ atau berkontribusi negatif sebesar 0,15%. Sisanya sebesar 99,85% nilai DAR perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*. Berdasarkan pada besarnya pengaruh dan pengujian statistika, maka dapatlah diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG pada perbankan di BEI tidaklah memberikan pengaruh yang signifikan atas *Leverage* perusahaan perbankan di BEI.

Hasil yang berbeda diperoleh ketika GCG (X) diuji pengaruhnya terhadap profitabilitas (Y_2). Hasil pengujian menunjukkan pengaruh yang signifikan dari GCG terhadap profitabilitas (Y_2) baik untuk rasio ROE (Y_{2-ROE}) maupun NPM (Y_{2-NPM}). Dengan demikian, pelaksanaan prinsip-prinsip GCG perbankan yang terdaftar di BEI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI.

Besarnya kontribusi pengaruh dari GCG terhadap Y_{2-ROE} adalah sebesar $(0,369^2)$ atau berkontribusi positif sebesar 13,62%. Sisanya sebesar 86,38% nilai ROE perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*. Besarnya kontribusi pengaruh dari GCG terhadap Y_{2-NPM} adalah sebesar $(0,385^2)$ atau berkontribusi positif sebesar 14,82%. Sisanya sebesar 85,18% nilai NPM perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*.

Pengaruh dari *leverage* (Y_1) terhadap profitabilitas (Y_2) dari perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI cenderung bervariasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* DAR (Y_{1-DAR}) tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio-rasio profitabilitas baik rasio ROE (Y_{2-ROE}) maupun NPM (Y_{2-NPM}).

Besarnya kontribusi pengaruh dari DAR terhadap Y_{2-ROE} adalah sebesar $(0,216^2)$ atau berkontribusi positif sebesar 4,6%. Sisanya sebesar 95,4% nilai ROE perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*. Besarnya kontribusi pengaruh dari DAR terhadap Y_{2-NPM} adalah sebesar $(-0,082^2)$ atau berkontribusi negatif sebesar -0,7%. Sisanya sebesar 99,3% nilai NPM perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hal ini menunjukkan besarnya aset yang dibiayai oleh utang yang dimiliki oleh perusahaan perbankan di BEI tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan perusahaan perbankan dalam menciptakan pengembalian atas modal yang dimiliki (ROE), dan kemampuan perusahaan perbankan dalam menciptakan keuntungan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (NPM).

Hasil penelitian yang menunjukkan adanya kontribusi negatif dari DAR terhadap NPM haruslah diwaspadai oleh perusahaan perbankan. Hal ini dikarenakan DAR memiliki potensi untuk mengurangi kemampuan perusahaan perbankan dalam menciptakan keuntungan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (NPM).

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh hasil olahan data pengujian pengaruh dari *leverage* yaitu rasio DER (Y_{1-DER}) terhadap ROE (Y_{2-ROE}) dan NPM (Y_{2-NPM}). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DER tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, tetapi DER berpengaruh signifikan terhadap NPM.

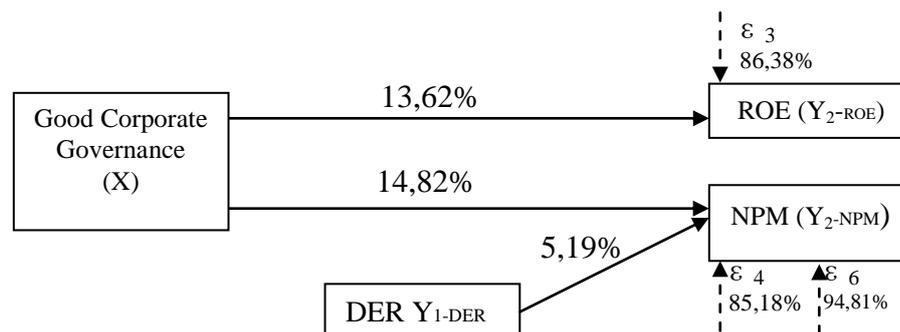
Besarnya kontribusi pengaruh dari DER terhadap Y_{2-ROE} adalah sebesar $(0,150^2)$ atau berkontribusi positif sebesar 2,2%. Sisanya sebesar 97,8% nilai ROE perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*. Besarnya kontribusi pengaruh dari DER terhadap Y_{2-NPM} adalah sebesar $(-0,228^2)$ atau berkontribusi negatif sebesar 5,1%. Sisanya sebesar 94,9% nilai NPM perusahaan perbankan di BEI dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian dengan asumsi *ceteris paribus*.

Hal ini berarti kemampuan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam memenuhi kewajiban dengan ekuitas (DER) memiliki pengaruh yang mendorong kemampuan perusahaan dalam memberikan pengembalian atas ekuitas (ROE) hanya saja pengaruhnya tidak signifikan. Pengaruh yang signifikan dari DER terhadap NPM mengindikasikan kemampuan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam memenuhi kewajiban dengan ekuitas (DER) memiliki pengaruh yang signifikan dan

cenderung mengurangi kemampuan perusahaan perbankan dalam menciptakan keuntungan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (NPM).

Kontribusi pengaruh yang bersifat negatif dan signifikan dari DER terhadap NPM menunjukkan akan adanya kecenderungan semakin tinggi rasio DER memberikan pengaruh yang bersifat mengurangi profitabilitas perusahaan. Rasio DER mengindikasikan besarnya modal yang dimiliki oleh perbankan yang diperoleh dari hutang, semakin tinggi DER akan memberikan dampak berkurangnya kemampuan menghasilkan pengembalian dari aktifitas operasional perbankan. Pengujian pada persamaan sub struktural 1-8, hanya persamaan sub struktural 3,4 dan 6 yang memberikan hasil signifikan. Hal ini berarti analisis jalur menunjukkan bahwa variabel GCG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas baik rasio ROE maupun NPM. Leverage khususnya rasio DER memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPM. Secara grafik, hasil analisis jalur dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2. Pengaruh GCG terhadap Leverage dan Profitabilitas



Gambar 2 menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap leverage, oleh karena itu H_{1a} dalam penelitian ini tidak diterima. Penerapan GCG pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI memberikan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas bank tersebut, seperti menurut Premuroso dan Bhattacharaya (2007) yang menunjukkan bahwa rasio-rasio yang mampu mewakili profitabilitas perusahaan seperti ROE dan NPM memiliki hubungan positif signifikan dengan GCG, oleh karena itu H_{2a} dalam penelitian ini diterima. Dari kedua rasio DAR, DER yang digunakan dalam penelitian ini hanya rasio DER yang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPM, oleh karena itu H_{3a} dalam penelitian ini masih belum bisa diterima.

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007). Penerapan GCG yang telah diwajibkan oleh Bank Indonesia mengharuskan perbankan di Indonesia mengelola bisnis mereka secara baik. Semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini mendukung penelitian Tjondro dan Wilopo (2011) yang menyatakan bahwa dengan penerapan GCG akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif karena proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pengaruh penerapan GCG terhadap DER, DAR dan ROE, NPM maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. GCG berpengaruh tidak signifikan terhadap *Leverage* perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti, semakin baik penerapan GCG maka tidak berpengaruh terhadap hutang perusahaan perbankan yang ada. Semakin tinggi rasio hutang ini maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan dan tidak akan berpengaruh terhadap GCG. *Leverage* dalam hal ini diukur dengan menggunakan rasio *DAR* dan *DER*.

2. GCG berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini berarti pengaruh dari GCG terhadap profitabilitas ini akan meningkatkan kinerja perusahaan secara positif karena dapat menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya lingkungan kerja yang baik dan lebih sehat. Semakin baik penerapan GCG maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berdampak pada kepercayaan investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi dan menghindari segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian dari investasi, dalam hal ini diukur dengan menggunakan rasio ROE dan NPM.
3. DER memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPM pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti mengindikasikan kemampuan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dalam memenuhi kewajiban dengan ekuitas (DER) memiliki pengaruh yang signifikan dan cenderung mengurangi kemampuan perusahaan perbankan dalam menciptakan keuntungan jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima dari kegiatan operasionalnya (NPM).

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan:

1. Bagi Investor

Bagi para investor yang akan melakukan investasi pada perusahaan, lebih baik memilih perusahaan yang memiliki predikat komposit GCG yang sangat baik, karena penerapan GCG pada perusahaan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan yang tentu saja berpengaruh terhadap laba perusahaan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dengan adanya penerapan GCG, maka tentunya laporan keuangan yang dihasilkan dapat diungkapkan secara transparan dan akurat, sehingga dapat menghindari kerugian terhadap para investor. Hal ini telah terbukti dalam penelitian ini semakin baik rasio perusahaan maka semakin tinggi pula penerapan GCG perusahaan tersebut.

2. Bagi Manajemen Perusahaan

Sesuai dengan keputusan Bank Indonesia, setiap perusahaan perbankan yang *go public* ditetapkan untuk menerapkan GCG yang tentu saja berdampak baik bagi perusahaan perbankan. Untuk itu dari hasil penelitian ini, sebaiknya manajemen perusahaan menjadi lebih termotivasi untuk menerapkan GCG secara konsisten agar tentunya dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (online), (www.bi.go.id, diakses pada 16 April 2014).
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (online), (www.bi.go.id, diakses pada 16 April 2014).
- Bank Indonesia. 2013. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP/2013 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. (online), (www.bi.go.id, diakses pada 16 April 2014).
- Chinn, Richard, *Corporate Governance Handbook*, Gee Publishing Ltd. London, 2000.
- Daniri, Mas. 2005. *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya Dalam Konsep Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta.
- Dani Riandi dan Hasan Sakti Siregar. 2011. Pengaruh Penerapan Good corporate Governance terhadap ROA, NPM dan EPS pada Perusahaan yang Terdaftar di CGPI. *Jurnal Ekonomi* Volume 14 Nomor 3.
- David Tjondro dan Wilopo, R. 2011. Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas dan Kinerja Saham Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia. *Journal of business & banking*.
- Emirzon, Joni. 2007. *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance : Paradigma Baru Dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

- Ferry Andriawan Pramono. 2011. "Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Corporate Governance Pada Laporan Tahunan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Dalam LQ45)". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- FCGI, 2001. Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Cetakan Ke IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hanafi, Mamdah M dan Abdul Halim, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN, 2005.
- [Http://www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). ditelusuri pada tanggal 10 Mei 2014.
- IDX. Laporan Tahunan Publikasi. www.idx.co.id diakses 10 Mei 2014. Manado.
- Indah Sulistiyowati, Ratna Anggraini, dan Tri Hastuti Utaminingtyas. 2010. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Growth terhadap Kebijakan Deviden dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Intervening". Simposium Nasional Akuntansi XIII AKMEN-35.
- Johan Wahyudi. 2010. "Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance, Ukuran Dewan Komisaris Dan Tingkat Cross-Directorship Dewan Terhadap Nilai Perusahaan". Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. Pedoman Umum Good Corporate Governance. Jakarta. KNKG
- Lukman Dendawijaya. 2009. Manajemen Perbankan. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Nasution, Marihot dan Doddy Setiawan. 2007. Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar 26-28 Juli 2007.
- Nurly Arninda. 2011. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Pasar Perusahaan Periode 2003-2009 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Purwantini, V.T. 2011. Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Kinerja Keuangan Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Perbankan, 19(19), STIE AUB, Surakarta.
- Premuroso, Ronald F. dan Somnath Bhattacharya. 2007. "Is There a Relationship between Firm Performance, Corporate Governance, And a Firms Decision to Form a Technology Committee?". Journal Compilation. Vol. 15.No. 6. p. 1260 - 1276.
- Sarjono Haryadi, dan Julianita Winda. 2011. "SPSS vs LISREL". Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Shaw, John. C, Corporate Governance and Risk: A System Approach, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, 2003.
- Retno, R.D., Printinah, D. 2012. Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010. Jurnal Nominal, 1(1).
- Suad Husnan & Pudjiastuti, Enny. 2007. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Yogyakarta : UPP AMP YKPM.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. Good Corporate Governance. Alfabeta. Bandung.

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA PENDUKUNG DAN KOMITMEN PIMPINAN TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Brammy Pandey
(email: rigentdaryl@gmail.com)

ABSTRACT

This study on the effect of human resources, means of support and commitment to the performance of work units (SKPD) in the preparation of financial statements in the North Sulawesi provincial government, such research is still relatively small, and the results of the study are still varied and inconsistent. The purpose of this research was conducted to find whether there is empirical evidence Effects of human resources, means of support and commitment to performance on education in the preparation of financial statements in Sulawesi Utara. Populasi this study are all available on education in the government of North Sulawesi province. The unit of analysis is the head of the organizational work units. Data was collected through questionnaires delivered directly by the author. Before testing the hypothesis with multiple regression analysis, prior testing and test data quality classical assumptions. The results showed that the partial human resources, means of support and commitment to influence performance on education.

Key words: Quality, Supporting Facilities, Commitment, SKPD Performance.

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak awal dari otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah tersebut. Dengan berlakunya otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah.

Beberapa peraturan terkait dengan implementasi otonomi daerah yang telah dikeluarkan adalah paket undang-undang bidang keuangan Negara yakni Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara. Dalam rangka mengimplementasikan perundangan-undangan bidang keuangan Negara/Daerah telah dikeluarkan berbagai aturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah menjadi PP Nomor 71 Tahun 2010. Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 58 Tahun 2005, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru, sesuai arah reformasi tata kelola keuangan daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi *Ordonancing* dari Dinas/Badan/Biro/Bagian Keuangan ke setiap Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), dan SKPD sebagai *accounting entity* berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 51 ayat (2), kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggungjawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Pasal

56 UU ini menyebutkan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, sedangkan yang menyusun Laporan Arus Kas adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual.

Berlakunya Peraturan menteri dalam negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan implementasi terhadap paradigma baru yang berorientasi pada prestasi kerja diterapkan dalam Penyusunan APBD, Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk itu setiap pemerintah daerah harus dapat mempersiapkan diri untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan APBD mengalami perubahan yang cukup fundamental dibandingkan dengan aturan-aturan sebelumnya, diantara perubahan tersebut adalah dilimpahkannya sebagian mekanisme pengelolaan keuangan di Dinas/Badan/Biro/Bagian Keuangan kepada SKPD, dengan memberikan tugas dan tanggungjawab penuh kepada pimpinan SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk mengelola keuangan pada SKPD yang dipimpinnya. Tugas pimpinan SKPD selaku PA/KPA antara lain disebutkan merencanakan, melaksanakan/menatausahakan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan anggaran. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 menyatakan Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut.

1. Menyusun RKA-SKPD
2. Menyusun DPA-SKPD
3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
7. Mengadakan ikatan/perjanjiankerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
8. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya
12. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah akan memerlukan SDM yang professional.

Azhar (2007) telah melaksanakan penelitian tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh; penelitian ini menyimpulkan bahwa : Komitmen, Sumber daya manusia, Perangkat Pendukung dan Regulasi secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan secara parsial Regulasi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keberhasilan penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Berdasarkan pengamatan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemampuan Pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah di masing-masing SKPD masih terdapat SKPD yang belum menyampaikan daftar/laporan hutang dan piutang SKPD selama tahun anggaran 2012, dan masih terdapat SKPD yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan SKPD tahun anggaran 2012 serta Laporan Realisasi Anggaran Bulanan SKPD. Dari data yang diperoleh pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih terdapat SKPD yang terlambat menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) kepada SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk persetujuan dan pengesahan.

Sedangkan dalam pelaksanaan belanja daerah masih adanya SKPD yang terlambat dalam menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Fungsional (SPJ-Fungsional) kepada PPKD selaku BUD. Selain itu data Bidang Akuntansi SKPKD realisasi anggaran belanja (LRA) tahun anggaran 2011 adalah 89%. Sedangkan tahun 2012 unaudited hanya sekitar 90%. Ini menunjukkan realisasi anggaran SKPD belum maksimal termasuk realisasi anggaran di awal tahun 2013. SKPD yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahun 2012 yaitu Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, RSUD Noongan, Taman Budaya, Museum Negeri, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Balai Pelatihan Teknis Pertanian, dan Balai Pengujian dan sertifikasi Hasil Perikanan. Disamping itu Pengelolaan Barang Milik Daerah (Aset SKPD) perlu mendapat perhatian khusus dari Pimpinan SKPD selaku Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.. Sedangkan dalam pelaksanaan belanja daerah masih adanya SKPD yang terlambat dalam menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Bulanan (LRA SKPD) kepada SKPKD selaku PPKD dan BUD..

Mengamati fenomena dan hasil penelitian diatas maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian pengembangan tentang Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian ini dibatasi pada Kinerja Keuangan Pimpinan SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang akan dilaksanakan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM Pimpinan), Sarana Pendukung, dan Komitmen Pimpinan SKPD yang diduga akan mendukung Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah “Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana Pendukung dan Komitmen Pimpinan berpengaruh terhadap Kinerja SKPD”

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (PP 58 Tahun 2005)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas. (PP 24 Tahun 2005)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan dalam pemerintah adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari: (a) Pemerintah Pusat, (b) Pemerintah Daerah, (c) Satuan organisasi di lingkungan pusat/daerah atau

organisasi lainnya, jika menurut perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari berikut ini.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, inventasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang mencakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dikemukakan bahwa ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yakni sebagai berikut.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah berbasis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

b. Nilai Historis (*Historical Cost*)

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di mana yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

c. Realisasi (*Realization*)

Bagi pemerintah, pendapatan yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tertentu.

d. Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form*)

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi

atau peristiwa tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkap dengan jelas dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya akan dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulan dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh tidak perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa atau keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Kinerja SKPD

Menurut Mardiasmo (2004) pengukuran kinerja sector public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas organisasi sector public dalam memberikan pelayanan public. Kedua, ukuran kinerja sector public digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sector public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Disamping itu pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan public yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang public dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang public tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Peningkatan kinerja sector public merupakan hal yang bersifat komprehensif, dimana setiap SKPD sebagai pengguna anggaran (badan/dinas/biro/kantor) akan menghasilkan tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan rasa tanggungjawab yang mereka miliki. Semakin baik tingkat pengelolaan keuangan oleh pengguna anggaran, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.

Kinerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 poin 35 adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan penerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 poin 10 : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu.

Otley (1999) dalam Mahmudi (2005 : 6) “Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang akan dicapai kerja tersebut”.

Kemisean et.al, (2004 : 491) mengungkapkan bahwa tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi/organisasi non bisnis, yakni responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Dalam menilai kinerja organisasi pelayanan public, banyak indicator yang dapat dipergunakan, yaitu: (1) produktivitas; (2) kualitas layanan; (3) responsivitas; (4) responsibilitas; dan (5) akuntabilitas.

Dalam konteks organisasi pemerintah daerah, pengukuran kinerja SKPD dilakukan untuk menilai seberapa baik SKPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Mahsun (2006 : 196), pengukuran kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) harus mencakup pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi Pemda. Indikator Kinerja Pemda, meliputi indicator input, indicator proses, indicator output, indicator outcome, indicator benefit dan indicator impact.

Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer, sehingga tiap-tiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan SKPKD harus mampu menjalankan sistem akuntansi keuangan daerah yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dan prosedur akuntansi selain kas.

Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi yakni SKPD dan SKPKD diharapkan mampu menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan dengan baik dan benar berdasar peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemampuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam hal ini SKPD dan SKPKD dapat diukur dengan ketepatan waktu pelaporan yakni 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006).

Kualitas Sumber daya manusia

Menurut Matindas (2002 : 89) dalam Azhar (2007) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia yang dalam organisasi dan bukan hanya sekedar penjumlahan karyawan-karyawan yang ada. Sebagai kesatuan, sumber daya manusia harus dipandang sebagai suatu sistem di mana tiap-tiap karyawan merupakan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia diukur berdasarkan latar belakang pendidikan yang diperoleh pegawai. Dalam kaitan dengan kemampuan penyusunan laporan keuangan, maka lebih efektif dalam penyusunan laporan keuangan adalah sumber daya manusia yakni pegawai yang dimiliki berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Menurut Gaa and Thore (2004) dalam Aidil (2010) mengatakan bahwa pendidikan akuntansi selama ini memfokuskan pada dimensi pilihan kebijakan tetapi tidak memperhatikan nilai dan kredibilitas yang mempengaruhi pilihan tersebut. Kemudian Gaa and Thorne menyebutkan bahwa pada dasarnya akuntan memiliki tindakan berdasarkan nilai yang ada dalam pikiran mereka.

Pelatihan sebagai bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu relatif singkat dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Menurut Veithzal Rivai (2004: 226) dalam Aidil (2010), Pelatihan dalam proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai

tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil guna dalam pekerjaannya.

Menurut Notoatmojo (2003) dalam Aidil (2010) bahwa pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan kemampuan atau keterampilan karyawan akan meningkat.

Sarana Pendukung

Sarana pendukung yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu kinerja SKPD dalam penyusunan laporan keuangan serta yang berkaitan dengan kebutuhan SKPD. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti komputer, *software* dan lain-lain.

Menurut Kenneth dan Jane (2005) dalam Azhar (2007), perangkat keras adalah perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas input, proses dan output dalam sebuah sistem akuntansi. Perangkat keras ini terdiri dari komputer yang memproses, perangkat penyimpanan dan perangkat untuk menghasilkan output serta media fisik untuk menghubungkan semua unit tersebut. Sedangkan perangkat lunak menurut Kenneth dan Jane adalah sekumpulan rincian instruksi pra program yang mengendalikan dan mengkoordinasi perangkat keras komponen di dalam sebuah sistem informasi.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) : Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Komitmen Pimpinan

Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Sedangkan Mathis dan Jackson (dalam Sopiah, 155) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai derajat dimana karyawan percaya dan mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya).

Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi. Rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya. Mempersoalkan komitmen sama dengan mempersoalkan tanggung jawab, dengan demikian, ukuran komitmen seorang pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala sekolah adalah terkait dengan pendelegasian wewenang (*empowerment*). Dalam konsep ini pimpinan dihadapkan pada komitmen untuk mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan. Sebaliknya, bawahan perlu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi diri.

Dari beberapa definisi yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan suatu ikatan psikologis karyawan pada organisasi ditandai dengan adanya :

1. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi
2. Kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi
3. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan kedudukan sebagai anggota organisasi.

Menurut Mayer et. Al (1993), yang dikutip oleh Arifuddin et.al (2002) terdapat tiga komponen komitmen organisasi, yaitu:

1. Komitmen efektif (*effective commitment*) terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*);
2. Komitmen kontinuan (*continuance commitment*) terjadi apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.

3. Komitmen normatif (normative commitment) timbul dari nilai-nilai karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang harus dilakukan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Azhar (2007) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian yang didapatkan pada Pemerintah Kota Banda Aceh menyimpulkan bahwa secara parsial variabel Komitmen, SDM dan Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan variabel regulasi tidak berpengaruh.

Penelitian Sulani (2009) tentang Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Penerapan PP 24 Tahun 2005 Kabupaten Labuhan Batu. Hasil penelitian menemukan bahwa secara parsial variabel Komitmen berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan PP 24 Tahun 2005 di Kabupaten Labuhan Batu sedangkan variabel Sumber Daya Manusia dan Perangkat Pendukung tidak berpengaruh.

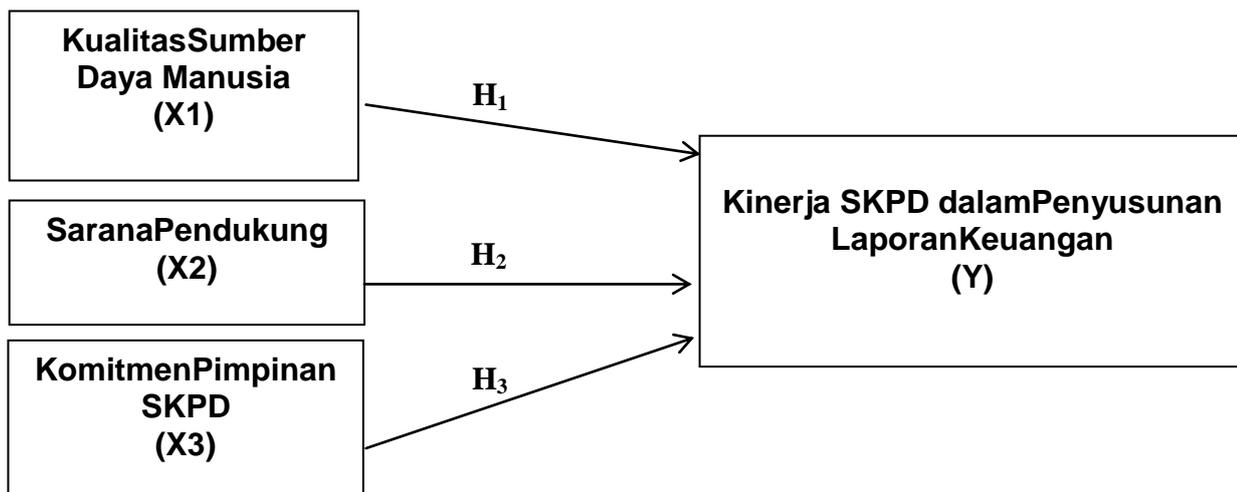
Penelitian Warisno (2009) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel SDM dan Komunikasi berpengaruh terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Provinsi Jambi, sedangkan variabel Sarana Pendukung dan Komitmen tidak berpengaruh.

Penelitian Aidil (2010) tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel Perangkat Pendukung berpengaruh terhadap Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tebing Tinggi sedangkan variabel Peraturan, Latar Belakang Pendidikan, Pelatihan dan Komitmen tidak berpengaruh.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel independen dan dependen. Sebaliknya perbedaan dengan penelitian ini adalah pada lokasi penelitian dan waktu penelitian

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori, maka didefinisikan tiga variabel independen(X) yakni kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung dan komitmen pimpinan yang diduga secara parsial berpengaruh terhadap kinerja SKPD dalam penyusunan laporan keuangan (Y). Adapun kerangka konseptual dapat digambarkan pada Gambar 3.1 berikut:



Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya dan kerangka konseptual tersebut diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pengaruh variabel kualitas sumber daya manusia terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Halim, dkk (2010), kualitas dan kinerja organisasi sangat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia, karena keberadaan manusia dalam suatu organisasi tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Organisasi dapat mencapai sukses apabila dikelola dengan baik, oleh karenanya diperlukan suatu manajemen sumber daya manusia yang efektif.

Penelitian Azhar (2007) bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 karena sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting dan harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

H₁ : Sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

2. Pengaruh variabel Sarana pendukung terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Variabel sarana pendukung berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Menurut Halim (2007), Sarana pendukung berupa komputer yang digunakan untuk menjalankan sistem akuntansi untuk meningkatkan efisiensi di dalam pemrosesan data transaksi sehari-hari sehingga memudahkan dalam penyajian laporan keuangan tepat waktu.

Penelitian Aidil (2010), perangkat pendukung berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Pemerintah daerah dengan bantuan alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan lebih efisien dan lebih tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂ : Sarana Pendukung berpengaruh terhadap kemampuan Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

3. Pengaruh variabel komitmen terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Variabel komitmen berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Menurut Halim, dkk (2010), bahwa pentingnya komitmen pejabat pengelola keuangan daerah untuk penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu.

Penelitian Azhar (2007) bahwa komitmen berpengaruh terhadap penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 karena semakin tinggi komitmen dari anggota organisasi maka semakin berhasil dalam penerapan Permendagri 13 Tahun 2006 demikian juga dalam hal penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

H₃ : Komitmen berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan.

Model Analisis

Dalam penelitian ini, pengujian terhadap hipotesis 1 sampai dengan hipotesis 3, dengan tehnik analisis regresi linier berganda. Menurut Sugiyono (2011), analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana :

- Y = Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- α = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- X₁ = Sumber Daya Manusia
- X₂ = Sarana Pendukung
- X₃ = Komitmen
- ε = Error

Metode Penelitian

Jenis/Rancangan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dikuantitatifkan. Menurut Sugiyono (2011) metode kuantitatif adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian dalam bentuk angka – angka dan analisis menggunakan statistik. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu berupa kuesioner yang di berikan kepada responden pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Data sekunder yaitu berupa literatur – literatur kepustakaan yang digunakan sebagai dasar teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan penelitian – penelitian sebelumnya.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan jumlah 48 SKPD dan Unit Kerja, yang terdiri dari 14 Badan, 16 Dinas, 9 Biro, 2 Rumah Sakit Daerah, dan 2 kantor. Dimana masing-masing SKPD akan diberikan 1 (satu) kuisisioner yang akan diisi oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran SKPD, sehingga total populasi yang akan diberikan kuisisioner sebanyak 48 populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan sampel yaitu sebanyak 48 sampel karena dilakukan dengan menggunakan metode sensus.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini akan menggunakan tiga variabel independen (Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana Pendukung dan Komitmen Pimpinan) dan satu variabel dependen yaitu Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

1. Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku diartikan sebagai kemampuan dari masing-masing pimpinan SKPD dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 7 (tujuh) pertanyaan dan diukur dengan skala *Likert*1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.
2. Kualitas sumber daya manusia adalah kesatuan tenaga manusia pada pimpinan SKPD dengan pengalaman mengelola keuangan, pendidikan dan kompetensi disertai dengan kematangan usia diperlukan oleh pimpinan SKPD. Disamping itu pemahaman peran tugas dan tanggungjawab serta terus meningkatkan keahlian dan intelengsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam penyusunan laporan keuangan SKPD. Variabel ini diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.
3. Sarana pendukung dalam penelitian ini adalah ketersediaan perangkat pendukung yang akan membantu dalam melaksanakan tugas seperti ketersediaan perangkat komputer dan *software* yang berkaitan dengan efisiensi dan kemudahan pemahaman serta kapasitas jaringan untuk mengoperasikan perangkat komputer tersebut. Variabel ini diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.
4. Komitmen artinya adalah kepercayaan diri, semangat kerja, dan kreatifitas, kepribadian moral serta fisik yang kuat juga bersikap positif dalam kejelasan peran dari pimpinan SKPD selaku entitas akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.. Variabel ini diukur dengan skala *Likert* 1-5 untuk setiap bobot pertanyaan.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan untuk menemukan apakah ada pengaruh kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, dan komitmen pimpinan terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, akan dilakukan dengan menganalisis regresi berganda (*multiple regresion analysis*) dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung dan komitmen pimpinan terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Menentukan besarnya koefisien regresi dari persamaan regresi.
2. Melakukan uji t untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang mengganggu variabel lain bersifat konstan.

$H_0: \beta_1 = 0$, artinya Kualitas Sumber daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a: \beta_1 \neq 0$, artinya Kualitas Sumber daya Manusia berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_0: \beta_2 = 0$, artinya Sarana pendukung tidak berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a: \beta_2 \neq 0$, artinya Sarana Pendukung berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_0: \beta_3 = 0$, artinya Komitmen tidak berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

$H_a: \beta_3 \neq 0$, artinya Komitmen berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Uji ini dilakukan untuk membandingkan nilai t-hitung dengan nilai t-tabel. Apabila t-hitung $>$ t-tabel dengan tingkat keyakinan (*level of significant*) misalnya sebesar 99% maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sebaliknya t-hitung $<$ t-tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Dapat juga dilihat dari tingkat signifikansi yaitu hasil signifikansi $<$ α 0,05 maka H_a diterima atau H_0 ditolak. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi $>$ α 0,05 maka H_a ditolak atau H_0 diterima.

3. Melakukan uji F untuk menentukan tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F atau bisa disebut dengan *Analysis Of Variance (Anova)*. Pengujian Anova dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel atau melihat tingkat signifikansi pada tabel Anova.

Pengujian dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila F-hitung $>$ dari F-tabel (α)0,05 maka H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan sebaliknya apabila F-hitung $<$ dari F-tabel (α)0,05 maka H_1 ditolak dan H_0 diterima. Pengujian dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan apabila hasil signifikansi pada tabel Anova $<$ α 0,05 maka H_1 diterima atau H_0 ditolak. Sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel Anova $>$ α 0,05 maka H_1 ditolak atau H_0 diterima.

4. Menentukan besarnya nilai koefisien determinasi (R) yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R mempunyai interval nilai mulai dari 0 sampai 1 ($0 \leq R \leq 1$), semakin besar R (mendekati 1), semakin baik model regresi tersebut. Semakin mendekati 0 maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dari variabel dependen. Untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan nilai R Square yang disesuaikan atau Adjusted R Square. Nilai R Square maupun Adjusted R Square dikatakan baik jika nilai di atas 0,5 (Lubis, dkk, 2007) dalam Aidil (2010).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Variabel Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini variabel kualitas sumber daya manusia (X1) berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin baik tingkat pendidikan dan semakin sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih efektif disajikan dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi.

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik, aparat SKPD harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang didukung dengan pengalaman, pendidikan, kematangan usia, pemahaman atas tupoksi, peningkatan keahlian, tingkat intelegensia serta kepuasan kerja di bidang keuangan. Pelatihan itu

penting bagi pegawai. Sebagaimana menurut Veithzal Rivai (2004) dalam Aidil (2010), pelatihan dalam proses sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memilikiorientasi saat ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan tertentu agar berhasil guna dalam pekerjaannya. Sedangkan menurut Notoatmojo (2003) dalam Aidil (2010) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Sehingga dengan adanya pelatihan diharapkan kemampuan atau keterampilan karyawan akan meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Azhar (2007) sumber daya manusia berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam penyusunan laporan keuangan karena kualitas sumber daya manusia merupakan elemen organisasi yang sangat penting dan harus dikelola sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Pengaruh Variabel Sarana Pendukung terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel perangkat pendukung (X2) berpengaruh terhadap Kinerja SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Perangkat pendukung adalah alat untuk mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti *71oordina*, *software* dan lain-lain. Menurut Kenneth dan Jane (2005) kegunaan perangkat keras merupakan perlengkapan fisik yang digunakan untuk aktivitas *input*, proses dan *output* dalam sebuah *71oordi* akuntansi. Dengan adanya perangkat keras yang memadai maka output dapat dihasilkan.

Output dihasilkan secara memadai maka siklus akuntansi dapat dijalankan sehingga dapat mendukung kemampuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian hasil dari penelitian ini yang menunjukkan terdapat pengaruh sarana pendukung dalam mendukung penyelesaian tugas SKPD dalam menyusun laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan merupakan *output* dari serangkaian proses dari sebuah siklus akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Namun dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang tidak searah karena berubahnya teknologi membuat kepala SKPD sering tidak beradaptasi dengan baik atas perubahan teknologi yang cepat. Bergantinya *71oordi* administrasi berbasis manual menjadi berbasis *71oordina* menyebabkan berubah pula pengendalian intern, metode pencatatan, metode penyimpanan, metode penelusuran dan fungsi-fungsi lainnya. Perubahan tersebut perlu diikuti berubahnya kompetensi dan kualifikasi karyawan agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan system informasi untuk menunjang pekerjaannya.

Goodhue dan Thompson (1995) dalam Aidil (2010) menjelaskan bahwa hubungan antara *71oordi* kesesuaian tugas-teknologi terhadap kinerja individual didasarkan pada penelitian-penelitian yang berfokus pada kesesuaian tugas-teknologi. Dalam penelitian tersebut, pemanfaatan teknologi informasi merupakan sesuatu yang sudah diasumsikan. Aliran yang berfokus pada kesesuaian tugas-teknologi ini berargumentasi bahwa dampak kinerja akan dihasilkan dari kesesuaian tugas teknologi, yaitu pada saat teknologi menyediakan sarana dan dukungan yang sesuai atau cocok dengan yang diperlukan oleh tugas yang didukungnya. Artinya jika teknologi yang diterapkan dalam suatu perusahaan dapat memberikan banyak kemudahan dalam penyelesaian tugas/pekerjaan, maka kinerja individu karyawan pada perusahaan tersebut meningkat. Pandangan aliran penelitian yang berfokus pada tugas teknologi perangkat pendukung.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Sulani (2009) bahwa perangkat pendukung tidak berpengaruh karena di Kabupaten Labuhan Batu masih menggunakan jasa konsultan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengaruh Variabel Komitmen terhadap Kinerja SKPD dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pada penelitian ini variabel komitmen pimpinan (X3) berpengaruh terhadap Kinerja SKPD penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Dimana karyawan percaya dan mau menerima

tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Tanpa adanya komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana. Kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal yang dipercayakan kepada seseorang. Komitmen tidak ada hubungannya sama sekali dengan bakat, kepintaran atau talenta. Komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang 72oor mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang 72oor diperoleh, sebaliknya tanpa komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit dilaksanakan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Aidil (2010) yang mengata hwa komitmen tidak berpengaruh terhadap kemampuan penyusunan laporan keuangan disebabkan para pegawai yang terkait belum bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental dan spiritual tambahan dalam melaksanakan penugasannya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, sarana pendukung, dan komitmen pimpinan terhadap kinerja keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan, sehingga semakin baik tingkat pendidikan dan semakin sering mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan daerah maka semakin baik laporan keuangan yang dihasilkan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah lebih efektif disajikan dengan kualitas sumber daya manusia yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi.
2. Perangkat/Sarana pendukung berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan. Hal ini menunjukkan laporan yang dihasilkan merupakan *output* dari serangkaian proses siklus akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan.
3. Komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pimpinan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan komitmen yang kuat akan memungkinkan seseorang 72oor mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang 72oor diperoleh. Tanpa adanya komitmen maka pekerjaan-pekerjaan besar akan sulit terlaksana.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran sebagai berikut :

1. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya agar memperluas objek penelitian pada pengelola keuangan daerah se-Provinsi Sulawesi Utara sehingga hasilnya dapat digeneralisasi.
2. Bagi pimpinan SKPD sebagai pengguna anggaran/pengguna barang agar memiliki rasa tanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan di SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semakin baik tingkat kewajaran penyusunan laporan keuangan, maka akan semakin tinggi tingkat kinerja SKPD.
3. Bagi Gubernur yang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah selaku 72oordinator pengelolaan keuangan daerah, dan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) agar melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kepala SKPD serta memberikan petunjuk teknis dalam mengelola APBD yang ada di SKPD masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar**, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Mardiasmo**, 2004, Akuntansi Sektor Publik. Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri**, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia**, Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Republik Indonesia**, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia**, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Republik Indonesia**, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Warisno**, 2009, Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

**ANALISIS PENGARUH *CURRENT RATIO (CR)*, *COLLATERALIZABLE ASSETS (COL)*, *RETURN ON EQUITY (ROE)*, DAN *GROWTH* TERHADAP *DIVIDEND PAYOUT RATIO (DPR)*
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2005 - 2011)**

Gretty Brigitta Liwe
(email: gretty_liwe@yahoo.com)

ABSTRACT

Dividend policy is a policy of the company to be aware and careful consideration. In the dividend policy determined amount of profit allocation that can be distributed to shareholders (dividends) and the allocation of retained profits to the company. The greater the retained earnings, the smaller the dividend to be distributed to the shareholders. In the allocation of income arises various problems encountered. Announcement of the distribution of dividends by a company is a signal to shareholders.

This study aims to determine the effect of the Current Ratio (CR), Collateralizable Asset (COL), Return on Equity (ROE) and the Growth of the Dividend Payout Ratio (DPR) Studies on the Indonesia Stock Exchange Period 2005-2011.

The population in this study is the Company's Financial Statements listed on the Stock Exchange the share dividend. The samples are 8 companies during 2005 - 2011. The research instrument used secondary data and processed using SPSS 20, with the method of analysis used is multiple linear regression analysis.

Results of statistical research concludes that the Current Ratio, Collateralizable Assets, Return on Equity, and Growth together no significant effect on Dividend Payout Ratio on manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, also partially, Current Ratio, Collateralizable Assets, Return on equity, and Growth no significant effect on Dividend Payout Ratio on manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange. The suggestion of this study is to further research, this study only uses the sample derived from a manufacturing company that can not necessarily be generalized to other industries. This is due to the limited time of the study. It is recommended in future studies could be expanded scope of research-type sejenis other industries also added the study variables such as Debt to Equity Ratio (DER), Return on Equity (ROE), and the ratio - the ratio of the other. And also expected in future studies to add a longer time span.

Key Words: *Current Ratio, Collateralizable Asset, Return On Equity, Growth, Dividend Payout Ratio.*

PENDAHULUAN

Kebijakan deviden merupakan salah satu kebijakan dalam perusahaan yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara seksama. Dalam kebijakan deviden ditentukan jumlah alokasi laba yang dapat dibagikan kepada para pemegang saham (deviden) dan alokasi laba yang dapat ditahan perusahaan. Semakin besar laba yang ditahan, semakin kecil kebijakan membagikan deviden kepada para pemegang saham.

Pengumuman pembagian deviden oleh suatu perusahaan merupakan *signal* bagi pemegang saham. Pada dasarnya antara manajer dengan pemegang saham memiliki informasi yang berbeda, di mana manajer lebih memiliki informasi yang lengkap daripada pemegang saham.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa investor menginginkan kebijakan deviden yang stabil. Namun kenyataannya, rata-rata perkembangan *Dividend Payout Ratio* selama periode 2005-2009 mengalami fluktuasi. Berikut akan ditunjukkan perkembangan *Dividend Payout Ratio* pada perusahaan manufaktur yang membagikan deviden secara berturut-turut pada periode 2005-2009.

Tabel 1. Perkembangan Rata-Rata *Dividend Payout Ratio* Periode 2005-2009

| NO | NamaPerusahaan | DPR | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. | PT. Fast Food Indonesia, Tbk | 21.61 | 12.95 | 19.58 | 20.31 | 20.35 |
| 2. | PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. | 76.64 | 75.60 | 89.89 | 142.17 | 22.59 |
| 3. | PT. Gudang Garam, Tbk | 50.91 | 47.73 | 33.32 | 35.81 | 36.19 |
| 4. | PT. Colorpak Indonesia, Tbk | 14.80 | 19.97 | 31.39 | 30.47 | 29.93 |
| 5. | PT. SumiIndo Kabel Tbk | 27.06 | 24.14 | 39.50 | 39.16 | 14.92 |
| 6. | PT. Metrodata Electronics Tbk | 37.19 | 29.19 | 21.42 | 6.79 | 20.21 |
| 7. | PT. Tunas Ridean Tbk | 18.57 | 33.29 | 40.42 | 95.63 | 7.19 |
| 8. | PT. United Tractor Tbk | 29.82 | 26.05 | 28.65 | 27.51 | 28.76 |
| Rata-rata | | 34,58 | 33,62 | 38,02 | 49,73 | 22,52 |

Sumber: ICMD dan IDX 2005-2009

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat perkembangan rata-rata *Dividend Payout Ratio* (DPR) perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2005-2009 mengalami fluktuasi. Dari sisi investor, deviden merupakan salah satu penyebab timbulnya motivasi investor menanamkan dananya dipasar modal. Dan karena informasi yang dimiliki investor di pasar modal sangat terbatas, maka perubahan devidenlah yang akan dijadikan sebagai sinyal untuk mengetahui *performance* perusahaan.

Dari fenomena dan teori yang diungkapkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang deviden. Penelitian ini membatasi penelitian terhadap factor yang mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* (DPR), yaitu *Current Ratio* (CR), *Collateralizable Assets* (COL), *Return On Equity* (ROE) dan *Growth*. Selanjutnya penelitian ini diberi judul dengan judul: “ANALISIS PENGARUH *CURRENT RATIO* (CR), *COLLATERALIZABLE ASSETS* (COL), *RETURN ON EQUITY* (ROE), DAN *GROWTH* TERHADAP *DIVIDEND PAYOUT RATIO* (DPR).

Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat fenomena empiris yaitu adanya ketidaksesuaian antara teori dengan data empiris yang ditemukan dari variabel dependen pada setiap periodenya dan perlu diteliti lebih lanjut faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap *Dividend Payout Ratio*?
2. Bagaimana pengaruh *Collateralizable Assets* (COL) terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR)?
3. Bagaimana pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR)?
4. Bagaimana pengaruh *Growth* terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR)?

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Kebijakan deviden (*dividend policy*) adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. Apabila perusahaan memilih untuk membagikan laba sebagai deviden, maka akan mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya akan mengurangi total sumber dana intern atau internal financing (Sartono, 2001).

Macam-Macam Deviden

Berdasarkan bentuk deviden yang dibayarkan, deviden dapat dibedakan atas dua jenis yaitu; deviden tunai (*cash dividend*) dan deviden saham (*stock dividend*). Berdasarkan periode satu tahun buku maka deviden dapat dibagi atas dua jenis yaitu; deviden interm dan deviden final.

Teori Kebijakan Deviden

Terdapat beberapa pendapat dan teori yang mengemukakan tentang deviden diantaranya yaitu: *Dividend Irrelevance Theory* (ketidak relevanan deviden)

Teori yang menyatakan bahwa kebijakan deviden perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Menyimpulkan bahwa nilai perusahaan saat ini tidak dipengaruhi oleh kebijakan deviden.

The Bird in The Hand Theory

Gordon dan Lintner berpendapat bahwa investor lebih merasa aman untuk memperoleh pendapatan berupa pembayaran deviden dari pada menunggu capital gain.

Tax Preference Theory

Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi dari pada deviden dalam bentuk kas. Selain teori diatas terdapat beberapa teori lain mengenai kebijakan deviden yaitu:

1. Teori “*Information Content Hypothesis*”

Adalah teori yang menyatakan bahwa investor menganggap perubahan deviden sebagai isyarat dari prakiraan manajemen atas laba.

2. Teori “*Clientele Effect*”.

Terdapat banyak kelompok investor dengan berbagai kepentingan, ada investor yang lebih menyukai memperoleh pendapatan saat ini dalam bentuk deviden seperti halnya individu yang sudah pension sehingga investor ini menghendaki perusahaan untuk membayar deviden yang tinggi.

3. *Residual Dividend Policy*

Kebijakan ini menyatakan perusahaan membayarkan deviden hanya jika terdapat kelebihan dana atas laba perusahaan yang digunakan untuk membiayai proyek yang telah direncanakan.

4. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Agency Problem biasanya terjadi antara manajer dan pemegang saham atau antara debt holders dan stockholders.

Meskipun konsep tersebut di atas dianggap sebagai teori – teori utama mengenai kebijakan deviden, perkembangan ilmu keangan modern memunculkan pendekatan baru yang lebih relevan dan lebih mampu menjelaskan kebijakan deviden dalam dunia bisnis praktis, yaitu:

Signalling theory is based on the assumption that information is not equally available to all parties at the same time and that information asymmetry is the rule. Information asymmetries can result in very low valuation or a sub optimum investment policy. Signalling theory states that corporate financial decisions are signals sent by the company’s managers to investors in order to shake up thewse asymmetries. These signal are the cornerstone of financial communication policy. (www.loreal-finance.com/site/us/contenu/lexique.asp)

Ada kecenderungan harga saham akan naik jika ada pengumuman kenaikan deviden, dan harga saham akan turun jika ada pengumuman penurunan deviden. Tetapi ada argumen lain yang lebih masuk akal yaitu deviden itu sendiri tidak menyebabkan kenaikan (penurunan) harga, tetapi prospek perusahaan, yang di tunjukkan oleh meningkatnya (menurunnya) deviden yang di bayarkan, yang menyebabkan perubahan harga saham. Teori tersebut kemudian di kenal sebagai teori signal atau isi informasi dari deviden (*Information Content of Devident*). Menurut teori tersebut, deviden mempunyai kandungan informasi yaitu prospek perusahaan di masa mendatang.

Faktor–factor yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio pembayaran deviden suatu perusahaan adalah sebagai berikut: (Riyanto,2001)

1. Posisi likuiditas perusahaan.
2. Kebutuhan untuk membayar hutang
3. Tingkat pertumbuhan perusahaan.
4. Pengawasan terhadap perusahaan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual Penelitian

Para investor akan melakukan investasi dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang bersifat *Dividend* atas investasi tersebut.

Pengaruh *Current Ratio* (CR) terhadap *Dividend Payout Ratio*. Likuiditas perusahaan merupakan pertimbangan utama dalam kebijakan deviden. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diambil

hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1: *Current Ratio*(CR)berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Pengaruh *collateralizable assets* (COL) terhadap *Dividend Payout Ratio* Darman (2008) mengungkapkan collateralizable assets dianggap sebagai proksi asset asset jaminan untuk baiaya agensi yang terjadi karena konflik antara pemegang saham dan pemegang obligasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 2 : *collateralizable assets* (COL) berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Pengaruh *Returnon Equity* (ROE) terhadap *Dividend Payout Ratio* Keuntungan perusahaan merupakan factor pertama yang biasanya menjadi pertimbangan Direksi, walaupun untuk membayar deviden perusahaan rugi pun dapat melaksanakannya, karena adanya cadangan dalam bentuk laba, ditahan. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 3: *Return on Equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Pengaruh *Growth* terhadap *Dividend Payout Ratio* Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 4:*Growth* berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Hipotesis

Dari uraian sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Hipotesis 1 : CR berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Hipotesis 2 : COL berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Hipotesis 3 : ROE berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio*.

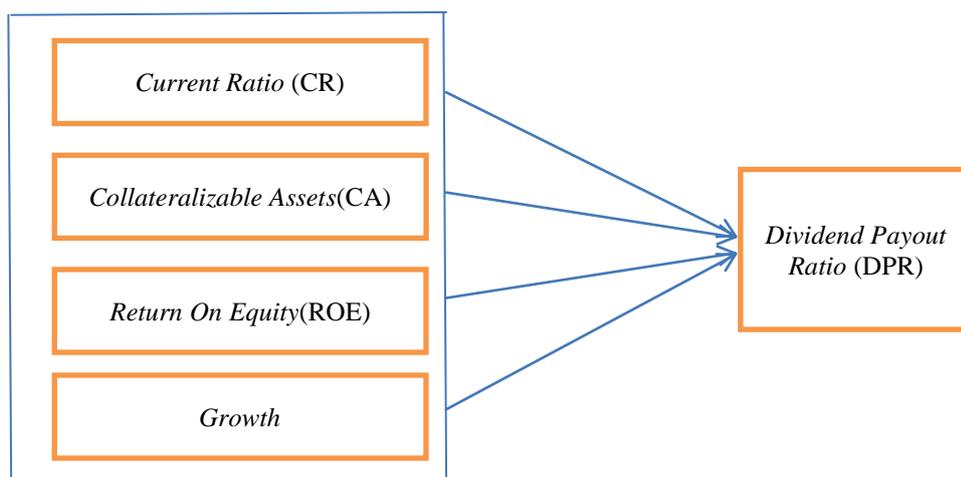
Hipotesis 4 : *Growth* berpengaruh negative terhadap *Dividend Payout Ratio*.

Model Analisis

Model analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Gambar 3.1

Bagan Pengaruh variabel *Current Ratio* (CR), *Collateralizable Assets* (COL), *Return on Equity* (ROE) dan *Growth* terhadap *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Indonesia Periode 2005 - 2011



METODE PENELITIAN

Jenis data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur periode 2005 – 2011 dengan sampel 8 perusahaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari lembaga pengumpul data dan kepustakaan terutama data kuantitatif dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI)

Populasi, sampel, besar sampel dan teknik pengambilan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2005-2011. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 190 perusahaan manufaktur. Besar sampel dan teknik pengambilan sampel Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Data Perusahaan Sampel

| NO | NamaPerusahaan | Jenis Perusahaan |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | PT. Fast Food Indonesia, Tbk | Makanan dan Minuman |
| 2. | PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk. | Makanan dan Minuman |
| 3. | PT. Gudang Garam, Tbk | Rokok |
| 4. | PT. Colorpak Indonesia, Tbk | Plastik dan pelapis (cat) |
| 5. | PT. Sumi Indo Kabel, Tbk | Otomotif dan Komponen |
| 6. | PT. Metro data Electronics, Tbk | Kosmetik dan barang keperluan RT |
| 7. | PT. Tunas Ridean, Tbk | Logam dan sejenisnya |
| 8. | PT. United Tractor, Tbk | Otomotif dan Komponen |

Sumber: KSEI dan IDX 2005 – 2011

Klasifikasi variabel dan definisi operasional variable

Klasifikasi Variabel

Variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada lima variabel yang terdiri dari empat variabel independen yaitu *Current Ratio* (CR), *Collateralizable Assets* (COL), *Return on Equity* (ROE) dan *Growth* serta Satu variabel dependen yaitu *Dividend Payout Ratio* (DPR). Masing-masing variabel penelitian secara operasional dapat didefinisikan sebagai berikut:

Variabel Dependen atau Variabel terikat (Y_1)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *Dividend Payout Ratio* (DPR).

$$DPR = \frac{\text{Dividend per Share}}{\text{Earning Per Share}} \dots\dots\dots(1)$$

Variabel Independen atau Variabel bebas

Variabel bebas adalah variabel yang diduga secara bebas berpengaruh terhadap variabel terikat terdapa tempat variabel bebas dalam penelitian ini yaitu:

1. *Current ratio*/ CR (X1) Likuiditas perusahaan ditunjukkan oleh besar kecilnya aktiva lancarnya itu aktiva yang mudah untuk diubah menjadi kas. Secara sistematis CR dapat dirumuskan sebagai berikut: (Sartono,2001)

$$CR = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{utang lancar}} \dots\dots\dots(2)$$

2. *Collateralizable Assets*/COL (X2) *X*
Collateral Assets adalah asset perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan peminjaman.

$$COL = \frac{\text{aktiva tetap}}{\text{Total aktiva}} \dots\dots\dots(3)$$

3. *Return on Equity/ ROE*(X3)

Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan modal sendiri yang dimilikinya.

$$ROE = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \dots\dots\dots(4)$$

4. *Growth*(X4)

Growth menunjukkan pertumbuhan assets dimana asset merupakan aktiva yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.

$$\text{Growth} = \frac{\text{Total Assets} - \text{Total Assets}_{t-1}}{\text{Total Assets}_{t-1}} \dots\dots\dots(5)$$

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi berapa besar kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresinya adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

dimana:

Y = *Dividend payout ratio*

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X1 = *Current Ratio*

X2 = *Collateralizable assets*

X3 = *Return on Equity*

X4 = *Growth*

E = error

Sementara itu, langkah-langkah untuk menguji pengaruh variabel independen yaitu *Current ratio*, *collateralizable assets*, *return on equity*, dan *growth* dilakukan dengan uji simultan dan uji parsial.

Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bersama-sama antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value* (*p value*) < 0,05, maka Ha diterima dan jika *p value* > 0,05, maka Ha ditolak.

Uji F dapat pula dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung > Ftabel (n-k-1), maka Ha diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Jika Fhitung < Ftabel (n-k-1), maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun dasar pengambilan keputusan mengenai penerimaan dan penolakan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Hipotesis diterima
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Hipotesis ditolak
3. Jika signifikansi > 0,05 maka Hipotesis ditolak
4. Jika signifikansi < 0,05 maka Hipotesis diterima

Melakukan interpretasi model regresi linier berganda

Berdasarkan persamaan regresiberikut dilakukan interpretasi :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

a: Konstanta yang menyatakan bahwa jika tidak ada variabel *current ratio* (CR), *collateralizable asset* (CA), *return on equity* (ROE), dan *growth* maka *Dividend Payout Ratio* (DPR) adalah sebesar 1 satuan.

- β_1 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 kali pada *current ratio* (CR), maka akan menambah atau mengurangi *Dividend Payout Ratio*(DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI sebesar β_1 .
- β_2 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 kali pada *collateralizable asset* (CA), maka akan menambah atau mengurangi *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI sebesar β_2 .
- β_3 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 kali pada *return on equity* (ROE), maka akan menambah atau mengurangi *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI sebesar β_3 .
- β_4 : Koefisien yang menyatakan bahwa setiap kenaikan atau penurunan 1 kali pada *growth* , maka akan menambah atau mengurangi *Dividend Payout Ratio* (DPR) pada perusahaan manufaktur di BEI sebesar β_4 .
- ε : Error term

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel yaitu *current ratio*, *collateralizable assets*, *return on equity*, *growth* dan *dividend payout ratio* di sajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut :

1. Rata – rata *dividend payout ratio* perusahaan (dengan jumlah data 56) adalah sebesar 38,4863 dengan standard deviasi 27,94233
2. Rata – rata *current ratio* perusahaan (dengan jumlah data 56) adalah sebesar 180,4509 dengan standard deviasi 127,01514
3. Rata – rata *collateralizable assets* perusahaan (dengan jumlah data 56) adalah sebesar 26,3214 dengan standard deviasi 18,07269
4. Rata – rata *return on equity* perusahaan (dengan jumlah data 56) adalah sebesar 26,8239 dengan standard deviasi 44,92210
5. Rata – rata *growth* perusahaan (dengan jumlah data 56) adalah sebesar 30,1963 dengan standard deviasi 30,30308

Analisis data

Menentukan variabel independen dan dependen

Dalam pengujian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen, sebagai berikut :

Variabel Independen (X) yaitu:

$X_1 = \text{Current ratio}$

$X_2 = \text{Collateralizable assets}$

$X_3 = \text{Return on equity}$

$X_4 = \text{Growth}$

Variabel dependen (Y) yaitu *dividend payout ratio*

Melakukan Pengujian Hipotesis

Uji Simultan (uji F)

Dari hasil perhitungan pengujian yang di lakukan (Uji F) dapat dilihat variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada perbandingan Fhitung dengan Ftabel dan signifikansi hitung berada di angka 0,05. Berdasarkan hasil pengujian statistik Uji simultan (Uji F) Fhitung diperoleh angka $0,774 < \text{dari Ftabel } 2,55$ dan $\text{sig. hitung } 0,547 > \alpha ; 5\% (0,05)$. Hal ini berarti bahwa *Current ratio*(CR), *collateralizable asset*(CA), *return on equity*(ROE), dan *growth* secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *dividend payout ratio* (DPR).

Uji Statistik (uji t)

Dari hasil perhitungan pengujian yang dilakukan (uji t) dapat dilihat variabel independen secara parsial yaitu *current ratio* (X1), *collateralizable asset* (X2), *return on equity* (X3), dan *growth* (X4) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *dividend payout ratio* (Y). Berdasarkan hasil

perbandingan t hitung dengan t tabel dan sig. hitung dengan α : 5% (0.05). Hal ini ditunjukkan berdasarkan:

1. Hasil uji statistik *Current ratio*(X1) berdasarkan t hitung diperoleh angka $-0,834 <$ dari t tabel 1,67528 dengan sig. hitung $0,408 > \alpha$: 5% (0,05) jadi H1 ditolak, artinya *Current ratio*(X1) tidak berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (Y).
2. Hasil uji statistik *collateralizable asset* (X2) berdasarkan t hitung diperoleh angka $-0,403 <$ dari t tabel 1,67528 dengan sig. hitung $0,264 > \alpha$: 5% (0,05) jadi H2 ditolak, artinya *collateralizable asset* (X2) tidak berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (Y).
3. Hasil uji statistik *return on equity* (X3) berdasarkan t hitung diperoleh angka $1,128 <$ dari t tabel 1,67528 dengan sig. hitung $0,734 > \alpha$: 5% (0,05) jadi H3 ditolak, artinya *return on equity* (X3) tidak berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (Y).
4. Hasil uji statistik *growth* (X4) berdasarkan t hitung diperoleh angka $0,342 <$ dari t tabel 1,67528 dengan sig. hitung $0,408 > \alpha$: 5% (0,05) jadi H1 ditolak, artinya *growth* (X4) tidak berpengaruh negative terhadap *dividend payout ratio* (Y).

Jadi hasil kesimpulan hipotesis dari variabel *current ratio* (X1), *collateralizable asset* (X2), *return on equity* (X3), secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) dan *growth* (X4) secara parsial tidak berpengaruh negative terhadap variabel dependen yaitu *dividend payout ratio* (Y).

Menentukan besarnya koefisien determinasi (R Square/R²)

Angka R Square yaitu 0,057 merupakan angka pengkuadratan dari koefisien atau $(0,239)^2 = 0,057$. R Square biasa disebut dengan koefisien determinasi, angka tersebut berarti 5,7% *Dividend payout ratio* dapat dijelaskan variabel *current ratio* (CR), *collateralizable asset* (CA), *return on equity* (ROE), dan *growth*. Sedangkan sisanya ($100\% - 5,7\% = 94,3\%$) disebabkan oleh faktor – faktor lain. Faktor – faktor lain yang dimaksud antara lain adalah *debt to equity ratio* (DER), *earning per share* (EPS), *return on assets* (ROA) serta kemampuan manajemen untuk dapat memberikan informasi yang bernilai dalam pengambilan keputusan untuk membagikan deviden dan lain sebagainya.

Melakukan Interpretasi model Regresi linier berganda

Interpretasi model regresi linier berganda seperti yang disajikan pada tabel 5.5 sehingga dapat dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 41,726 - 0,027X1 - 0,087X2 + 0,100X3 + 0,044X4$$

Persamaan diatas berarti,

Nilai konstan (a) = 41,726. Nilai ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel *current ratio* (X1), *collateralizable asset* (X2), *return on equity* (X3), dan *growth* (X4) maka *dividend payout ratio* (DPR) akan naik sebesar 41,726 kali. Dengan kata lain *dividend payout ratio* akan naik sebesar 41,726 sebelum atau tanpa adanya variabel *current ratio* (CR), *collateralizable asset* (CA), *return on equity* (ROE), dan *growth* (X1, X2, X3, dan X4 = 0)

Nilai *current ratio* (X1) (b1) = -0,027. Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa setiap variabel *current ratio* (CR) meningkat 1 kali, maka *Deviden payout ratio*(DPR) akan turun sebesar -0,027 kali. Dengan kata lain setiap penurunan *Deviden payout ratio*(DPR) dibutuhkan variabel *current ratio* (CR) sebesar -0,027 dengan asumsi variabel lain tetap (X2, X3, dan X4) atau *ceteris paribus*.

Nilai *collateralizable asset* (X2) (b2) = -0,087. Nilai parameter atau koefisien regresi b2 ini menunjukkan bahwa setiap variabel *collateralizable asset* meningkat 1 kali, maka *Deviden payout ratio*(DPR) akan turun sebesar -0,087 kali. Dengan kata lain setiap penurunan *Deviden payout ratio*(DPR) dibutuhkan variabel *collateralizable asset* (CA) sebesar -0,087 dengan asumsi variabel lain tetap (X1, X3, dan X4) atau *ceteris paribus*.

Nilai *return on equity* (X3) (b3) = 0,100. Nilai parameter atau koefisien regresi b3 ini menunjukkan bahwa setiap variabel *return on equity* (ROE) meningkat 1 kali, maka *Deviden payout ratio*(DPR) akan naik sebesar 0,100 kali. Dengan kata lain setiap kenaikan *Deviden payout ratio*(DPR) dibutuhkan variabel *return on equity* (ROE) sebesar 0,100 dengan asumsi variabel lain tetap (X1, X2, dan X4) atau *ceteris paribus*.

Nilai *growth* (X4) (b_4) = 0,044. Nilai parameter atau koefisien regresi b_4 ini menunjukkan bahwa setiap variabel *growth* meningkat 1 kali, maka *Deviden payout ratio* (DPR) akan naik sebesar 0,044 kali. Dengan kata lain setiap kenaikan *Deviden payout ratio* (DPR) dibutuhkan variabel *growth* sebesar 0,044 dengan asumsi variabel lain tetap (X1, X2, dan X3) atau *ceteris paribus*.

Pembahasan

1. Pembahasan Hipotesis 1

Hipotesis pertama yang diajukan menyatakan bahwa *current ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel *current ratio* (CR) sebesar -0,027 dengan nilai signifikansi sebesar 0,408, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *current ratio* (CR) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) tidak dapat diterima atau H1 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *current ratio* (CR) tidak berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi *current ratio* (CR) yang sebagaimana biasa diperoleh dari laporan keuangan tidak berpengaruh positif signifikan pada keputusan pembagian deviden kepada para investor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Posisi kas atau likuiditas perusahaan merupakan faktor yang penting yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan untuk menetapkan besarnya deviden yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham. Akan tetapi perusahaan yang sedang tumbuh secara rendah (perusahaan yang masih mencari keuntungan), mungkin tidak begitu kuat posisi likuiditasnya karena sebagian besar dari dananya tertanam dalam aktiva tetap dan modal kerja sehingga kemampuannya untuk membayar deviden pun sangat terbatas. Di satu sisi deviden tunai dapat dibagikan hanya dengan uang kas. Apabila likuiditas tersebut tertahan pada aktiva yang sifatnya tidak likuid maka dengan sendirinya deviden tidak dapat dibagikan. Keputusan para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pun mempengaruhi kebijakan dalam pembagian deviden.

Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian dari Kania dan Bacon (2005), Michell Suharli (2007), Handayani (2010), dan Murhadi (2010) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *current ratio* (CR) tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *dividend payout ratio* (DPR).

2. Pembahasan Hipotesis 2

Hipotesis kedua yang diajukan menyatakan bahwa *collateralizable assets* (COL) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel *collateralizable asset* (COL) sebesar -0,087 dengan nilai signifikansi sebesar 0,689, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *collateralizable assets* (COL) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) tidak dapat diterima atau H2 ditolak.

Hasil penelitian ini berarti bahwa nilai *collateralizable asset* (COL) tidak berpengaruh pada *dividend payout ratio* (DPR). Hasil penelitian yang tidak berpengaruh antara variabel *collateralizable asset* (COL) terhadap *dividend payout ratio* (DPR) disebabkan adanya permintaan jaminan oleh pihak kreditor berupa aktiva kepada pemegang saham pada saat membutuhkan pendanaan. Semakin rendahnya *collateralizable asset* (COL) yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditor sehingga kreditor akan menghalangi perusahaan untuk membayar deviden dengan jumlah besar kepada pemegang saham karena takut piutang mereka tidak terbayar. Hal ini mengindikasikan bahwa *collateralizable assets* (COL) yang menurun menandakan pembagian deviden akan menurun bahkan tidak membagikan deviden sama sekali. Akibatnya tidak adanya pengaruh antara *collateralizable asset* (CA) terhadap *dividend payout ratio* (DPR).

Hasil temuan ini tidak mendukung hasil penelitian dari Nugraha (2006) dan Wahyudi dan Baidori (2008) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara *collateralizable asset* (CA) terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Hal ini berarti tingginya jaminan yang dimiliki perusahaan akan mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dengan kreditor sehingga perusahaan dapat membayar deviden dengan jumlah yang lebih besar.

3. Pembahasan Hipotesis 3

Hipotesis ketiga yang diajukan menyatakan bahwa *return on equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variable *return on equity* (ROE) sebesar 0,100 dengan nilai signifikansi sebesar 0,264, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *return on equity* (ROE) berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) tidak dapat diterima atau H3 ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *return on equity* (ROE) tidak berpengaruh positif terhadap *dividen payout ratio* (DPR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi *return on equity* (ROE) yang berarti kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan belum bisa memberikan pengaruh signifikan terhadap *dividen payout ratio* (DPR). Deviden merupakan sebagian dari laba bersih yang diperoleh perusahaan, oleh karenanya deviden akan dibagikan, jika perusahaan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang layak dibagikan kepada para pemegang saham adalah keuntungan setelah perusahaan memenuhi seluruh kewajiban tetapnya yaitu beban bunga dan pajak. Investor menghendaki perusahaan untuk menahan laba setelah pajak dan dipergunakan untuk pembiayaan investasi daripada deviden dalam bentuk kas. Besar kecilnya keuntungan dari perusahaan berpengaruh terhadap hasil *return on equity* (ROE) yang darinya deviden dibagikan.

Hasil temuan ini tidak mendukung hasil penelitian dari Kania dan Bacon (2005) dan Michell Suharli (2006) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *return on equity* (ROE) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Kecilnya keuntungan yang di peroleh oleh perusahaan setelah memenuhi seluruh kewajiban tetapnya akan sangat mempengaruhi besar kecilnya *dividend payout ratio* (DPR) yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini berarti naiknya keuntungan perusahaan akan sangat mempengaruhi nilai deviden yang akan di bagikan kepada para investor atau pemegang saham.

4. Pembahasan Hipotesis 4

Hipotesis keempat yang diajukan menyatakan bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Dari hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variable *growth* sebesar 0,044 dengan nilai signifikansi sebesar 0,734, dimana nilai ini tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 karena lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *growth* berpengaruh negatif terhadap *dividend payout ratio* (DPR) tidak dapat diterima atau H4 ditolak.

Makin cepat tingkat pertumbuhan suatu perusahaan, makin besar kebutuhan dana untuk waktu mendatang untuk membiayai pertumbuhannya. Perusahaan tersebut biasanya akan lebih senang menahan pendapatannya daripada dibayarkan sebagai deviden,

Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi yang sesuai dengan teori yang mendasarinya yaitu apabila perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan sedemikian rupa sehingga perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan yang mapan, dimana kebutuhan dananya dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal atau sumber dana ekstern lainnya, maka keadaannya adalah perusahaan dapat menetapkan *dividend payout ratio* (DPR) yang tinggi.

Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Sejalan dengan penelitian ini hasil penelitian oleh Nugroho (2004) juga menemukan bahwa *growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *dividend payout ratio* (DPR). Hal ini mengindikasikan bahwa investor masih menggunakan rasio *growth* dalam mengambil keputusan dalam hal menentukan nilai pembagian deviden atau *dividend payout ratio* (DPR) terhadap para pemegang saham.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. *Current ratio* (X1) tidak berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio* (Y) pada perusahaan manufaktur di BEI.
2. *Collateralizable asset*(X2) tidak berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio* (Y) pada

- perusahaan manufaktur di BEI.
3. *Return on equity*(X3) tidak berpengaruh positif terhadap *Dividend Payout Ratio* (Y) pada perusahaan manufaktur di BEI.
 4. *Growth*(X4) tidak berpengaruh negatif terhadap *Dividend Payout Ratio* (Y) pada perusahaan manufaktur di BEI.

Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian yang berasal dari perusahaan manufaktur sehingga belum tentu dapat digeneralisasi pada jenis industry lainnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu penelitian. Disarankan pada penelitian selanjutnya ruang lingkup penelitian dapat diperluas ke jenis-jenis industry lainnya juga menambahkan variabel penelitian seperti *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return on Equity* (ROE), dan rasio – rasio yang lain. Dan juga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan rentang waktu yang lebih panjang.
2. Bagi investor dan kreditor, pengambilan keputusan yang baik dan tepat dalam hal pembagian deviden untuk suatu perusahaan perlu analisis yang baik dalam hal analisis fundamental dan teknikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sawir. 2005. *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Agus Sartono, 2001. *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPEF-YOGYAKARTA
- Ambarwati, SriDwi Ari. 2010. *Manajemen Keuangan Lanjut*. Graha Ilmu. Amidu,
- Andriyani Pujiastuti, Maria. 2008. “Analisis Pengaruh *Cash Ratio*, *Debt to Equity Ratio*, *Insider Ownership*, *Invesment Opportunity Set (IOS)*, dan *Profitability* terhadap Kebijakan Dividen” Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Ang, Robbert. 1997. *Buku Pintar Pasar Modal Indonesia*, Edisi 1, Mediasoft Indonesia.
- Anil, Kand Kapoor, S. 2008. “Determinant of Dividend Payout Ratio-A Study of Indian Information Technology Sector”. *International Research Journal of Finance and Economics*. p.63-71.
- Chasanah, Amalia Nur. 2008. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Dividend Payout Ratio* pada Perusahaan yang *Listed* di Bursa Efek Indonesia (Perbandingan pada Perusahaan yang Sebagian Sahamnya Dimiliki oleh manajemen dan yang Tidak Dimiliki Oleh Manajemen” Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Crutchley, C, and Hansen, R. 1989. *A Test of the Agency Theory of Managerial Ownership, Corporate Leverage, and Corporate Dividends*. *Financial Management*, Winter 1989, 36-46.
- Damayanti, S dan Achyani, F (2006). Analisis Pengaruh Investasi, Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen *Payout Ratio*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 5 No.1 April. p. 51-62.
- Elloumi, Fathi dan Jena-Pierre Gueyle. 2003. “*CEO Compensation, IOS, and The Role of Corporate Governance*,” *Corporate Governance*, Vol.1, No.2, p.23-33
- Ismiyanti, Fitri dan Mamduh Hanafi. 2003. Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Risiko, Kebijakan Hutang dan Kebijakan Dividen: Analisa Persamaan Simultan, ”Makalah Seminar, Simposium Nasional Akuntansi VI, Ikatan Akuntansi Indonesia, 260-276.
- Gaver, J J dan Keneth M Gaver. 1993. “*Additional Evidence on The Association Between The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend and Compensation Policies*,” *Journal of Accounting and economics*, Vol.1, p.233-265
- Gill, Amarjit, Nahum Biger, dan Rajendra Tibrewala. 2010. “Determinants of Dividend Payout Ratios: Evidence for United States. *The Open Business Journal*, 2010,3,8-14.
- Gitman, Lawrence J. 2003, *Principles of Managerial Finance*, Edisi Kesepuluh, Addison Wesley Publishing Company, Massachusetts.
- Hafeez, Ahmed dan Attiya Y. Javid. 2009. “*The Determinants of Dividend Policy in Pakistan*”. *International Research Journal of Finance and Economics*. ISSN1450-2887 Issue29 (2009). Euro Journals Publishing, Inc. 2009.

EFEK WAKTU PASAR DAN KEBIJAKAN INVESTASI TERHADAP STRUKTUR MODAL

Winston Pontoh

(Email : winston_pontoh@yahoo.com)

Abstract

The capital structure policy by an entity is still a question specially in the context of investment policy and if related to market timing. The question is still exist because the entity faced by two options of financing which are internal financing (capital) and external financing (debt).

This study is using data from the samples of 241 entities listed in Indonesia Stock Exchange in period of 2009 till 2012 making the total of observed data are 964.

Conducting multiple regression analysis, this study conclude that, the effect of pecking order, trade off and market timing are not absolute for all conditions of entities, because the entities will take decision for capital structure policy based on its conditions such as internally or externally. In this case, the external condition is referring to capital market.

Keywords : pecking order, trade off, market timing

1. Pendahuluan

Kebijakan struktur modal dari sebuah entitas bisnis masih menjadi sebuah permasalahan khususnya dalam konteks kebijakan investasi dan jika dikaitkan dengan efek waktu pasar. Permasalahan ini disebabkan karena entitas bisnis masih diperhadapkan dengan 2 (dua) pilihan pembiayaan yaitu yang berasal dari modal sendiri atau menggunakan dana eksternal berupa modal utang. Dalam sudut pandang pihak eksternal entitas, dasar pertimbangan untuk penetapan struktur modal entitas masih sulit dipahami karena entitas bisnis dipandang sebagai sebuah “kotak hitam” (Zingales, 2000). Selain dukungan teori *pecking order* dan *trade off* (Cheng dan Shiu, 2007), di pihak lain, Marsh (1982) dan Masulis (1983) menyatakan bahwa, pemilihan struktur modal sebuah entitas bisnis lebih banyak dipengaruhi oleh harga pasar saham yang merupakan bentuk dari efek waktu pasar.

Penelitian ini melanjutkan hasil penelitian dari Pontoh (2014) dan bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang dasar pertimbangan penetapan struktur modal sebuah entitas bisnis dalam konteks kebijakan investasi, berdasarkan teori *pecking order*, *trade off* dan waktu pasar (*market timing*).

2. Tinjauan Pustaka

Teori struktur modal adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan berbagai kombinasi surat-surat berharga dan sumber pendanaan yang digunakan oleh sebuah entitas bisnis dalam membiayai kegiatan investasinya (Myers, 2001; Chemmanur, Nandy, Yan, dan Jiao, 2014; Acharya, Almeida, dan Campello, 2007), dan beberapa teori kondisional yang sering diaplikasikan adalah *Trade Off Theory* dan *Pecking Order Theory* (Sunder dan Myers, 1999; Myers, 2001).

Fama dan French (2002) menjelaskan bahwa, dalam model *trade off*, adanya biaya keagenan, pajak dan biaya kebangkrutan akan mendorong entitas bisnis yang memiliki profitabilitas yang tinggi untuk menggunakan utang dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan dalam model *pecking order*, semakin tinggi laba yang diperoleh entitas bisnis akan mengakibatkan berkurangnya penggunaan utang.

Kayhan dan Titman (2007) yang menemukan bahwa, harga saham memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap rasio utang (yang diukur dengan rasio total utang atas total aset), dalam arti bahwa, entitas bisnis akan cenderung menerbitkan saham baru pada saat harga

pasar saham mengalami kenaikan. Baker dan Wurgler (2002) menyebutnya sebagai efek waktu pasar (*market timing*)

Graham (1996) menemukan bahwa, kepemilikan aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio utang (yang diukur dengan perubahan rasio utang atas ekuitas). Crutchley, Jensen, Jahera, dan Raymond (1999) menemukan bahwa, kepemilikan aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio utang (yang diukur dengan rasio utang jangka panjang atas total aset). Frank dan Goyal (2003) menemukan bahwa, kepemilikan aset tetap dari entitas bisnis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap rasio utang (yang diukur dengan rasio utang atas aset).

3. Hipotesis dan Model

Fama dan French (2002) menjelaskan bahwa, dalam model *trade off*, adanya biaya keagenan, pajak dan biaya kebangkrutan akan mendorong entitas bisnis yang memiliki profitabilitas yang tinggi untuk menggunakan utang dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan dalam model *pecking order*, semakin tinggi laba yang diperoleh entitas bisnis akan mengakibatkan berkurangnya penggunaan utang. Pendapat ini didukung oleh hasil penelitian dari Byoun (2008) yang menemukan bahwa, profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang. Hasil penelitian ini juga didukung oleh Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dan Lucey dan Zhang (2011).

Ha₁ : Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang.

Hovakimian, Opler, dan Titman (2001) menjelaskan bahwa, harga pasar saham sebuah entitas bisnis dapat mempengaruhi pemilihan struktur modal entitas bisnis tersebut. Jika harga pasar saham sebuah entitas bisnis berada posisi yang rendah dari posisi pengembalian atau nilai bukunya, maka para manajer dari pihak internal cenderung untuk tidak menerbitkan saham tambahan. Hasil penelitian ini didukung oleh Warr, Elliott, Kant, dan Öztekin (2012) dan Bonaimé, Öztekin, dan Warr (2014).

Ha₂ : Harga pasar saham memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang.

Whited (1992) menjelaskan bahwa, sebuah entitas bisnis yang berukuran lebih kecil dengan likuiditas aset yang lebih rendah akan memiliki kesulitan untuk memperoleh fasilitas pendanaan karena aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk digunakan sebagai jaminan utang. Pendapat ini didukung oleh Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dan Crutchley, Jensen, Jahera, dan Raymond (1999) yang menemukan bahwa, kepemilikan aset tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang.

Ha₃ : Kepemilikan aset tetap memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang.

Berdasarkan rumusan hipotesis, maka model persamaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut :

$$DAR = \alpha + \beta ROA + \beta Price + \beta Tang \dots\dots\dots (1)$$

$$DAR_{<med} = \alpha + \beta ROA_{<med} + \beta Price + \beta Tang_{<med} \dots\dots\dots (2)$$

$$DAR_{<med} = \alpha + \beta ROA_{>med} + \beta Price + \beta Tang_{>med} \dots\dots\dots (3)$$

$$DAR_{<med} = \alpha + \beta ROA_{<med} + \beta Price + \beta Tang_{>med} \dots\dots\dots (4)$$

$$DAR_{<med} = \alpha + \beta ROA_{>med} + \beta Price + \beta Tang_{<med} \dots\dots\dots (5)$$

$$DAR_{>med} = \alpha + \beta ROA_{<med} + \beta Price + \beta Tang_{<med} \dots\dots\dots (6)$$

$$DAR_{>med} = \alpha + \beta ROA_{>med} + \beta Price + \beta Tang_{>med} \dots\dots\dots (7)$$

$$DAR_{>med} = \alpha + \beta ROA_{<med} + \beta Price + \beta Tang_{>med} \dots\dots\dots (8)$$

$$DAR_{>med} = \alpha + \beta ROA_{>med} + \beta Price + \beta Tang_{<med} \dots\dots\dots (9)$$

4. Metode Penelitian

4.1.Data

Data dalam penelitian ini mengambil sampel 241 entitas bisnis yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Data observasi dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah berjumlah 964 data observasi.

4.2.Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rasio utang.

Rasio utang digunakan sebagai variabel dependen yang diproksikan dengan rasio total utang atas total aset (selanjutnya disingkat dengan DAR) dan diukur dengan persen. Variabel ini mengontrol nilai tengah (median) dari rata-rata rasio utang selama 4 tahun, sehingga entitas dengan nilai DAR yang berada dibawah nilai tengah akan dianalogikan sebagai entitas yang memiliki rasio utang yang rendah dan begitu juga sebaliknya.

2. Profitabilitas.

Profitabilitas digunakan sebagai variabel independen yang diukur dengan rasio laba bersih atas total aset (selanjutnya disingkat ROA) dan diukur dengan persen. Variabel ini mengontrol nilai tengah (median) dari rata-rata rasio laba bersih atas total aset selama 4 tahun, sehingga entitas dengan nilai ROA yang berada dibawah nilai tengah akan dianalogikan sebagai entitas dengan profitabilitas rendah dan begitu juga sebaliknya.

3. Harga pasar saham.

Harga pasar saham digunakan sebagai variabel independen yang mengambil harga pasar saham penutupan setelah disesuaikan dengan kebijakan entitas (*adjusted closing price*) dan dinormalisasi dengan menggunakan logaritma natural (selanjutnya disingkat Price).

4. Kepemilikan aset tetap.

Kepemilikan aset tetap digunakan sebagai variabel independen yang diproksikan dengan rasio aset tetap atas total aset (selanjutnya disingkat Tang) dan diukur dengan persen. Variabel ini dikontrol berdasarkan nilai tengah (median) atas rata-rata rasio aset tetap atas total aset selama 4 tahun, sehingga entitas dengan nilai Tang yang berada dibawah nilai tengah akan dianalogikan sebagai entitas yang memiliki nilai aset tetap yang rendah dan begitu juga sebaliknya.

4.3.Metode Analisis

Dalam penelitian ini, metode analisis yang akan digunakan untuk pengujian hipotesis adalah menggunakan uji regresi berganda yang digunakan berdasarkan data panel.

5. Hasil Analisis dan Pembahasan

5.1.Hasil Analisis

Statistik deskriptif menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 1. Statistik Deskriptif

| Keterangan | Nilai Tengah (Median) |
|------------|-----------------------|
| DAR | 0.51 |
| ROA | 0.05 |
| Tang | 0.34 |

Berdasarkan nilai tengah dalam analisis statistik deskriptif (lihat Tabel 1), maka kontrol atas variabel DAR, ROA dan Tang dapat dilakukan berdasarkan nilai tengah tersebut.

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

| | DAR | DAR _{<med} | | | DAR _{>med} | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|---------|--------|------------------------|---------|---------|---------|--------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Konstan | 0.866 | 0.269 | 0.600 | 0.195 | 0.240 | 0.858 | 1.456 | 0.814 | 1.381 |
| ROA | -0.262* | | | | | | | | |
| ROA _{<med} | | -0.032 | | -0.087 | | -1.176* | | -2.312* | |
| ROA _{>med} | | | -0.006 | | -0.163 | | 0.306 | | 0.924* |
| Price | -0.040* | 0.003 | -0.042* | 0.029 | 0.002 | 0.000 | -0.089* | 0.059 | -0.070 |
| Tang | -0.044 | | | | | | | | |
| Tang _{<med} | | 0.197 | | | 0.444* | -0.408 | | | -0.819 |
| Tang _{>med} | | | 0.133* | -0.004 | | | -0.109 | -0.803* | |

*signifikan pada tingkat 5%

Berdasarkan hasil analisis regresi (lihat Tabel 2), ditemukan bahwa profitabilitas (ROA) dalam kondisi 1, kondisi 6, kondisi 8 dan kondisi 9 memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang (DAR), dimana hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Byoun (2008), Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dan Lucey dan Zhang (2011). Demikian juga dengan harga pasar saham (Price), dalam kondisi 1, kondisi 3, dan kondisi 7 memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang (DAR), dimana hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Hovakimian, Opler, dan Titman (2001), Warr, Elliott, Kant, dan Öztekin (2012) dan Bonaimé, Öztekin, dan Warr (2014). Sedangkan kepemilikan aset tetap (Tang), dalam kondisi 3, kondisi 5, dan kondisi 8 memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio utang (DAR), dimana hasil ini sesuai dengan hasil penelitian dari Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) dan Crutchley, Jensen, Jahera, dan Raymond (1999).

5.2. Pembahasan

Kondisi 1 menunjukkan adanya efek *pecking order* dimana semakin tinggi profitabilitas dan kepemilikan aset tetap, maka rasio utang dari entitas akan mengalami penurunan, walaupun kepemilikan aset tetap tidak signifikan. Selain itu, efek waktu pasar (*market timing*) juga berlaku dalam kondisi ini, dimana pada saat kenaikan harga pasar saham, maka entitas bisnis cenderung untuk menurunkan rasio utangnya. Akan tetapi kondisi 1 bukan merupakan kondisi mutlak, karena pada saat dilakukan kontrol atas variabel rasio utang, profitabilitas dan kepemilikan aset tetap, efek dari *pecking order* tidak terjadi, melainkan *trade off*, seperti yang ditunjukkan dalam kondisi 7 dan kondisi 9, walaupun kondisi 7 menunjukkan pengaruh tidak signifikan dari profitabilitas terhadap rasio utang.

Tanpa memandang signifikansi, secara khusus dapat dinyatakan bahwa, dalam kondisi 2, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang rendah, profitabilitas yang rendah dan kepemilikan aset tetap yang rendah cenderung menurunkan rasio utangnya pada saat terjadi peningkatan atas profitabilitas dan cenderung meningkatkan rasio utangnya pada terjadi peningkatan dalam kepemilikan aset tetap (terjadi investasi tambahan) dan pada saat harga pasar saham meningkat. Dalam kondisi 3, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang rendah, profitabilitas dan kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung menurunkan rasio utangnya pada saat profitabilitas dan harga pasar saham mengalami peningkatan dan cenderung meningkatkan rasio utang pada saat kepemilikan aset tetap mengalami peningkatan. Dalam kondisi 4, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang rendah, profitabilitas yang rendah dan kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung menurunkan rasio utang pada saat profitabilitas dan kepemilikan aset tetap mengalami peningkatan tapi akan cenderung meningkatkan rasio utang pada saat harga pasar saham mengalami peningkatan. Dalam kondisi 5, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang rendah, profitabilitas yang tinggi, dan kepemilikan aset tetap yang rendah cenderung menurunkan rasio utang pada saat profitabilitas mengalami peningkatan dan cenderung meningkatkan rasio utang pada saat kepemilikan aset tetap dan harga pasar saham mengalami

peningkatan. Dalam kondisi 6, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang tinggi, profitabilitas yang rendah, dan kepemilikan aset tetap yang rendah cenderung mengurangi rasio utang pada saat profitabilitas dan kepemilikan aset mengalami peningkatan dan cenderung meningkatkan rasio utang pada saat harga pasar saham mengalami peningkatan. Dalam kondisi 7, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang dan profitabilitas serta kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung meningkatkan rasio utangnya pada saat profitabilitas mengalami peningkatan dan cenderung mengurangi rasio utang pada saat kepemilikan aset tetap dan harga pasar saham mengalami peningkatan. Dalam kondisi 8, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang yang tinggi, profitabilitas yang rendah, dan kepemilikan aset tetap yang tinggi cenderung mengurangi rasio utang pada saat profitabilitas dan kepemilikan aset tetap mengalami peningkatan dan cenderung meningkatkan rasio utang pada saat terjadi peningkatan harga pasar saham. Sedangkan dalam kondisi 9, entitas bisnis dengan kondisi memiliki rasio utang dan profitabilitas yang tinggi, serta kepemilikan aset tetap yang rendah cenderung akan meningkatkan rasio utang pada saat profitabilitas mengalami peningkatan dan cenderung mengurangi rasio utang pada saat terjadi peningkatan pada kepemilikan aset tetap dan harga pasar saham.

6. Kesimpulan

Efek dari *pecking order* dan *trade off* serta *market timing* tidak mutlak terjadi dalam semua kondisi dari sebuah entitas bisnis, karena entitas bisnis akan mengambil keputusan atas kebijakan struktur modal berdasarkan kondisi-kondisi tertentu dari segi internal entitas bisnis dan berdasarkan pengaruh eksternal entitas yaitu pasar modal.

7. Daftar Pustaka

- Acharya, V. V., Almeida, H., dan Campello, M. (2007). Is Cash Negative Debt? A Hedging Perspective on Corporate Financial Policies. *Journal of Financial Intermediation*, 16(4), 515-554.
- Baker, M., dan Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. *The Journal of Finance*, 57(1), 1-32.
- Bonaimé, A. A., Öztekin, Ö., dan Warr, R. S. (2014). Capital Structure, Equity Mispricing, and Stock Repurchases. *Journal of Corporate Finance*, 26, 182-200.
- Byoun, S. (2008). How and When Do Firms Adjust Their Capital Structures toward Targets? *The Journal of Finance*, 63(6), 3069-3096.
- Chemmanur, T. J., Nandy, D., Yan, A., dan Jiao, J. (2014). A Theory of Mandatory Convertibles. *Journal of Banking and Finance*, 42, 352-370.
- Cheng, S. R., dan Shiu, C. Y. (2007). Investor Protection and Capital Structure : International Evidence. *Journal of Multinational Financial Management*, 17(1), 30-44.
- Crutchley, C. E., Jensen, M. R.H., Jahera, J. S., Jr., dan Raymond, J. E. (1999). Agency Problems and the Simultaneity of Financial Decision Making-The Role of Institutional Ownership. *International Review of Financial Analysis*, 8(2), 177-197.
- Fama, E. F., dan French, K. R. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order Predictions about Dividends and Debt. *The Review of Financial Studies*, 15(1), 1-33.
- Frank, M. Z., dan Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. *Journal of Financial Economics*, 67(2), 217-248.
- Graham, J. R. (1996). Debt and the Marginal Tax Rate. *Journal of Financial Economics*, 41(1), 41-73.
- Hovakimian, A., Opler, T., dan Titman, S. (2001). The Debt-Equity Choice. *The Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 36(1), 1-24.

- Jensen, G. R., Solberg, D. P., dan Zorn, T. S. (1992). Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 27(2), 247-263.
- Kayhan, A., dan Titman, S. (2007). Firms' Histories and their Capital Structures. *Journal of Financial Economics*, 83(1), 1-32.
- Lucey, B. M., dan Zhang, Q. Y. (2011). Financial Integration and Emerging Markets Capital Structure. *Journal of Banking & Finance*, 35(5), 1228-1238.
- Marsh, P. (1982). The Choice Between Equity and Debt : An Empirical Study. *The Journal of Finance*, 37(1), 121-144.
- Masulis, R. W. (1983). The Impact of Capital Structure Change on Firm Value : Some Estimates. *The Journal of Finance*, 38(1), 107-126.
- Myers, S. C. (2001). Capital Structure. *The Journal of Economic Perspectives*, 15(2), 81-102.
- Pontoh, W. (2014). Kebijakan Struktur Modal dan Efek Waktu Pasar. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 9(3), 1-6.
- Sunder, L. S., dan Myers, S. C. (1999). Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure. *Journal of Financial Economics*, 51(2), 219-244.
- Warr, R. S., Elliott, W. B., Kant, J. K. dan Öztekin, Ö. (2012). Equity Mispricing and Leverage Adjustment Costs. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 47(3), 589-616.
- Whited, T. M. (1992). Debt, Liquidity Constraints, and Corporate Investment : Evidence from Panel Data. *The Journal of Finance*, 47(4), 1425-1460.
- Zingales, L. (2000). In Search of New Foundations. *The Journal of Finance*, 55(4), 1623-1654.

